

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2014 - 2018



**DINAS KESEHATAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jl.DR.M.Ali Komp. RSMH Palembang, Telp. 0711-354915



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KESEHATAN

Jln. Dr. M. Ali Komp. RSUP Dr. Moch Hoesin Palembang 30126
Telp. (0711) 354915 Fax. (0711) 351749 - 321707



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 06 /SK/DINKES/2014

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2014 - 2018**

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 - 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4544);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4817);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013 Nomor 11);
7. Surat Edaran Gubernur Tanggal 27 Oktober 2014 No.900/2660/2014. Hal Sinkronisasi Renstra SKPD dengan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2018.
- KEDUA** : Rencana Strategis Tahun 2014 – 2018 tersebut dijabarkan lebih lanjut kedalam Rencana Kerja Tahunan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 26 Nopember 2014

**Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Sumatera Selatan,**



Dra. Lesty Nurainy, Apt, M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19620703 198903 2 002

Tembusan :

1. Bapak Gubernur Sumatera Selatan di Palembang sebagai laporan;
2. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.

KATA PENGANTAR

Atas Rahmat dan Karunia dari Allah SWT dan dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, akhirnya Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan periode 2013 – 2018 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun antara lain berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan periode 2008 - 2013, analisa atas pendapat para pemangku kepentingan (stakeholders) di tingkat pusat dan daerah, analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis baik global maupun nasional. Selain itu, Renstra ini juga disusun dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2013 - 2018, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan, serta visi Sumatera Selatan, sebagaimana diamanatkan pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2013-2018.

Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan staf Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*). Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan periode 2013-2018 yaitu “Sumatera Selatan Sehat, Mandiri dan Berkeadilan”, maka akan dilakukan evaluasi setiap tahun.

Disadari bahwa dalam penyusunan Renstra ini dimungkinkan ada kekurangan dan keterbatasan, maka apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat

dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya. Revisi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan pembangunan kesehatan di Provinsi Sumatera Selatan.

Atas perhatian dan kerjasama yang dibangun dalam penyusunan Renstra ini disampaikan penghargaan dan terima kasih.

Palembang, 2014
Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Sumatera Selatan



[Signature]
Dra. Lesty Nurainy, Apt, M.Kes
NIP. 196207031989032002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	iii
BAB I Pendahuluan.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II Gambaran Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan	8
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	8
2.2. Susunan Kepegawaian dan Aset yang dikelola.....	10
2.3. Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran	12
BAB III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD.....	16
3.1. Gambaran Umum Daerah Terkait dengan Pelayanan SKPD.....	16
3.2. Hasil-hasil yang dicapai selama tahun sebelumnya.....	22
3.3. Analisa isu-isu strategis berkaitan dengan tugas dan fungsi SKPD.....	44
BAB IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	48
4.1. Visi	48
4.2. Misi	48
4.3. Tujuan dan Sasaran	50
4.4. Strategi	55
4.5. Kebijakan	57

BAB V	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.....	59
BAB VI	Indikator Kinerja SKPD Provinsi yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Selatan.....	76
BAB VII	Penutup	78
Lampiran-Lampiran		
1. IKU / IKK		
2. Tabel 1 s.d 5		

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta mengelola sumber daya ekonomi daerah. Pembangunan Daerah juga merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram. Pembangunan Daerah juga memperluas pilihan yang dapat dilakukan masyarakat bagi peningkatan harkat, martabat, dan harga diri. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Keberhasilan pembangunan suatu daerah, salahsatunya dapat di lihat dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana untuk mencapai IPM tersebut, salah satu komponen utama yang mempengaruhinya yaitu indikator status kesehatan selain pendidikan dan pendapatan per kapita. Dengan demikian pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya utama untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya mendukung percepatan pembangunan nasional.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan kesehatan sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 28 H, perlu disusun rencana strategi yang berisi visi, misi serta tahapan-tahapan kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mencapai target (indikator) yang telah ditetapkan. Tahap-tahap

kegiatan pembangunan kesehatan tersebut dituangkan dalam bentuk Rencana Strategi.

Rencana Strategi tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi Gubernur terpilih yaitu **Ir. H. Alex Nurdin**, yang telah dilantik pada tanggal 7 Nopember 2013. Visi dan Misi tersebut dituangkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan khususnya periode 2013 – 2018

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu Perangkat Daerah Provinsi mempunyai tugas untuk membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesehatan dalam rangka mewujudkan visi daerah yaitu “**Sumatera Selatan Sejahtera Lebih Maju dan Berdaya Saing Internasional**”, dengan misi yaitu : 1) Tingkatkan Produktivitas, 2) Mantapkan Stabilitas, .3) Tingkatkan Equitabilitas, dan 4) Wujudkan Sustainability, yang keempat misi tersebut terkait dengan bidang kesehatan.

Untuk mencapai visi dan misi daerah Sumatera Selatan tersebut, Dinas Kesehatan dituntut untuk mempunyai visi, misi dan tujuan strategi, sasaran, program kegiatan yang dituangkan dalam bentuk Rencana Strategi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum dari penyusunan rencana strategi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
- 2) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);.

- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 4) Berdasarkan PP No.105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (pasal 5 dan 6), maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu dan APBD disusun dengan pendekatan kinerja;
- 5) Peraturan Pemerintah No.108 tahun 2000 pasal 1 ayat (4) menyebutkan bahwa Renstra atau Dokumen Perencanaan Daerah adalah rencana lima tahunan yang menggambarkan visi, misi, strategi, program dan kegiatan daerah. Pasal 1 ayat (5) menyebutkan bahwa Pertanggung jawaban Akhir Tahu Anggaran adalah pertanggung jawaban Kepala Daerah kepada DPRD atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan tolok ukur Renstra. Renstra tersebut harus dibuat 1 (satu) bulan setelah Kepala Daerah dilantik;.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pada pasal 12 ayat (1) Kepala SKPD menyusun Rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan rancangan awal RPJMD; kemudian Rancangan Renstra-SKPD disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Bappeda.
- 7) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota.
- 8) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

- 9) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2005-2025;
- 10) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013-2018;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan adalah dalam rangka menyusun rencana pembangunan bidang kesehatan yang akan dibiayai oleh dana APBD Provinsi Sumatera Selatan (desentralisasi) dan merupakan indikator kinerja pertanggung jawaban Gubernur. Oleh sebab itu, mengingat kewenangan dan dana terbatas, maka perencanaan pembangunan tersebut harus disusun secara antisipatif, realistis dan dengan segmen yang jelas sehingga dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu untuk mewujudkan Visi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Sesuai dengan ketentuan dalam PP 108 tahun 2000 Pasal 4, Rencana Strategik atau Dokumen Perencanaan Daerah lainnya yang disahkan oleh DPRD dan Kepala Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra adalah Rencana Lima Tahunan yang menggambarkan visi, misi, strategi, program dan kegiatan daerah. Visi adalah gambaran keadaan yang dicita-citakan untuk berhasil, yang menjadi pengikat seluruh *stakeholders* atau unsur masyarakat Sumatera Selatan. Sebagai panduan dalam pola kegiatan untuk pencapaian visi maka perlu diformulasikan misi. Tujuan dan sasaran adalah pernyataan mengenai kinerja dan hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan strategi, program dan kegiatan daerah adalah penjabaran kegiatan yang dituangkan dalam APBD setiap tahun untuk mencapai tujuan, misi, dan visi yang telah ditetapkan.

Renstra mendeskripsikan secara mendalam dan menyeluruh tentang potensi dan kondisi Sumatera Selatan saat ini, meliputi lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) dan lingkungan eksternal (peluang dan ancaman). Potensi dan kondisi derajat kesehatan Sumatera Selatan saat ini ditelaah secara seksama dan mendalam melalui evaluasi, analisis, dan interpretasi (dengan analisis SWOT) agar dapat diidentifikasi masalah-masalah kritis (*critical issues*) yang dihadapi Provinsi Sumatera Selatan. Bertitik tolak dari hal ini maka perlu diupayakan dan dikembangkan alternatif penyelesaian yang memungkinkan untuk menyelesaikan krisis tersebut. Oleh sebab itu upaya merealisasikan Renstra Pembangunan Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, sudah seyogyanya menjadi tugas dan tanggung jawab sinergis antara sektor dan didukung dengan kerjasama sinergis antar daerah kabupaten/kota.

1.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan menengah (5 tahun) yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan APBD tahunan Provinsi Sumatera Selatan dalam kurun waktu tahun 2009 sampai dengan 2014. Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan merupakan penjabaran dari Renstra Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam bentuk kegiatan yang lebih spesifik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dengan demikian setiap dan semua kegiatan pembangunan diharapkan dapat terselenggara secara sinergis, terkoordinasi dengan baik merupakan bagian integral dari Renstra ini, dapat dilaksanakan dengan kemampuan dana yang tersedia, serta sesuai dengan kondisi dan situasi lapangan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan mengacu kepada PP nomor 8 tahun 2008, yaitu sebagai berikut :

Bab 1. Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab 2. Gambaran Pelayanan SKDP Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

- 2.1. Tugas, fungsi dan struktur organisasi
- 2.2. Susunan Kepegawaian dan Aset yang dikelola
 - 2.2.1. Susunan Kepegawaian
 - 2.2.2. Aset yang dikelola
- 2.3. Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran
 - 2.3.1. Jenis Pelayanan
 - 2.3.2. Kelompok Sasaran

Bab 3. Isu-isu Stragegis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

- 3.1. Gambaran Umum Daerah terkait dengan Pelayanan SKPD
- 3.2. Hasil-hasil yang dicapai selama tahun sebelumnya
- 3.3. Analisa isu-isu strategis berkaitan dengan tugas dan fungsi SKPD

Bab 4. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

- 4.1. Visi
- 4.2. Misi
- 4.3. Tujuan dan Sasaran
- 4.4. Strategi
- 4.5. Kebijakan

Bab 5. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

Bab 6. Indikator Kinerja SKPD Provinsi yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Selatan.

Bab 7. Penutup

Lampiran-Lampiran

1. Tabel 1 s.d 5
2. IKU/IKK

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1. Tugas Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

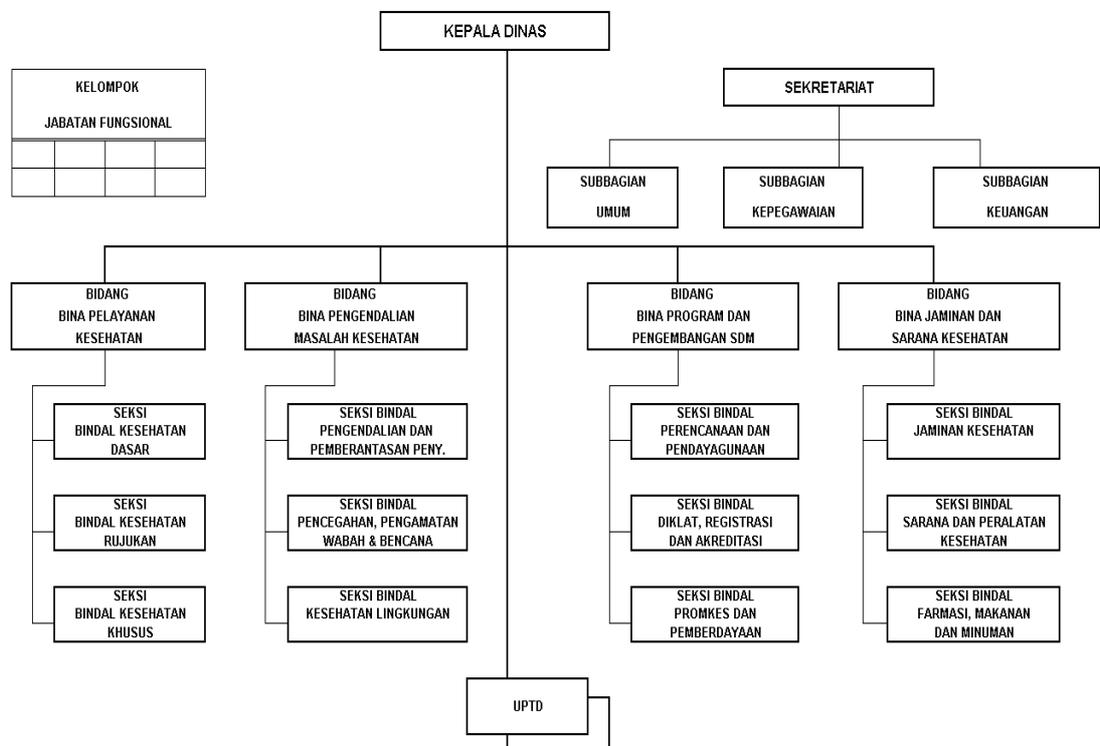
Sesuai dengan pasal 3 Peraturan Gubernur Nomor 43 tahun 2010, Fungsi Kepala Dinas Kesehatan adalah :

- 1) Penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang bina pelayanan kesehatan, bidang bina pengendalian masalah kesehatan, bidang bina program dan pengembangan SDM, bidang bina jaminan dan sarana kesehatan;
- 2) Penyelenggaraan pengkoordinasian dan fasilitasi pengendalian pengawasan bidang bina pelayanan kesehatan, bidang bina pengendalian masalah kesehatan, bidang bina program dan pengembangan SDM, bidang bina jaminan dan sarana kesehatan;
- 3) Penyelenggaraan pengkoordinasian pengawasan bidang bina pelayanan kesehatan, bidang bina pengendalian masalah kesehatan, bidang bina program dan pengembangan SDM, bidang bina jaminan dan sarana kesehatan;
- 4) Penyelenggaraan pengkoordinasian penegakan hukum bidang bina pelayanan kesehatan, bidang bina pengendalian masalah kesehatan, bidang bina program dan pengembangan SDM, bidang bina jaminan dan sarana kesehatan;
- 5) Penyelenggaraan penataan pembinaan dan pengkoordinasian Unit Pelaksana Teknis Daerah;

- 6) Pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga non pemerintah dan swasta dalam pengelolaan kesehatan, sesuai ketentuan yang berlaku;
- 7) Pemberian masukan yang perlu kepada Gubernur sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- 8) Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Gubernur sesuai stansar yang ditetapkan;
- 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 43 Tahun 2010, Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan seperti bagan dibawah ini :



2.2. Susunan Kepegawaian dan Aset yang Dikelola

2.2.1. Susunan Kepegawaian

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai pegawai sebanyak 303 orang. Jumlah pegawai berdasarkan pangkat / golongan, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1
Distribusi Pegawai Dinas Kesehatan Berdasarkan Pendidikan Dan Jenis Kelamin Tahun 2013

No.	Tingkat Pendidikan	Jenis Tenaga		Total
		Kesehatan	Non Kesehatan	
1.	Pasca Sarjana (S2)	14	11	25
2.	Sarjana (S1)	54	44	99
3.	D4	2	0	2
4.	D3	14	8	22
5.	D1/D2	1	0	1
6.	SMA	1	64	65
7.	SMP	0	3	3
8.	SD	0	4	4
	Total	86	135	221

Tabel 2
Distribusi Pegawai Dinas Kesehatan Berdasarkan Pangkat/Golongan Dan Jenis Kelamin Tahun 2013

No.	Pangkat / Golongan	Jumlah Pegawai		Jumlah
		Laki-Laki	Wanita	
1.	Golongan IV	3	9	12
2.	Golongan III	77	98	175
3.	Golongan II	16	15	31
4.	Golongan I	3	-	3
	Jumlah	99	121	221

Tabel 3
Distribusi Pegawai Dinas Kesehatan Berdasarkan Jenis Tenaga
Dan Jenis Kelamin Tahun 2013

No.	Jenis Tenaga	Jumlah Pegawai		Jumlah
		Laki-Laki	Wanita	
1.	Dokter Umum	2	6	8
2.	Dokter Gigi	0	1	1
3.	Apoteker	1	3	4
4.	Kesehatan Masyarakat	18	28	46
5.	Keperawatan	0	7	7
6.	Kebidanan	0	3	3
7.	Sanitarian (AKL / SPPH)	3	2	5
8.	Ahli Gizi	0	5	5
9.	Farmasi	0	4	4
10.	Analisis Kesehatan	0	0	0

2.2.2. Aset yang Dikelola

Dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sarana prasarana yang dimiliki Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan tahun 2008 adalah sebagai berikut :

No.	Nama / Jenis Aset	Jumlah	Keterangan
1.	Mobil Jabatan	1 unit	Ka.Dinkes
2.	Mobil OPS	23 unit	Bidang/Seksi
3.	Mobil OPS Bencana	6 unit	
4.	Mobil OPS Embarkasi Haji	1 unit	
5.	Mobil OPS GF Aids	1 unit	
6.	Mobil OPS NLR/Kusta	1 unit	
7.	Mobil Ambulance	10 unit	
8.	RSK Mata Masyarakat	1 Upt	
9.	RSK Paru-Paru	1 Upt	
10.	Bapelkes Prov.Sumsel	1 Upt	
11.	AKL Prov. Sumsel	1 Upt	
12.	BKOKM	1 Upt	
13.	Gudang Farmasi	1 Upt	

2.3. Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran

2.3.1. Jenis Pelayanan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 tahun 2006 tentang Sistem Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan bahwa Upaya kesehatan dikategorikan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu kesehatan perorangan, kesehatan masyarakat, dan kesehatan kewilayahan.

Upaya Kesehatan Perorangan diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat dan swasta, terdiri dari :

- 1) Pelayanan kesehatan perorangan tingkat pertama, dalam bentuk :
 - a) Puskesmas
 - b) Praktek Dokter Keluarga
 - c) Klinik Kesehatan Keluarga, yang dilayani oleh dokter keluarga, dokter gigi, bidan, perawat, laboratorium klinik dan apotek/rumah obat
- 2) Pelayanan kesehatan perorangan tingkat kedua, dalam bentuk :
 - a) Praktik dokter/dokter gigi spesialis
 - b) Klinik spesialis
 - c) Rumah Sakit Khusus Paru-Paru
 - d) Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat
 - e) Rumah Sakit Jiwa Daerah
 - f) Rumah Sakit Kelas C dan B Non-Pendidikan
 - g) Rumah Sakit Swasta yang setara dengan huruf f) di atas
- 3) Pelayanan kesehatan perorangan tingkat ketiga, dalam bentuk :
 - a) Praktik Dokter/Dokter Gigi Spesialis Konsultan
 - b) Klinik Spesialis Konsultan
 - c) Rumah Sakit Kelas B Pendidikan dan Kelas A
 - d) Rumah Sakit Khusus
 - e) Rumah Sakit Swasta yang setara dengan huruf c) di atas.

Upaya Kesehatan Masyarakat diselenggarakan dengan tujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Setiap penyelenggara pelayanan kesehatan masyarakat wajib memberikan pelayanan kesehatan secara profesional, meliputi :

- 1) Promosi Kesehatan
- 2) Pemeliharaan Kesehatan
- 3) Pemberantasan Penyakit Menular
- 4) Kesehatan Jiwa
- 5) Pengendalian Penyakit Tidak Menular
- 6) Penyehatan Lingkungan
- 7) Penyediaan Sanitasi Dasar
- 8) Perbaikan Gizi Masyarakat
- 9) Pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan
- 10) Pengamanan penggunaan zat aditif / tambahan makanan dan minuman
- 11) Pengamanan narkoba
- 12) Penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan

Bentuk-bentuk Upaya Kesehatan Masyarakat adalah :

- 1) Pelayanan Kesehatan Masyarakat Tingkat Pertama
 - a) Puskesmas merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat tingkat pertama, yang wajib sekurang-kurangnya melakukan 6 (enam) jenis pelayanan dasar, yaitu :
 - Promosi Kesehatan
 - Kesehatan Ibu dan Anak serta Keluarga Berencana
 - Perbaikan Gizi
 - Kesehatan Lingkungan
 - Pemberantasan Penyakit Menular
 - Pengobatan Dasar.

- b) Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM)
 - Pos Pelayanan Terpadu (posyandu)
 - Pos Bersalin Desa (polindes)
 - Pos Obat Desa
 - Pos Upaya Kesehatan Kerja
 - Dokter Kecil dan Upaya Kesehatan Sekolah
 - Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren)
 - Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)

- 2) Pelayanan Kesehatan Masyarakat Tingkat Kedua, yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan unit pelaksana teknis :
 - a) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular
 - b) Promosi Kesehatan
 - c) Pelayanan Kefarmasian
 - d) Kesehatan Lingkungan
 - e) Perbaikan Gizi
 - f) Kesehatan Ibu, anak dan keluarga berencana.

- 3) Pelayanan kesehatan masyarakat tingkat ketiga yaitu Dinas Kesehatan Provinsi yang didukung oleh berbagai pusat unggulan dan Kementerian Kesehatan.

Upaya Kesehatan Kewilayahan diselenggarakan dengan tujuan untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan dalam rangka mendukung tercapainya tujuan pembangunan berwawasan kesehatan. Penyelenggara Upaya Kesehatan Kewilayahan adalah pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dengan keterlibatan lintas sektor terkait secara terkoordinasi dan terpadu serta peran aktif masyarakat.

Bentuk-bentuk kegiatan upaya kesehatan kewilayahan adalah :

- 1) Penyusunan tata ruang wilayah
- 2) Pembangunan instalasi air bersih yang memenuhi syarat baku mutu
- 3) Pembangunan Sarana Pembuangan Air Limbah (SPAL) baik limbah padat /sampah atau cair.
- 4) Pembuatan Peraturan Pengendalian Lingkungan di tempat-tempat umum
- 5) Pembuatan Peraturan tentang analisis dampak kesehatan untuk setiap pembangunan / industri yang berpotensi merugikan kesehatan masyarakat
- 6) Penyediaan pangan yang cukup dan bergizi untuk masyarakat termasuk keluarga miskin
- 7) Penyediaan perumahan sehat dan advokasi teknis tentang pembuatan rumah yang memenuhi syarat kesehatan.
- 8) Menciptakan wilayah sehat (desa sehat, kecamatan sehat, kabupaten sehat, kota sehat, kawasan sehat).

2.3.2. Kelompok Sasaran

Sasaran Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dapat di kelompokkan menjadi beberapa kelompok sasaran yaitu :

- 1) Masyarakat atau penduduk berdasarkan kelompok umur
- 2) Tenaga Kesehatan
- 3) Fasilitas Kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, maupun sarana kesehatan lainnya.
- 4) Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

3.1. Gambaran Umum

3.1.1. Keadaan Penduduk

Penduduk Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2013 berjumlah 7.828.700 jiwa (BPS, Susenas 2013). Dengan komposisi 3.914.053 penduduk laki-laki dan 3.787.475 penduduk perempuan. Laju pertumbuhan penduduk Sumatera Selatan sebesar 1,45 persen pada tahun 2013 menurun jika dibandingkan tahun 2011 sebesar 1,48 persen.

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun, Luas Daerah, Rata-rata Penduduk Desa
Dan Kepadatan Penduduk per Km² Menurut Kabupaten /Kota
Di Sumatera Selatan
Tahun 2013

<i>Kabupaten / Kota</i>	<i>Jumlah Penduduk</i>	<i>Jumlah Desa/ Kelurahan</i>	<i>Luas Daerah (Km²)</i>	<i>Rata-rata Penduduk per KK</i>	<i>Kepadatan Penduduk Per Km²</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. OKU	340.000	157	2.772,56	4,11	122,04
02. OKI	764.900	327	17.058,32	3,81	44,14
03. Muara Enim	755.800	255	8.587,94	4,12	86,38
04. Lahat	384.600	376	4.076,06	4,00	93,32
05. Musirawas	551.500	199	12.134,57	3,74	44,78
06. Musi Banyuasin	592.400	240	14.477,00	3,85	40,57
07. Banyuasin	788.300	304	12.142,73	3,84	63,73
08. OKU Selatan	334.700	259	5.493,94	3,82	59,13
09. OKU Timur	634.700	309	3.410,15	3,67	184,40
10. Ogan Ilir	398.300	241	2.513,09	4,01	156,38
11. Empat Lawang	231.700	156	2.556,44	4,18	88,30
12. PALI	NA	NA	NA	NA	NA
13. Musi Rawas Utara	NA	NA	NA	NA	NA
14. Palembang	1.535.900	107	374,03	4,45	4019,69
15. Prabumulih	171.800	37	421,62	4,09	400,89
16. Pagar Alam	131.100	35	579,16	4,03	223,98
17. Lubuk Linggau	213.000	72	419,80	4,01	497,60
Jumlah	7.828.700	3.234	87.017,41	4,00	88,51

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan
Susenas 2013

Tingkat kepadatan penduduk provinsi Sumatera Selatan sekitar 89 orang per km². Dari 15 Kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi sebesar 4011 orang per km². Sedangkan kepadatan penduduk yang paling rendah adalah Kabupaten Musi Banyuasin yaitu 41 orang per km².

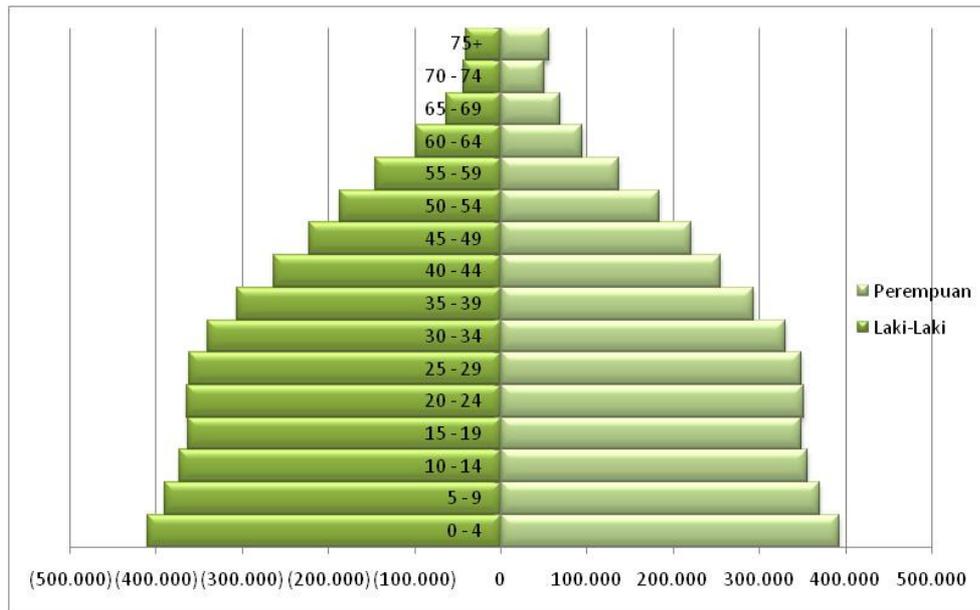
Penduduk menurut kelompok umur menunjukkan bahwa 29,65% penduduk Sumatera Selatan berusia muda (0-14 tahun), 63,92% berusia produktif (umur 15-59 tahun), dan hanya 6,43% yang berumur 60 tahun lebih, sehingga diperoleh angka ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk Sumatera Selatan sebesar 50,9 artinya, setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 51 orang penduduk usia tidak produktif.

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Hasil Susenas Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Selatan 2012– 2013

<i>Kelompok Umur</i>	2012			2013		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0 – 4	408.670	389.759	798.429	410.300	392.600	802.900
5 – 9	384.932	365.349	750.281	390.600	369.800	760.400
10 – 14	377.070	357.817	734.887	373.300	355.600	728.900
15 – 19	357.738	340.479	698.217	363.400	347.800	711.200
20 – 24	355.377	345.322	700.699	365.000	351.300	716.300
25 – 29	361.889	351.859	713.748	361.900	348.200	710.100
30 – 34	339.927	326.188	666.115	340.300	329.900	670.200
35 – 39	298.596	284.979	583.575	306.000	292.400	598.400
40 – 44	254.526	247.188	501.714	263.700	254.700	518.400
45 – 49	217.245	215.043	432.288	223.200	220.000	443.200
50 – 54	183.237	176.587	359.824	187.500	183.000	370.500
55 – 59	138.811	127.562	266.373	146.400	136.700	283.100
60 – 64	91.805	89.426	181.231	98.700	94.000	192.700
65 – 69	60.622	66.082	126.704	63.500	68.500	132.000
70 – 74	42.091	48.017	90.108	43.500	49.900	93.400
75+	41.517	55.818	97.335	41.400	55.600	97.000
Jumlah	3.914.053	3.787.475	7.701.528	3.978.700	3.850.000	7.828.700

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan
Susenas 2013

Gambar 3.1
Distribusi Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013



Struktur umur penduduk Sumatera Selatan berada pada tahap transisi antara penduduk muda menjadi penduduk tua. Hal ini karena proporsi penduduk mudanya (di bawah 15 tahun) saat ini sudah lebih rendah dari 40 persen, tetapi proporsi penduduk tuanya (usia 65+) menunjukkan peningkatan namun masih kurang dari 5 persen. Proporsi penduduk usia 65 tahun atau lebih tahun 1980 hanya 2,61 persen dan meningkat menjadi 3,11 persen pada tahun 2000 dan meningkat kembali menjadi 4,07 persen pada tahun 2010 dan 4,11 pada tahun 2013.

3.1.2. Letak Geografis dan Luas Wilayah

Provinsi Sumatera Selatan terletak antara 1° sampai 4° Lintang Selatan dan 102° sampai 106° Bujur Timur dengan luas wilayah 87.017 km². terdiri dari pegunungan dan pesisir pantai dan dilintasi oleh banyak sungai dan karenanya sering terjadi banjir. Sebagian besar lahan terdiri dari hutan

produksi, lahan pertanian, eksplorasi dan eksploitasi gas bumi dan bahan galian lainnya seperti minyak tanah dan batubara. Batas daerah ini adalah di sebelah Utara dengan Provinsi Jambi, di sebelah Selatan dengan Provinsi Lampung, di sebelah Timur dengan Provinsi Bangka Belitung, di Pantai Timur tanahnya terdiri dari rawa-rawa dan payau yang dipengaruhi oleh pasang surut. Vegetasinya berupa tumbuhan palmase dan kayurawa (bakau). Semakin ke barat merupakan dataran tinggi dan terdapat daerah Bukit Barisan.

3.1.3. Keadaan Pemerintahan

Sejak tahun 2006, kembali Provinsi Sumatera Selatan mengalami pemekaran daerah, dari 14 (empat belas) kabupaten / Kota menjadi 15 (lima belas) kabupaten/kota. Kabupaten yang mengalami pemekaran yaitu kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) menjadi Kabupaten OKU, OKU Selatan dan OKU Timur dan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menjadi Kabupaten OKI dan Kabupaten Ogan Ilir dan pada tahun 2007, kabupaten Lahat mengalami pemekaran lagi menjadi Kabupaten Lahat dan Kabupaten Empat Lawang, kemudian pada tahun 2013 ada 2 (dua) kabupaten yang mengalami pemekaran yaitu kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Musirawas. Dari kabupaten Muara Enim bertambah 1 (satu) kabupaten yaitu Kabupaten PALI, dari kabupaten Musirawas bertambah 1 (satu) kabupaten yaitu Kabupaten Muratara, sehingga sampai dengan tahun 2013 Provinsi Sumatera Selatan mempunyai 13 (tiga belas) kabupaten dan 4 (empat) kota.

3.1.4. Pendidikan

Sumber daya manusia akan sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan seseorang. Dari data Inkesra 2013 data pendidikan disajikan dalam data partisipasi bersekolah, tingkat pendidikan penduduk dan kemampuan membaca dan menulis.

Tabel 3.3
 Persentase Partisipasi Bersekolah, Tingkat Pendidikan Penduduk
 Dan Kemampuan Membaca dan Menulis
 Tahun 2013

	L	2013	
		P	Jumlah
- Partisipasi menurut kelompok Umur			
- 07 – 12 tahun	97,79	98,30	98,04
- 13 – 15 tahun	86,59	90,57	88,52
- 16 – 18 tahun	56,46	60,18	58,31
- Pendidikan Tertinggi yg ditamatkan			
- Tidak tamat SD	9,73	11,70	21,43
- SD / Sederajat	13,47	13,76	27,23
- SLTP / Sederajat	7,98	6,50	14,49
- SLTA / Sederajat	8,10	6,28	14,38
- - Diploma / Universitas	1,65	1,63	3,27
% Melek Huruf	98,37	95,40	96,90

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

*) Angka masih tergabung dengan kabupaten Induk.

Untuk melihat seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan yang ada dapat dilihat dari persentase penduduk yang masih bersekolah pada umur tertentu yang lebih dikenal dengan angka partisipasi sekolah (APS). APS Sumatera Selatan pada tahun 2013 umur 07 – 12 tahun mencapai 98,04 persen sedangkan APS Sumatera Selatan pada umur 16 – 18 tahun mencapai 58,31 persen. Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada perempuan lebih besar dari APS laki-laki.

Kemampuan baca tulis (melek huruf) merupakan keterampilan minimum yang dibutuhkan oleh penduduk untuk dapat menuju hidup sejahtera. Persentase melek huruf yaitu persentase penduduk 10 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya sebesar 96,90% dari seluruh penduduk usia 10 tahun keatas. Ini berarti bahwa tingkat penduduk yang buta huruf relatif kecil yaitu sebesar 3,1%.

Ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki merupakan indikator pokok kualitas pendidikan formal. Semakin tinggi ijazah/STTB yang dimiliki oleh rata-rata penduduk suatu Negara dapat mencerminkan taraf intelektualitas suatu

bangsa. Pada table 2.3. di atas terlihat bahwa penduduk Sumatera Selatan berumur 10 tahun ke atas yang tidak/belum memiliki ijazah sebesar 21,43 persen, tamat SD/MI sederajat sebesar 27,23 persen, SLTP/MTs sederajat sebesar 14,49 persen, SMU/MA sederajat sebesar 14,38 persen, Diploma sampai perguruan tinggi sebesar 3,27 persen.

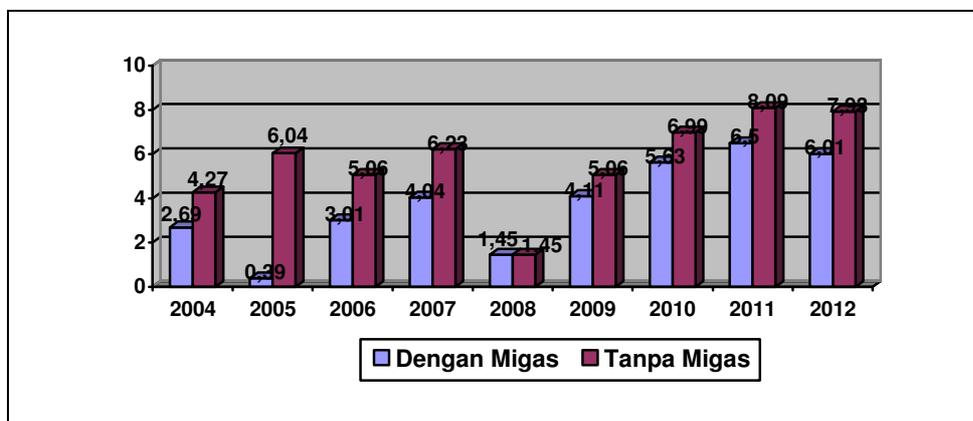
3.1.5. EKONOMI

Ukuran yang sering digunakan sebagai kemakmuran suatu daerah adalah pendapatan per kapita.

Di tahun 2013, pendapatan perkapita Sumatera Selatan atas dasar harga berlaku dengan migas dan tanpa migas meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 20,40 juta tahun 2011 menjadi Rp. 22,68 juta tahun 2012 (dengan migas), atau dari sebesar Rp. 15,03 juta menjadi Rp. 17,23 (tanpa migas). Sedangkan pendapatan perkapita atas dasar harga konstan dengan migas dan tanpa migas juga mengalami peningkatan. Nilainya naik dari Rp.7,54 juta pada tahun 2011 menjadi Rp.7,85 juta tahun 2012 dengan migas, sedangkan tanpa migas dari Rp.6,00 juta menjadi Rp.6,37 juta.

Perkembangan pendapatan perkapita di Sumatera Selatan dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 3.2.
Perkembangan Pendapatan Perkapita Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2004 – 2012



Sumber : BPS Sumatera Selatan, 2012

3.2. HASIL-HASIL YANG DICAPAI LIMA TAHUN SEBELUMNYA

Pengukuran keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti derajat kesehatan, Indikator Hasil Antara dan Indikator Proses dan Masukan.

Situasi Derajat Kesehatan tergambar dari Angka mortalitas, Angka morbiditas Angka Usia Harapan Hidup (UHH), dan Status Gizi Balita. Angka mortalitas meliputi Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita.

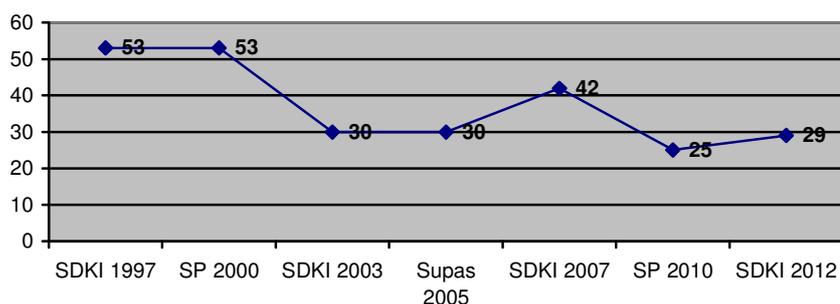
3.2.1. MORTALITAS

3.2.1.1. Angka Kematian Bayi (AKB)

Berdasarkan Sensus Penduduk (SP) 1990, estimasi AKB di Sumatera Selatan diperkirakan 71 per 1000 kelahiran hidup, sedangkan berdasarkan SP 2000, menurun menjadi 53 per 1000 kelahiran hidup, atau turun 25 persen selama 10 tahun atau rata-rata turun 2,5 persen per tahunnya. AKB di Sumatera Selatan terus mengalami penurunan hingga menurut hasil Supas tahun 2005 diperkirakan sebesar 30 per 1000 kelahiran. Namun demikian,

berdasarkan SDKI tahun 2007, AKB di Sumatera Selatan kembali mengalami kenaikan menjadi 42 per 1000 kelahiran hidup dan data terakhir berdasarkan SDKI tahun 2012, AKB di Sumatera Selatan mengalami penurunan menjadi sebesar 29 per 1000 kelahiran hidup.

Gambar 3.3.
Angka Kematian Bayi 1997 - 2012



3.2.1.2. Usia Harapan Hidup (UHH)

Penurunan AKB sangat berpengaruh pada kenaikan UHH waktu lahir. Angka kematian bayi sangat peka terhadap perubahan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga perbaikan derajat kesehatan tercermin pada penurunan AKB dan kenaikan UHH pada waktu lahir. Meningkatnya UHH ini secara tidak langsung juga memberi gambaran tentang adanya peningkatan kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat.

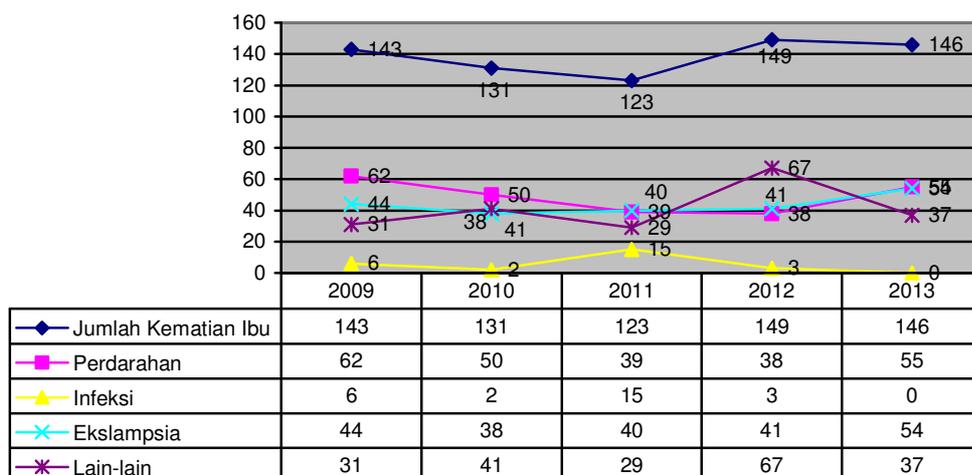
Berdasarkan hasil SP 2010, UHH Sumatera Selatan mengalami kenaikan dari 64,02 pada tahun 2000 menjadi 70,9 tahun pada tahun 2010. Sedangkan menurut Supas 2005 UHH penduduk Sumatera Selatan sebesar 69,5 tahun.

3.2.1.3. Angka Kematian Ibu (AKI)

AKI di Indonesia bila dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya masih jauh lebih tinggi. Di Indonesia dari lima juta kelahiran yang terjadi setiap tahunnya diperkirakan dua puluh ribu meninggal akibat komplikasi kehamilan atau persalinan. Risiko kematian ibu karena melahirkan di

Indonesia adalah 1 dari 65 ibu, dibandingkan dengan 1 dari 1.100 ibu di Thailand (Laporan UNDP). AKI pada tahun 2007 mencapai 228 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2007) meningkat menjadi 359 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2012 (SDKI 2012).

Berdasarkan hasil kajian lanjut terhadap SP2010 yang dilakukan oleh Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan tahun 2012, bahwa penyebab kematian ibu di Indonesia berupa komplikasi kandungan selama fase kehamilan, persalinan dan nifas (*direct cause*, ICD WHO) terutama di daerah Sumatera. Jika dilihat dari penyebab yang lebih spesifik lagi bahwa penyebab langsung dari kematian ibu adalah Hipertensi dalam Kehamilan (HDK) dan Perdarahan Post Partum (PPP). Kematian Ibu akibat HDK justru lebih banyak terjadi di rumah sakit pemerintah (RSUD) dan PPP lebih banyak terjadi RSIA, RSB, Puskesmas, Polindes, Dokter dan Bidan Praktek. Kematian ibu yang disebabkan HDK dan PPP ini sebenarnya dapat dicegah (*preventable death*) dengan menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai. Berdasarkan laporan rutin Program Kesehatan Ibu dan Anak dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, jumlah kematian ibu di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Pada gambar di atas terlihat bahwa jumlah kematian ibu di Provinsi Sumatera Selatan cenderung fluktuatif, dimana pada tahun 2009 dari 143 kasus menurun menjadi 131 kasus kemudian menurun lagi menjadi 123 kasus. Namun pada tahun 2012 terjadi peningkatan menjadi 149 kasus dan menurun lagi menjadi 146 kasus. Penyebab kematian ibu terbanyak adalah pendarahan dan hipertensi dalam kehamilan (ekslampsia).

3.2.2. MORBIDITAS

Situasi morbiditas di Provinsi Sumatera Selatan tergambar dari beberapa indikator yaitu :

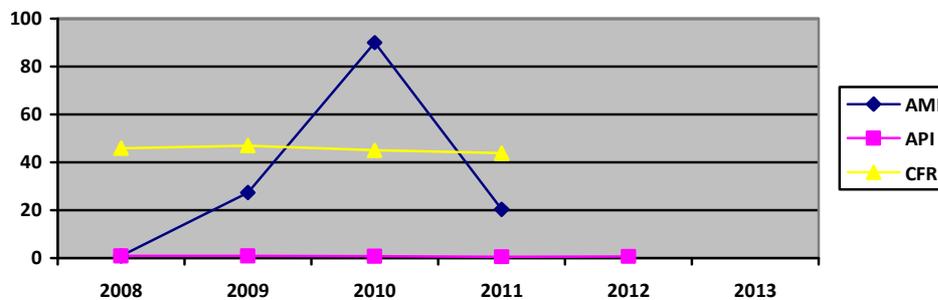
3.2.2.1. Angka Kesakitan Malaria per 1000 penduduk.

Angka kesakitan Malaria meliputi Cakupan Malaria Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan AMI (*Annual Malaria Incidence*) maupun API (*Annual Paracite Incidence*). Indikator AMI digunakan untuk mengetahui insiden malaria klinis di suatu daerah tertentu dalam satu tahun, sedangkan API digunakan untuk mengetahui insiden positif malaria dalam satu tahun. Sedangkan untuk mengetahui kematian akibat malaria digunakan indikator CFR (Case Fatality Rate) AMI, API serta CFR di Sumatera Selatan dari tahun 2008 – 2013 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Jumlah Kasus Malaria dan AMI Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2008 - 2012

No	Situasi Malaria	Tahun					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Jumlah Kasus (orang)	57.130	62.273	56.308	41.384	47.109	53.144
2.	AMI I (per 100.000 pddk)	8,14	12,49	11,75	8,3	9,76	6,85
3.	API (per 100.000 pddk)	0,96	0,91	0,79	0,54	0,62	0,46
4.	CFR	0	0	0	0	0	0

Gambar 3.4.
Angka Kesakitan Malaria



Angka kesakitan malaria atau AMI (Annual Malaria Incidence) dari tahun ketahun mengalami peningkatan, dikarenakan pencarian dan penemuan kasus malaria di Puskesmas dioptimalkan.²

3.2.2.2. Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA (+)

Penemuan kasus baru penderita TBC atau *Case Detection Rate* (CDR) Provinsi Sumatera Selatan sedikit mengalami peningkatan pada tahun 2008, dimana pada tahun 2007 CDR 45,12% menjadi 46,47% pada tahun 2008. Hal ini disebabkan karena peningkatan jumlah suspek yang ditemukan. Kab/Kota penyumbang CDR terbesar berturut-turut yaitu Kab. Banyuasin (62,34 %), Palembang (59,06), Kab OKU (57,22 %).

Untuk angka kesembuhan penyakit TB Paru yang merupakan indikator keberhasilan pemberantasan penyakit ini pada tahun 2006 adalah 84,2%, sedangkan untuk tahun 2007, belum dapat dikeluarkan angkanya karena *Cure Rate* (Angka Kesembuhan) baru dapat dihitung setelah 1 (satu) tahun kemudian.

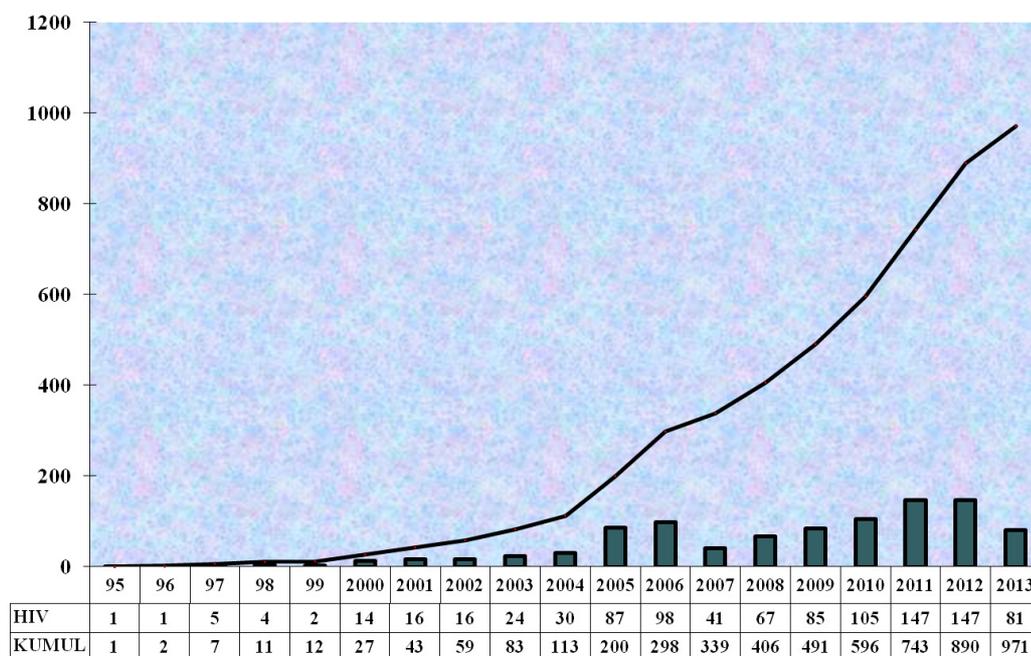
Angka kesembuhan penyakit TB Paru dari tahun 2003-2008 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.6
Case Detection Rate (CDR) dan Cure Rate (CR) TB Paru (BTA +)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2003 - 2008

No	TB Paru	Tahun					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	CDR	46,69	44,62	49,12	46,87	50,19	50,52
2.	Angka Kesembuhan(CR)	84,84	87,07	89,58	86,66	85,87	81,33

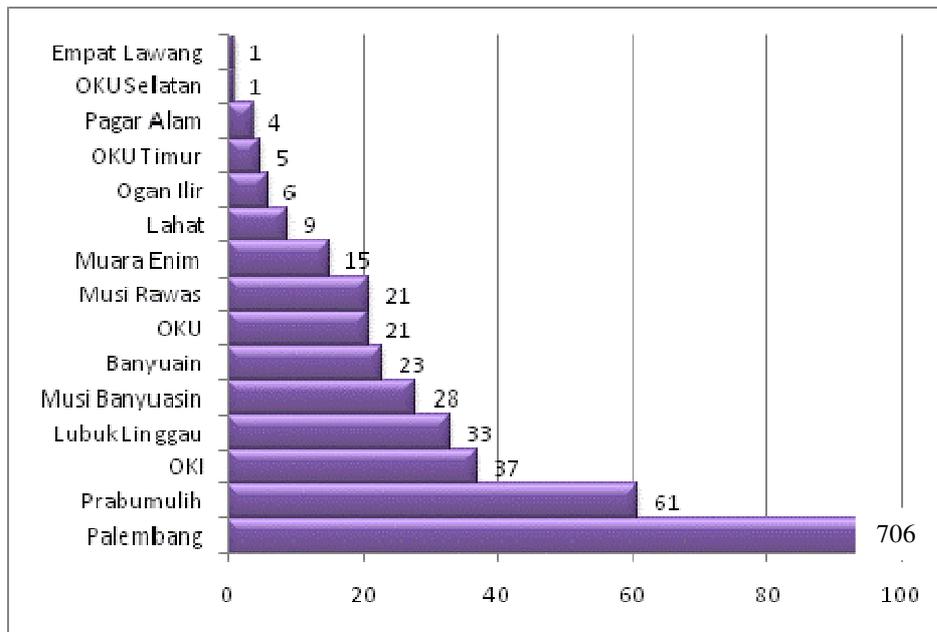
3.2.2.3. Prevalensi HIV/AIDS

Penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS) dan HIV/AIDS sampai saat ini masih menjadi salah satu masalah kesehatan di Provinsi Sumatera Selatan.



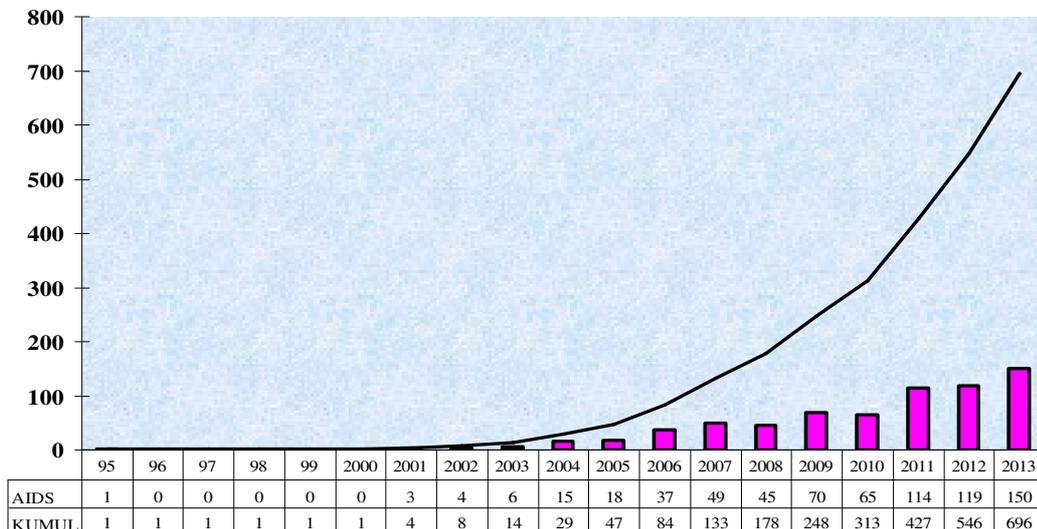
Hal ini dibuktikan dengan terus ditemukannya kasus dengan penyakit tersebut. Prevalensi Rate HIV/AIDS di Sumatera Selatan tahun 2007 adalah sebesar 0,66% dengan jumlah kasus 339 kasus.

Gambar 3.6.
Kumulatif Penyebaran HIV (+) di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan
Dari Tahun 1995 s/d September 2013.



Yang patut menjadi perhatian adalah penemuan AIDS telah menyebar di wilayah Kabupaten/Kota dan menyerang usia produktif bahkan kasus terbanyak adalah pada narapidana selain pekerja seksual, sehingga diharapkan perhatian dan dukungan pemerintah dalam menanggulangi sedini mungkin. Dari tahun ke tahun penemuan penderita AIDS semakin meningkat, dimana pada tahun 2007 terjadi peningkatan 32% dibandingkan tahun 2006. Cara penularan AIDS sejak tahun 1995 -2007 bervariasi, dan yang menjadi perhatian bahwa dari tahun ke tahun penularan dengan cara penasin/narkoba semakin meningkat dimana pada tahun 2007, 29 kasus (59,18 %) adalah melalui narkoba. Demikian juga penularan ibu ke anak harus diwaspadai dimana tahun 2007, 2 kasus (4,08%) ditemukan dengan cara penularan ibu ke anak.

Gambar 3.6.
Kumulatif Penyebaran AIDS di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan
Dari Tahun 1995 s/d Desember 2013



3.2.2.4. Angka "Acute Flaccid Faralysis" (AFP) pada Anak usia < 15 Tahun.

Penemuan Kasus AFP di Provinsi Sumatera Selatan selama tahun 2008 berjumlah 83 kasus. Hal ini menunjukkan peningkatan di banding tahun 2007 yang hanya 78 kasus. Target yang ditentukan oleh pusat adalah 46 kasus. Sedangkan target yang didistribusikan kepada Kabupaten/Kota berjumlah 48 kasus, karena adanya Kabupaten/Kota dengan populasi usia <15 tahun kurang dari 100.000, tetapi tetap ditargetkan satu kasus.

Tabel 3.7
Indikator Surveilans AFP Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2008 - 2013

No	Indikator	Tahun					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	<i>Jumlah Kasus AFP</i>	83	85	59	65	88	76
2.	<i>Non Polio AFP Rate</i>	3,86	4,05	2,68	2,95	3,83	3,17
3.	<i>Spesimen Adequat</i>	95	93	94,6	92,3	95,5	90,8

3.2.2.5. Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD)

Secara kumulatif incident rate (IR) penyakit Demam Berdarah Dengue di Propinsi Sumsel pada tahun 2008 (IR=40 per 100.000 penduduk) terlihat ada penurunan jika dibandingkan tahun 2007 (IR=48 per 100.000 pddk), sedangkan angka kematian (Case Fatality Rate) juga mengalami penurunan yaitu dari CFR = 0,37% tahun 2007 menjadi CFR = 0,1% tahun 2008.

Cakupan penemuan Penderita DBD Provinsi Sumatera Selatan :

Tabel 3.7
Insident Rate DBD dan Jumlah Kematian Akibat DBD
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2008 - 2013

No	Indikator	Tahun					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	<i>Incidence Rate</i>	40	26	16	27	43	19
2.	<i>Case Fatality Rate</i>	0.4	0.32	0.43	1.14	0.68	0.14

3.2.3. STATUS GIZI

Prevalensi gizi kurang dan gizi buruk terjadi penurunan dari 34,4% tahun 1999 menjadi 28% pada tahun 2005. Kemudian berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang dilakukan oleh Badan Litbangkes Depkes RI Tahun 2007, secara umum prevalensi gizi buruk di Kabupaten/kota Sumatera Selatan adalah 6,5% dan gizi kurang 11,7%. Prevalensi untuk gizi buruk dan kurang di kabupaten/kota Sumatera Selatan adalah 18,2%. Sedangkan pada tahun 2008 prevalensi gizi buruk menurun menjadi 1,12%. Bila dibandingkan dengan target pencapaian program perbaikan gizi (RPJM) tahun 2015 sebesar 20% dan target MDG untuk Indonesia sebesar 8,5%, maka di Provinsi Sumatera Selatan target tersebut telah terlampaui.

Persentase kecamatan bebas rawan gizi sebesar 79,31%, masih dibawah target sebesar 80%.

3.2.3. KEADAAN LINGKUNGAN

Cakupan penduduk yang menggunakan Sarana Air Bersih di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2008 mencapai 62,48% meningkatkan bila dibandingkan dengan data cakupan tahun 2007 yaitu 57,16 %. Cakupan penduduk yang menempati Rumah Sehat pada tahun 2007 adalah 58,61% dan meningkat sedikit menjadi 59% pada tahun 2008. Jumlah Penduduk Yang Menggunakan Jamban Memenuhi Syarat di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 adalah 56,8%.

3.2.4. PERILAKU HIDUP SEHAT

Persentase Rumah Tangga PHBS untuk Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2005 sebesar 14,27%, tahun 2006 mencapai 33,13% dan tahun 2007 sebesar 33,84%, angka ini lebih rendah dari target Sumatera Selatan Sehat 2008 sebesar 44%.

Dari berbagai pembinaan akhirnya terbentuk Desa Siaga Percontohan tahun 2007 di 14 Kabupaten/Kota sebanyak 119 Desa.

Tahun 2007 juga telah dikembangkan adanya Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) dan Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren) dengan pembangunan 100 unit Poskesdes dan pemberian alat medis maupun non medis.

Perkembangan posyandu di Sumatera Selatan dari tahun 2003 berjumlah 6.298 posyandu, tahun 2004 berjumlah 6.201 posyandu, tahun 2005 berjumlah 6.349 posyandu, tahun 2006 berjumlah 5.786 posyandu dan pada tahun 2007 berjumlah 6.231 posyandu. Untuk Tahun 2007, jumlah posyandu Purnama Mandiri adalah 1.554 posyandu dari total jumlah posyandu (24,9%). Untuk kader posyandu di tahun 2007 terdapat peningkatan jumlah kader aktif sebesar 70,06% meskipun jumlah kader posyandu menurun menjadi 32.980 kader sedangkan di tahun 2006 sebanyak 40.720 kader.

Upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat semakin beragam dengan adanya Saka Bhakti Husada (SBH) yang pada tahun 2007 terdapat 71 SBH yang dibina. Kemudian untuk perkembangan Tanaman Obat Keluarga (TOGA) dan Pos Obat Desa (POD) semakin meningkat dari tahun 2006 ditandai dengan bertambahnya TOGA dan POD menjadi 943 TOGA dan 1464 POD.

Upaya revitalisasi Posyandu terus dilakukan dengan fasilitasi petugas Kabupaten/Kota, penyegaran/pelatihan kader posyandu melalui jamboree kader dan terus meningkatkan peran serta sector informal dan lebih mendorong peran dari pemerintah Kabupaten/Kota dengan menata kelembagaan posyandu di semua tingkatan dengan menerbitkan SK Bupati/Walikota.

Di tahun 2007 ini juga dikembangkan konsep pengembangan Polindes ke Poliklinik Kesehatan Desa (Poskesdes) dengan tujuan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sebagai wujud pemerataan pelayanan kesehatan dan upaya mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat, dimana unsure poskesdes adalah adanya tenaga pengelola (bidan/perawat + masyarakat) yang dilengkapi sarana prasarana, obat-obatan dan dana dengan partisipasi penuh dari masyarakat sekitar poskesdes tersebut. Program ini merupakan salah satu program prioritas gubernur Sumatera Selatan melalui rehabilitasi fisik dan pembangunan gedung baru poskesdes. Tahun 2007 telah dibangun 100 unit poskesdes melalui anggaran APBD Provinsi Sumatera Selatan dan 93 unit melalui anggaran APBD Kabupaten/Kota. Karena poskesdes merupakan asset desa maka dibutuhkan keberlanjutan jalannya poskesdes tersebut.

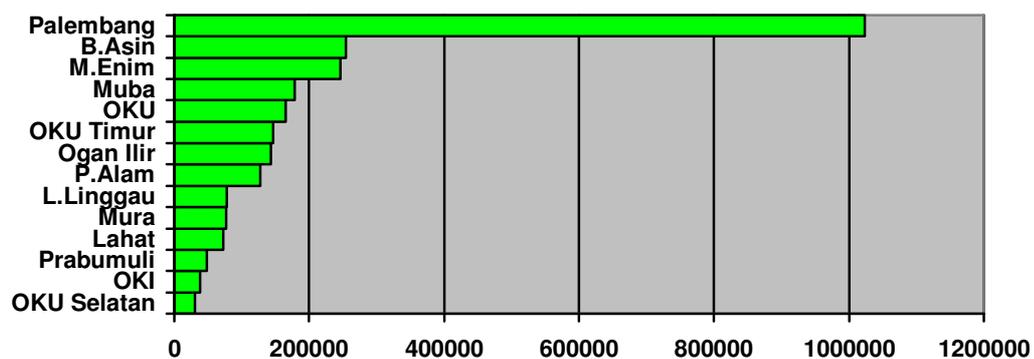
3.2.5. AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN

3.2.5.1. Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Puskesmas

Upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat dilakukan secara rawat jalan bagi masyarakat yang mendapat gangguan kesehatan ringan dan

pelayanan rawat inap baik secara langsung maupun melalui rujukan pasien bagi masyarakat yang mendapatkan gangguan kesehatan sedang hingga berat. Sebagian besar sarana pelayanan Puskesmas dipersiapkan untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi kunjungan rawat jalan sedangkan RS yang dilengkapi berbagai fasilitas di samping memberikan pelayanan pada kasus rujukan untuk rawat inap juga melayani untuk kunjungan rawat jalan.

Gambar 3.2
Jumlah Kunjungan Rawat Jalan menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2007



3.2.5.2. Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Rumah Sakit

Beberapa indikator standar terkait dengan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit yang dipantau antara lain pemanfaatan tempat tidur (BOR), rata-rata lama hari perawatan (LOS), rata-rata tempat tidur dipakai (BTO), rata-rata selang waktu pemakaian tempat tidur (BTO), persentase pasien keluar yang meninggal (GDR) dan persentase pasien keluar yang meninggal , < 24 jam perawatan (NDR).

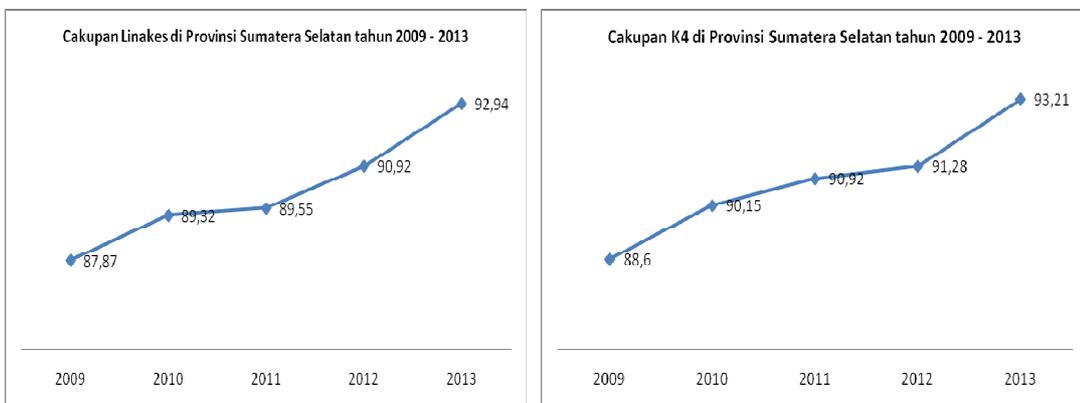
3.2.5.3. Persentase Obat Generik Berlogo dalam Persediaan Obat

Ketersediaan obat di Kabupaten/Kota rata-rata 93% sedangkan penggunaan obat generik berlogo di sarana kesehatan pemerintah adalah mencapai 98%.

3.2.6. PELAYANAN KESEHATAN

3.2.6.1. Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan

Komplikasi dan kematian ibu maternal dan bayi baru lahir sebagian besar terjadi pada masa di sekitar persalinan, hal ini antara lain disebabkan



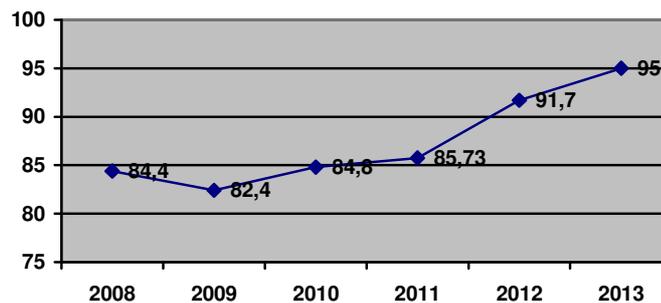
pertolongan tidak dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi kebidanan (profesional). Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di Provinsi Sumatera Selatan meningkat sekitar 6%, yaitu dari 87,87% pada tahun 2009 menjadi 92,94% pada tahun 2013. Cakupan Pelayanan terhadap ibu hamil sesuai standar minimal empat kali selama kehamilan di Provinsi Sumatera Selatan selama lima tahun terakhir juga mengalami peningkatan sebesar 5%, yaitu dari 88,6% menjadi 93,21%.

3.2.6.2. Cakupan Desa yang Mencapai UCI

UCI Desa merupakan indikator penting dalam program imunisasi. Target UCI tahun 2013 adalah > 90 %, artinya target UCI tercapai bila minimal 90 % desa telah memenuhi target imunisasi campak sebagai

imunisasi rutin terakhir. Cakupan UCI Desa Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013 sebesar 95% meningkat dibandingkan tahun 2012 sebesar 91,7%.

Gambar 3.2
Persentase Desa yang Mencapai UCI
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2008 - 2013



Walaupun kecenderungannya meningkat, namun hal ini memerlukan perhatian yang serius bagi Kabupaten/Kota yang belum mencapai target, karena UCI merupakan salah satu Indikator penting pencapaian Kabupaten/Kota Sehat. Hal ini juga menjadikan Kabupaten/Kota yang belum UCI tersebut menjadi daerah resiko tinggi penularan PD3I, dan harus diwaspadai kemungkinan sewaktu-waktu terjadinya KLB, akibat banyaknya anak yang tidak diimunisasi lengkap sehingga tidak kebal terhadap PD3I.

3.2.6.3. Cakupan Desa KLB yang Ditangani < 24 jam

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI (Kepmenkes) nomor 1091/2004 tentang SPM-KLB, maka ditetapkan bahwa setiap terjadi KLB harus ditangani dan ditanggulangi dalam waktu kurang dari 24 jam. Pada tahun 2008 ditargetkan minimal 95 % desa/kelurahan sudah dilaksanakan penanggulangan KLB dalam waktu kurang dari 24 jam.

Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit menular dan keracunan pada tahun 2008 terjadi 35 kali KLB. Korban yang menderita sebanyak 799 orang, dan 9 orang diantaranya meninggal dunia (CFR 1,13%).

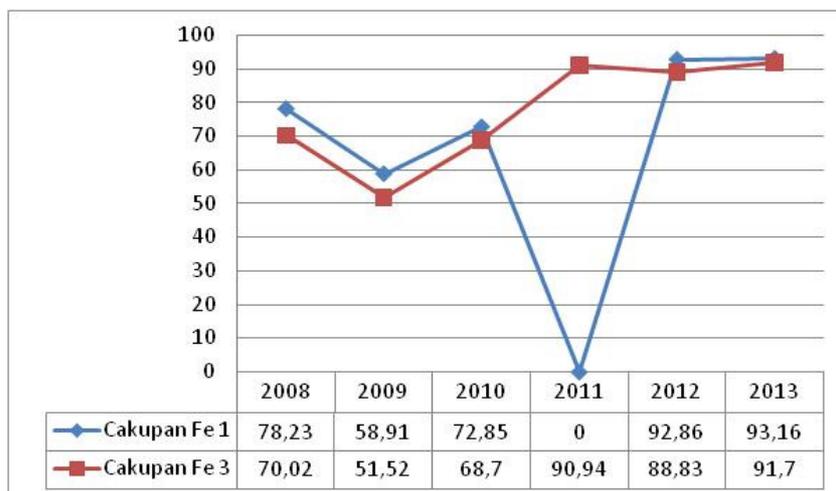
Tabel 3.8
Jumlah KLB, Penderita KLB dan Meninggal karena KLB
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2003 - 2008

No.	Jenis KLB	Tahun					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Frekuensi	34	63	42	30	27	23
2.	Penderita	817	7828	1172	649	822	659
3.	Meninggal	28	0	4	5	15	6
4.	CFR	3,43	0	0,34	0,77	1,8	0,91

3.2.6.4. Cakupan Ibu Hamil yang Mendapat Tablet Fe

Cakupan ibu hamil yang mendapat tablet Fe dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 cenderung meningkat, yaitu dari 70,02% pada tahun 2008 menjadi 91,7% pada tahun 2013. Pemberian tablet Fe pada hamil bertujuan untuk mencegah

Tabel 3.8
Persentase Ibu Hamil yang mendapat Tablet Fe
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2008 - 2013



3.2.6.5. Cakupan Bayi yang Mendapat ASI Eksklusif

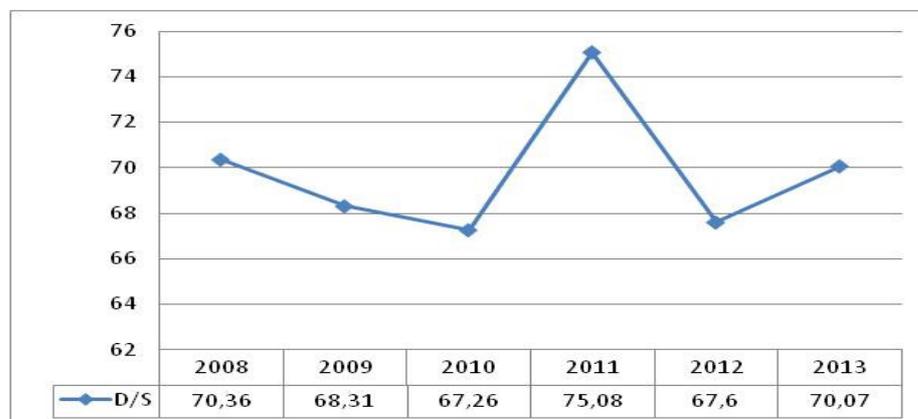
Cakupan bayi yang mendapatkan asi eksklusif di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 cenderung mengalami peningkatan, yaitu dari 56,63% pada tahun 2008 meningkat menjadi 63,77% pada tahun 2013.

Tabel 3.8
Persentase Bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2008 - 2013



3.2.6.6. Cakupan Balita ditimbang setiap bulan (D/S)

Tabel 3.8
Persentase Balita yang ditimbang setiap bulan
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2008 - 2013



Cakupan balita yang ditimbang setiap bulannya (D/S) dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 terlihat fluktuatif, yaitu 70,36% pada tahun 2008 menurun menjadi 67,26% pada tahun 2010, kemudian meningkat cukup tajam sebesar 75,08% pada tahun 2011, namun kemudian menurun lagi pada tahun 2012 sebesar 67,6% dan meningkat lagi menjadi 70,07% pada tahun 2013.

3.2.6.7. Cakupan Keluarga Miskin yang Mendapat Pelayanan Kesehatan.

Dalam rangka memenuhi hak masyarakat miskin sebagaimana diamanatkan, Departemen Kesehatan menetapkan kebijakan untuk lebih memfokuskan pelayanan kesehatan pada masyarakat miskin. Melalui Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dengan bekerjasama dengan PT. ASKES telah membayarkan premi asuransi kesehatan masyarakat miskin (ASKESKIN) sebesar Rp. 8.000,- per jiwa per bulan. Untuk tahun 2007 jumlah masyarakat miskin yang dijamin adalah 70.000 jiwa dengan sistem berobat ke dokter keluarga. Kegiatan ini akan terus berlanjut di tahun 2008.

Selain itu melalui dana APBD juga telah dilakukan sosialisasi tentang program pelayanan kesehatan masyarakat miskin baik lintas program maupun dengan lintas sektor.

Quota masyarakat miskin untuk Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2006 berdasarkan SK Menkes berjumlah 1.920.001 jiwa, dan sedikit berbeda dengan quota masyarakat miskin berdasarkan SK Bupati/Walikota sebesar 1.937.874 jiwa. Berdasarkan laporan dari PT.Askes Regional III, realisasi pelayanan kesehatan pada masyarakat miskin tahun 2006, sebagai berikut :

- a. Realisasi pelayanan Rawat Inap Tingkat Lanjut (RITL) di rumah sakit sebesar 43.171 kasus, jumlah hari rawat 333.289 hari;
- b. Realisasi pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjut (RJTL) di rumah Sakit sebesar 258.046 kasus;

- c. Realisasi pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) di Puskesmas sebesar 1.190 kasus, hari rawat 3.351 hari.

3.2.7. SUMBER DAYA KESEHATAN

3.2.7.1. Rasio Tenaga Kesehatan terhadap Penduduk

Indikator ketersediaan tenaga kesehatan dapat dilihat dari rasio setiap jenis tenaga kesehatan per 100.000 penduduk. Berdasarkan jumlah penduduk Provinsi Sumatera Selatan tahun 2007 sebanyak 7.019.964 jiwa, maka didapatkan rasio masing-masing jenis tenaga kesehatan dan kebutuhan masing-masing jenis tenaga kesehatan. Pada tabel 5.4 disajikan Rasio Tenaga Kesehatan Menurut Jenis per 100.000 penduduk termasuk jumlah kebutuhannya.

Tabel 3.9
Rasio Tenaga Kesehatan Menurut Jenis Per 100.000 Penduduk
Di Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2007

No	Jenis Tenaga	Jumlah	Rasio	Target	Kebutuhan
1.	Dokter Spesialis	82	1,17	6	339
2.	Dokter Umum	405	5,77	40	2.403
3.	Dokter Gigi	106	1,51	11	666
4.	Dokter Keluarga	28			
5.	Perawat	2.331	33,21	117,5	5919
6.	Bidan	2.438	34,73	100	4.582
7.	Ahli Gizi	235	3,35	22	1.310
8.	Sanitarian	358	5,10	40	2.450
9.	SKM	308	4,39	40	2.500
10.	Apoteker	140	1,19	10	562

Pada tabel di atas terlihat bahwa rasio dokter umum pada tahun 2007 baru mencapai 5,77 per 100.000 penduduk, sama dengan 1 orang dokter melayani 17.333 penduduk, masih dibawah target Indonesia Sehat 2010 sebesar 40 per 100.000 penduduk atau 1 per 2.500 penduduk. Artinya untuk saat ini Provinsi Sumatera Selatan masih membutuhkan 2.403 orang dokter umum.

Demikian juga dengan tenaga Bidan, baru mencapai 34,37 per 100.000 penduduk, sama dengan 1 orang Bidan melayani 2.879 penduduk, masih dibawah target Indonesia Sehat 2010 sebesar 100 per 100.000 penduduk atau 1 Bidan per 1.000 penduduk. Artinya untuk saat ini Provinsi Sumatera Selatan masih membutuhkan 4.582 orang Bidan.

Rasio Perawat, baru mencapai 33,21 per 100.000 penduduk, sama dengan 1 orang Perawat melayani 3.012 penduduk, masih dibawah target Indonesia Sehat 2010 sebesar 117,5 per 100.000 penduduk atau 1 Perawat per 851 penduduk. Artinya untuk saat ini Provinsi Sumatera Selatan masih membutuhkan 5.919 orang Perawat.

Rasio Ahli Gizi, baru mencapai 3,35 per 100.000 penduduk, sama dengan 1 orang Ahli Gizi melayani 29.872 penduduk, masih dibawah target Indonesia Sehat 2010 sebesar 22 per 100.000 penduduk atau 1 Ahli Gizi per 4.544 penduduk. Artinya untuk saat ini Provinsi Sumatera Selatan masih membutuhkan 1.310 orang Ahli Gizi.

Rasio Sanitarian, baru mencapai 5,10 per 100.000 penduduk, sama dengan 1 orang Sanitarian melayani 19.609 penduduk, masih dibawah target Indonesia Sehat 2010 sebesar 40 per 100.000 penduduk atau 1 Sanitarian per 2.500 penduduk. Artinya untuk saat ini Provinsi Sumatera Selatan masih membutuhkan 2.450 orang Sanitarian.

Rasio SKM, baru mencapai 4,39 per 100.000 penduduk, sama dengan 1 orang SKM melayani 22.792 penduduk, masih dibawah target Indonesia Sehat 2010 sebesar 40 per 100.000 penduduk atau 1 Sanitarian per 2.500 penduduk. Artinya untuk saat ini Provinsi Sumatera Selatan masih membutuhkan 2.500 orang SKM.

3.2.7.2. Fasilitas Sarana Kesehatan

Dalam rangka mendukung upaya kesehatan kepada masyarakat, baik pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan atau upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan perorangan (UKP), salah satu factor

yang menentukan adalah ketersediaan fasilitas sarana kesehatan seperti puskesmas dan jaringannya serta rumah sakit sesuai standar.

Kondisi puskesmas sampai dengan tahun 2013 di Provinsi Sumatera Selatan menurut kabupaten/kota dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 3.10
Jumlah Puskesmas, Pustu dan Jaringannya, Polindes, Poskesdes
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2013

No	Kabupaten/Kota	Puskesmas			Pustu	Pusling Roda 4
		P	NP	Total		
1.	Ogan Komering Ulu	6	10	16	44	16
2.	Ogan Komering Ilir	14	15	29	88	26
3.	Muara Enim	7	12	19	97	17
4	Lahat	7	25	32	64	34
5	Musirawas	8	11	19	99	32
6	Musi Banyuasin	7	19	26	117	8
7	Banyuasin	13	18	31	104	10
8	OKU Selatan	9	10	19	38	16
9	OKU Timur	12	10	22	53	21
10	Ogan Ilir	8	17	25	19	17
11	Empat Lawang	4	5	9	26	0
12	Penulak Abab Lematang Ilir	1	6	7	18	4
13	Musirawas Utara	4	4	8	48	8
14	Palembang	9	30	39	70	29
15	Prabumulih	3	5	8	22	8
16	Pagar Alam	3	4	7	18	9
17	Lubuk Linggau	3	6	9	21	10
	Sumatera Selatan	116	203	319	952	26

Fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sampai dengan tahun 2013 dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 3.11
Jumlah Rumah Sakit Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2013

No	Kabupaten/Kota	Kepemilikan Rumah Sakit				
		Pusat	Daerah	TNI	Polri	Swasta
1.	Ogan Komering Ulu	0	1	1	0	1
2.	Ogan Komering Ilir	0	1	0	0	0
3.	Muara Enim	0	1	0	0	0
4	Lahat	0	1	1	0	0
5	Musirawas	0	2	0	0	0
6	Musi Banyuasin	0	3	0	0	0
7	Banyuasin	1	1	0	0	0
8	OKU Selatan	0	1	0	0	0
9	OKU Timur	0	2	0	0	0
10	Ogan Ilir	0	1	0	0	0
11	Empat Lawang	0	1	0	0	0
12	Penukal Abab Lematang Ilir	0	1	0	0	0
13	Musirawas Utara	0	1	0	0	0
14	Palembang	1	5	1	1	10
15	Prabumulih	0	1	0	0	1
16	Pagar Alam	0	1	0	0	0
17	Lubuk Linggau	0	1	0	0	0
	Sumatera Selatan	2	25	3	1	12

Kinerja Rumah Sakit dapat dilihat salah satunya dari besarnya Bed Occupation Rate (BOR) atau penggunaan tempat tidur. Untuk Sumatera Selatan BOR rata-rata RSUD Kabupaten/Kota pada tahun 2013 adalah sebesar%.

Dalam upaya untuk meningkatkan dan menjaga mutu pelayanan di rumah sakit, salah satu kegiatan yang sangat penting adalah akreditasi rumah sakit. Sampai dengan tahun 2007, rumah sakit yang terakreditasi dengan kategori 5 pelayanan berjumlah 16 rumah sakit baik pemerintah maupun swasta, sementara rumah sakit yang terakreditasi dengan kategori 12 pelayanan berjumlah 3 rumah sakit yaitu RSMH, RSUD Palembang BARI dan RS RK.Charitas. Sejak tahun 2013, Akreditasi rumah sakit sudah menerapkan

3.2.7.3. Pembiayaan Kesehatan

Alokasi dana untuk Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan khususnya untuk belanja langsung dari tahun 2008 – 2013 cenderung

fluktuatif. Pada tahun 2008, belanja langsung sebesar 3,6% dari total APBD, kemudian meningkat menjadi 10,8% pada tahun 2009 dan meningkat lagi pada tahun 2011 menjadi 11,3%. Hal ini disebabkan karena komitmen Gubernur terpilih periode 2008 – 2013 untuk merealisasikan program Jaminan Sosial Kesehatan Semesta (*total coverage*) bagi seluruh masyarakat Sumatera Selatan. Namun pada tahun 2011 alokasi belanja langsung Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan mengalami penurunan menjadi 6,79% dari total APBD, hal ini disebabkan adanya kebijakan pembiayaan Jamsoskes Semesta dialihkan ke Biro Keuangan yang berubah menjadi BPKAD. Dan Alokasi Belanja Langsung Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan terus mengalami penurunan menjadi 3,5% pada tahun 2012 dan 1,7% pada tahun 2013.

Dukungan Anggaran terhadap pembangunan kesehatan di Provinsi Selatan melalui APBD I masih dibawah < 5% dan persentase ini masih jauh dibawah persentase yang diharapkan yaitu sebesar 15%. Dari tahun 2002 sampai dengan 2008 jumlah anggaran kesehatan melalui APBD I dan persentase anggaran dari total APBD I, dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini :

Tahun	Total APBD I	Alokasi Sektor Kesehatan Provinsi	%
2008	Rp. 2.718.469.708.751,-	Rp. 89.933.197.600	3,3
2009		Rp. 319.208.105.263	
2010	Rp. 3.482.536.936.189,-	Rp. 393.826.000.000	
2011	Rp. 3.553.600.000.000,-	Rp. 241.504.015.950	
2012	Rp. 5.500.000.000.000,-	Rp. 179.294.236.000	
2013	Rp. 2.221.526.149.000,-	Rp. 100.301.550.000	
2014	Rp.	Rp. 152.000.000.000	

3.3. ANALISA ISU-ISU STRATEGIS BERKAITAN DENGAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN

3.3.1. Kekuatan/Potensi

Beberapa kekuatan/potensi yang mendukung dalam merealisasikan visi dan misi pembangunan kesehatan dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan dukungan Anggaran mencapai 15% sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Kesehatan No.36 tahun 2009..
- 2) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan secara kuantitas telah memiliki tenaga kesehatan yang cukup memadai;
- 3) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan memiliki Sumber daya sarana dan prasarana kesehatan yang telah memadai dan ada upaya yang terus menerus untuk memberikan pemerataan sarana dan prasarana kesehatan di seluruh kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan.
- 4) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan telah memiliki Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 2 tahun 2004 tentang Sistem Kesehatan Provinsi (SKP).

3.3.2. Kelemahan

Disamping memiliki beberapa kekuatan, Dinas Kesehatan juga menyadari bahwa masih terdapat kelemahan-kelemahan yang harus terus diupayakan untuk memperbaiki faktor kelemahan tersebut. Adapun kelemahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Kesehatan dari segi kuantitas maupun kualitas masih perlu ditingkatkan terus. Perlu adanya analisa SDM yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki yang akan menduduki struktur baru Dinas yang sesuai dengan PP No. 38/2007, PP No. 41/2007 dan Kepmenkes No. 267/2008

- 2) Sistem Manajemen Database masih lemah, sehingga informasi tentang pencapaian hasil pembangunan kesehatan masih sulit didapatkan, sehingga kesulitan dalam menetapkan pencapaian indikator kesehatan.

3.3.3. Peluang

Dari perkembangan lingkungan strategi diatas dapat diantisipasi beberapa peluang antara lain :

3.3.3.1. Aspek Demografi

Jumlah penduduk yang besar kalau disertai dengan keberhasilan peningkatan serajat kesehatannya akan menjadikan penduduk Sumatera Selatan sebagai kekuatan dahsyat dan aset pembangunan nasional. Ini akan berdampak positif terhadap pembangunan

3.3.3.2. Aspek Sumber Kekayaan Alam

Potensi kekayaan alam yang cukup besar dan beraneka ragam dengan pengelolaan secara terencana, terarah, terpadu dan berorientasi kelestarian lingkungan dengan mempertimbangkan ekosistem akan menjadi modal dasar pembangunan daerah sekaligus memberi dampak terhadap peningkatan status kesehatan masyarakat Sumatera Selatan

3.3.3.3. Aspek Idiologi dan Politik

Komitmen terhadap pengakuan dan penegakan HAM, demokratisasi dan good governance harus diaplikasikan dalam pembangunan nasional, termasuk dalam kesungguhan dalam perlindungan kesejahteraan ibu dan anak, pemberantasan Narkoba, AIDS dan penyakit menular lainnya.

Di era desentralisasi dan otonomi daerah akan membantu mempercepat pemberdayaan pemerintah daerah dan masyarakat dalam melaksanakan secara aktif pembangunan kesehatan.

Dukungan dari pemerintahan Provinsi dan pemerintahan Kabupaten dan kota menunjang pembangunan kesehatan dengan menyediakan dana pembangunan untuk kesehatan 15% dari dana pembangunan.

Dukungan dari Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai tehcnical Assistance pembangunan kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

3.3.3.4. Aspek Ekonomi

Krisis ekonomi yang mulai membaik akan memberikan peluang bagi kita untuk melakukan reorientasi dan perubahan pada berbagai aspek kebijaksanaan pembangunan kesehatan yang telah dilaksanakan

3.3.3.5. Aspek Hankam

Kondisi ketertiban dan keamanan yang masih terkendali memberi peluang masih terlaksananya upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara bermutu dan merata.

3.3.4. Tantangan

2.3.4.1. Pada Aspek Geografi

Luasnya daerah dan adanya kepulauan yang membutuhkan sumber daya kesehatan yang cukup besar dan upaya pemerataan pelayanan kesehatan. Resikonya ialah tidak terwujudnya rasa keadilan dan kesempatan mendapatkan pelayanan kesehatan bagi setiap penduduk.

2.3.4.2. Pada Aspek Demografi

Jumlah penduduk yang cukup besar, angka pertumbuhan dan kelahiran penduduk yang masih cukup tinggi, angka kesakitan dan kematian yang masih tinggi, struktur penduduk yang belum ideal membutuhkan pembangunan kesehatan yang komprehensif serta didukung oleh sumber daya yang optimal.

Resikonya ialah tidak terwujudnya derajat kesehatan penduduk yang optimal sebagai syarat terwujudnya mutu masyarakat dan kesejahteraan rakyat.

2.3.4.3. Pada Aspek Sumber Kekayaan Alam

Isu lingkungan hidup merupakan komitmen global harus menjiwai upaya pembangunan nasional resikonya ialah rusaknya lingkungan hidup dan dikucilkannya Indonesia dari pergaulan dunia.

2.3.4.4. Pada Aspek Sosekbud (social, ekonomi dan budaya)

Jumlah penduduk miskin yang bertambah, angka pengangguran bertambah, Kultur dan perilaku serta tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, Resikonya sulitnya mengubah prilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat, kurang optimalnya pelayanan kesehatan pada masyarakat dan meningkatnya prevalensi kurang gizi, yang dapat membahayakan kelangsungan dan kualitas SDM masa mendatang

2.3.4.5. Aspek Geografi

Kondisi dan letak Sumatera Selatan sebagai daerah daratan dan perairan / rawa, menyebabkan sulitnya transportasi sehingga pelayanan akan terganggu dan menelan biaya besar. Kondisi rawa akan menimbulkan daerah kumuh dan sulit air bersih sehingga merupakan faktor pelularan penyakit.

2.3.4.6. Aspek Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat masih rendah ini akan berdampak pada pengetahuan masyarakat tentang kesehatan akan kurang

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. VISI

Dalam mewujudkan Visi “Sumatera Selatan Sejahtera, Lebih Maju dan Berdaya Saing Internasional”, maka Visi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan adalah **“Sumatera Selatan Sehat, Mandiri, berkeadilan dan Berdaya Saing Internasional”**.

4.2. MISI

Dalam rangka mewujudkan Visi **“Sumatera Selatan Sehat, Mandiri, berkeadilan dan Berdaya Saing Internasional”**, maka Misi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan adalah

4.2.1. Menjamin pelayanan kesehatan yang Berkualitas dan terjangkau bagi Seluruh Masyarakat Sumatera Selatan.

Amanat Amandemen UUD 1945 Pasal 28 menyatakan bahwa (a) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan (b) Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak. Disisi lain dengan keterbatasan yang ada di masyarakat baik dari segi finansial maupun letak geografis, sehingga kebutuhan akan pelayanan kesehatan tidak dapat terpenuhi.

Kebutuhan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau akan bisa tercapai apabila memiliki ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai sesuai dengan standard dan mudah dijangkau oleh masyarakat.

Sarana dan Prasarana Kesehatan yang dimaksud adalah mulai dari tingkat puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan primer sampai kepada rumah sakit daerah.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bertekad untuk mencegah, jangan sampai ada masyarakat yang tidak terlayani terhadap kebutuhan pelayanan kesehatan melalui Jaminan Sosial Kesehatan (Jamsoskes) Sumsel Semesta, oleh karena itu Program Jamsoskes Sumsel Semesta masih tetap dilanjutkan sampai tahun 2016 sesuai dengan Road Map Jaminan Kesehatan Nasional.

4.2.2. Meningkatkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat melalui pendidikan kesehatan kepada masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

Paradigma Baru pembangunan kesehatan adalah berorientasi kepada individu dan masyarakat yang sehat agar mereka (individu dan masyarakat) dapat memelihara dan meningkatkan kesehatannya secara mandiri. Individu dan Masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat adalah suatu kondisi dimana Individu dan Masyarakat menyadari, mau, dan mampu untuk mengenali, mencegah, dan mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi, sehingga dapat bebas dari gangguan kesehatan, baik yang disebabkan karena penyakit termasuk gangguan kesehatan akibat bencana, maupun lingkungan dan perilaku yang tidak mendukung untuk hidup sehat. Meningkatnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat akan berdampak positif terhadap penurunan beban anggaran kesehatan untuk biaya pengobatan (kuratif).

4.2.3. Meningkatkan profesionalitas SDM Kesehatan yang berdaya Saing Global.

Kebutuhan akan pelayanan kesehatan yang bermutu dan memberikan kepuasan kepada individu dan masyarakat, sangat tergantung kepada kualitas dan integritas SDM Kesehatan. Pemerintah Provinsi Sumatera

Selatan akan mendorong peningkatan jumlah SDM Kesehatan professional yang berakhlakul karimah; jujur, berkomitmen, pekerja keras, kreatif dan inovatif; dengan cara perbaikan mutu kurikulum pendidikan Kesehatan yang memadukan aspek ilmiah dan spiritual, serta melakukan pembinaan yang berkelanjutan;

4.2.4. Mengutamakan upaya peningkatan dan pencegahan dengan tidak mengabaikan upaya pengobatan dan pemulihan kesehatan.

Paradigma baru pembangunan kesehatan menempatkan pelayanan kesehatan bukan hanya di Rumah Sakit dan Poliklinik atau pelayanan kesehatan tidak hanya berfungsi menyembuhkan dan memulihkan, tetapi mencakup dan mengutamakan upaya peningkatan (promotif) dan upaya pencegahan (preventif), sehingga tenaga pelayanan kesehatan yang utama – pun adalah tenaga yang mempunyai kompetensi kesehatan masyarakat. Dan sasaran utama pelayanan kesehatan adalah kelompok atau masyarakat yang sehat.

4.3. TUJUAN DAN SASARAN

Sebagai penjabaran dari Visi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, maka telah ditetapkan 4 (empat) tujuan yang akan dicapai serta sasaran strategis berikut indikator kinerja dan targetnya untuk setiap tujuan tersebut. Tujuan dan sasaran strategis untuk masing-masing tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1.3.1. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Sumatera Selatan

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yaitu :

1.3.1.1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat

Untuk mengukur keberhasilan terhadap capaian sasaran strategis tersebut, maka telah ditetapkan 17 (tujuh belas) indikator kinerja pencapaiannya sebagai berikut :

- 1) Persentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang kompeten.
- 2) Persentase desa yang mencapai UCI.
- 3) Cakupan penemuan kasus "Discarded" campak pada tiap 100.000 penduduk.
- 4) Persentase Desa yang melaksanakan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) Penyakit Tidak Menular.
- 5) Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki Peraturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
- 6) Jumlah orang umur > 15 tahun yang melakukan KTS (Konseling Testing Sukarela).
- 7) Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan olah raga.
- 8) Persentase kabupaten/kota yang telah melaksanakan upaya kesehatan kerja.
- 9) Cakupan kabupaten/kota yang melaksanakan program bina yankestradkom, alternatif dan komplementer
- 10) Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan program bebas pasung bagi pasien yang mengalami gangguan jiwa.
- 11) Jumlah kasus pasung.
- 12) Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan upaya kesehatan pengembangan.
- 13) Persentase Puskesmas yang melaksanakan penjangkaran kesehatan untuk peserta didik kelas VII dan X.

- 14) Jumlah kabupaten/kota yang mengembangkan program kesehatan usia lanjut (Usila).
- 15) Persentase PUS yang menjadi Peserta KB Aktif
- 16) Rasio antara kebutuhan KB dan KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need KB)
- 17) Total Fertility Rate (TFR)

1.3.1.2. Menjamin ketersediaan pelayanan kefarmasian dan fasilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat Sumatera Selatan

Untuk mengukur keberhasilan terhadap capaian sasaran strategis tersebut, maka telah ditetapkan 7 (tujuh) indikator kinerja sebagai berikut :

- 1) Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas sesuai kebutuhan.
- 2) Persentase Puskesmas yang memiliki sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar.
- 3) Persentase Rumah Sakit yang memiliki sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar.
- 4) Industri rumah tangga pangan (IRTP) yang memenuhi persyaratan kesehatan.
- 5) Persentase Rumah Sakit Mampu PONEK.
- 6) Persentase Rumah Sakit terakreditasi versi 2012.
- 7) Jumlah Puskesmas yang terakreditasi.

1.3.1.3. Memberikan jaminan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan bermutu.

Untuk mengukur keberhasilan terhadap capaian sasaran strategis tersebut, maka telah ditetapkan 3 (tiga) indikator sebagai berikut :

- 1) Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan penduduk Miskin.
- 2) Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar penduduk Miskin.

- 3) Persentase masyarakat yang mendapat Jaminan Sosial Kesehatan Sumsel Semesta.

1.3.2. Mewujudkan masyarakat mandiri untuk hidup bersih dan sehat.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, telah ditetapkan dua sasaran strategis, yaitu :

1.3.2.1. meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat

Untuk mengukur keberhasilan terhadap capaian sasaran strategis tersebut, maka telah ditetapkan 6 (enam) indikator kinerja, sebagai berikut :

- 1) Persentase rumah sehat.
- 2) Persentase tempat-tempat Umum Sehat.
- 3) Persentase keluarga yang memiliki akses terhadap air bersih.
- 4) Persentase Desa yang melaksanakan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat).
- 5) Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan KKS (kabupaten/kota sehat).
- 6) Persentase Desa Siaga Aktif Purnama dan Mandiri.

1.3.3. Mewujudkan SDM Kesehatan yang berkualitas dan tersebar secara merata.

Untuk mewujudkan tujuan kedua tersebut, telah ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis, yaitu :

1.3.3.1. Meningkatnya kecukupan SDM kesehatan di setiap jenjang pelayanan

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan terhadap capaian sasaran strategis tersebut ada 2 (dua) indikator, yaitu:

- 1) Persentase kecukupan SDM di Puskesmas sesuai standar.
- 2) Persentase kecukupan SDM di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sesuai standar.

1.3.3.2. Meningkatkan kualitas SDM kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan kesehatan dan uji kompetensi, akreditasi dan sertifikasi.

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan terhadap capaian sasaran strategis tersebut adalah :

- 1) Persentase tenaga kesehatan yang mempunyai STR

1.3.4. Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya

Untuk mewujudkan tujuan kedua tersebut, telah ditetapkan 4 (empat) sasaran strategis, yaitu :

1.3.4.1. Menurunnya jumlah kematian ibu maternal

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan terhadap capaian sasaran strategis tersebut 1 (satu) indikator yaitu :

- 1) jumlah kematian ibu maternal.

1.3.4.2. Menurunnya jumlah kematian neonatal, bayi dan balita

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan terhadap capaian sasaran strategis tersebut ada 3 (tiga) indikator yaitu :

- 1) Jumlah kematian bayi.
- 2) Jumlah kematian anak balita.
- 3) Angka Harapan Hidup.

1.3.4.3. Mengatasi masalah gizi utama di masyarakat terutama kelompok rentan

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan terhadap capaian sasaran strategis tersebut ada 4 (empat) Indikator, yaitu :

- 1) Persentase balita gizi buruk.
- 2) Persentase balita gizi kurang.

- 3) Persentase stunting pada anak Balita.
- 4) Persentase bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif.

1.3.4.4. Menurunnya angka kesakitan dan kematian penyakit menular dan tidak menular

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan terhadap capaian sasaran strategis tersebut ada 6 (enam) indikator, yaitu:

- 1) *Annual Parasit Incidence (API)* (<2 / 1.000 penduduk).
- 2) Angka Keberhasilan Pengobatan Penyakit TB Paru BTA (+).
- 3) Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk.
- 4) *Case Notification Rate* Kasus TB per 100.000 penduduk.
- 5) Persentase perempuan usia 30 - 50 tahun di deteksi dini Ca. Cervik dan Payudara.
- 6) Angka Kematian Jema'ah Haji (< 2/1.000 jema'ah).

4.4. STRATEGI

Untuk mewujudkan visi pembangunan kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2018, dan sesuai dengan Misi yang telah ditetapkan, maka dalam periode 2013 – 2018 pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan system pencatatan dan pelaporan ketersediaan dan pemakaian obat secara berjenjang
- 2) Menjamin ketersediaan obat buffer stock untuk program kesehatan dan penanggulangan bencana
- 3) Meningkatkan fasilitas kesehatan yang memenuhi standard dari tingkat puskesmas sampai rumah sakit
- 4) Meningkatkan ketersediaan tenaga kesehatan yang bermutu di seluruh jenjang pelayanan kesehatan.

- 5) Meningkatkan system pendataan riil untuk menjamin ketersediaan data sasaran
- 6) Memperbaiki system manajemen kesehatan yang meliputi informasi kesehatan, keuangan, SDM dan perpu serta administrasi kesehatan.
- 7) Meningkatkan pelayanan jaminan sosial kesehatan bagi masyarakat Sumatera Selatan
- 8) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan
- 9) Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang PHBS
- 10) Meningkatkan kerjasama LS dan Swasta
- 11) Meningkatkan pemanfaatan pelayanan kesehatan tradisional, alternative dan komplementer
- 12) Memenuhi ketersediaan SDM kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan
- 13) Meningkatkan mutu SDM kesehatan melalui uji kompetensi
- 14) Meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi nakes potensial
- 15) Meningkatkan mutu fasyankes melalui registrasi dan akreditasi fasyankes serta bindal terhadap institusi diknakes
- 16) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dengan pendataan seluruh ibu hamil, bersalinan dan nifas dengan melibatkan kader, PKK, dan LS.
- 17) Penguatan system rujukan maternal neonatal
- 18) Peningkatan cakupan program KB
- 19) Penjaringan neonatal, bayi dan balita melibatkan kader, pkk dan LS
- 20) Meningkatkan pelayanan kesehatan bayi balita sesuai standar
- 21) Meningkatkan pelayanan pada kelompok sasaran 1000 HPK (hari pertama kehidupan)
- 22) Meningkatkan pendidikan gizi dan pemberdayaan masyarakat
- 23) Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan gizi

- 24) Meningkatkan sarana dan prasarana program pencegahan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular
- 25) Meningkatkan kualitas program pencegahan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular
- 26) Meningkatkan cakupan program kesehatan lingkungan
- 27) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam program kesehatan lingkungan.

1.4. KEBIJAKAN

Arah kebijakan pembangunan kesehatan adalah :

- 1) Membangun system informasi kesehatan terpadu sampai tingkat provinsi
- 2) Penyediaan obat buffer stock setiap tahunnya sesuai dengan kebutuhan program pelayanan kesehatan
- 3) Penyediaan fasilitas kesehatan memenuhi standar
- 4) Pengangkatan tenaga dokter dan bidan PTT daerah melalui seleksi sesuai dengan kompetensi dan standar mutu
- 5) Penggunaan data sasaran riil terutama untuk pelayanan ibu dan anak serta pelayanan program gizi
- 6) Penyediaan sharing anggaran jamsoskes sumsel semesta
- 7) Seluruh desa menjadi desa siaga aktif dan berkesinambungan
- 8) Penyediaan sarana dan prasarana promosi kesehatan
- 9) Peran serta aktif sector swasta (CSR) dalam bidang kesehatan.
- 10) Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan tradisional, alternative dan komplementer
- 11) Seluruh badan usaha dan masyarakat yang mampu di wilayah sumatera selatan wajib ikut serta dalam program JKN.
- 12) Pendistribusian tenaga kesehatan secara merata di setiap fasyankes
- 13) Semua ibu hamil harus mendapatkan pelayanan ANC

- 14) Semua ibu bersalin harus melakukan persalinan dengan tenaga kesehatan dan difasilitas kesehatan.
- 15) Semua neonates, bayi dan balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
- 16) Intervensi pelayanan gizi focus pada 1000 HPK
- 17) Seluruh Bayi dan balita harus ditimbang setiap bulan.
- 18) Penyediaan sarana dan prasarana program pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular
- 19) Pembinaan dan pengendalian terhadap program sesuai dengan protap
- 20) Kabupaten/Kota sehat, sekolah sehat
- 21) Penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat
- 22) Program percepatan sanitasi pemukiman

BAB V
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. RENCANA PROGRAM

Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka berdasarkan kategori Fungsi, Kesehatan memiliki program dan kegiatan sebagai berikut :

5.1.1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

1. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
2. Peningkatan pemerataan obat dan pebekalan kesehatan
3. Peningkatan keterjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan terutama penduduk miskin
4. Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit
5. Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan
6. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
7. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan pencapaian sasaran program

5.1.2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1. Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya
2. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
3. Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya
4. Revitalisasi sistem kesehatan
5. Peningkatan kesehatan masyarakat.
6. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana
7. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

8. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
9. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Olah Raga di Kabupaten/Kota
10. Pemeriksaan Kebugaran PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
11. Dukungan Pelaksanaan Even-Even Olah Raga Tingkat Nasional maupun Internasional.
12. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Jiwa
13. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
14. Peningkatan Kapasitas Petugas Kesehatan di Puskesmas Pemeriksaan Kesehatan Haji.
15. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Program Kesehatan Indera.
16. Monev Pelayanan Kesehatan Haji di Kabupaten/Kota
17. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
18. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan pencapaian sasaran program

5.1.3. Program Pengawasan Obat dan Makanan

1. Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat makanan
2. Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
3. Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan
4. Peningkatan penyelidikan dan penegakan hukum di bidang obat dan makanan
5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
6. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan pencapaian sasaran program

5.1.4. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
2. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
3. Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan
4. Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan
5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
6. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan pencapaian sasaran program

5.1.5. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1. Penyusunan peta informasi masyarakat kuran gizi
2. Pemberian tambahan makanan dan vitamin
3. Penanggulangan Kurang Gizi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya.
4. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
5. Penanggulangan Gizi Lebih
6. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
7. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan pencapaian sasaran program

5.1.6. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Sehat, Prilaku Sehat dan Pemberdayaan Masyarakat.
2. Peningkatan Akses Sarana Sanitasi
3. Peningkatan Program Pamsimas dan PPSP
4. Peningkatan Pengelolaan Kualitas Sanitasi Tempat-Tempat Umum
5. Peningkatan Hygiene dan Sanitasi Pangan yang memenuhi syarat kesehatan.
6. Pengadaan Sarana food security

7. Pemeriksaan Kualitas Air Minum dan Air Bersih di PDAM Kabupaten/Kota.
8. Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
9. Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
10. Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat
11. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
12. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan pencapaian sasaran program

5.1.7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

1. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
2. Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging
3. Pengadaan vaksin penyakit menular
4. Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
5. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
6. Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik
7. Pemusnahan/karantina sumber penyebab penyakit menular
8. Peningkatan imunisasi
9. Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah
10. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit
11. Pengadaan Posbindu Kit
12. Pembinaan Posbindu Kabupaten/Kota
13. Screening IVA dan CBE
14. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
15. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan pencapaian sasaran program

5.1.8. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1. Penyusunan standar pelayanan kesehatan
2. Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

3. Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
4. Penyusunan naskah akademis standar pelayanan kesehatan
5. Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan
6. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
7. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan pencapaian sasaran program

5.1.9. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

1. Pelayanan operasi katarak
2. Pelayanan kesehatan THT
3. Pelayanan operasi bibir sumbing
4. Pelayanan sunatan massal
5. Penanggulangan ISPA
6. Penanggulangan penyakit cacangan
7. Pelayanan kesehatan kulit dan kelamin
8. Pelayanan kesehatan akibat gizi buruk/busung lapar
9. Pelayanan kesehatan akibat lumpuh layu
10. Monitorig, evaluasi dan pelaporan
11. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan pencapaian sasaran program

5.1.10. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata

1. Pembangunan rumah sakit
2. Pembangunan ruang poliklinik rumah sakit
3. Pembangunan gudang obat/apotik
4. Penambahan ruang rawat inap rumah sakit (WIP, VIP, Kelas, I, II, dan III)
5. Pengembangan ruang gawat darurat
6. Pengembangan ruang ICU, ICC, NICU
7. Pengembangan ruang operasi

8. Pengembangan ruang terapi
9. Pengembangan ruang isolasi
10. Pengembangan ruang bersalin
11. Pengembangan ruang incubator
12. Pengembangan ruang bayi
13. Pengembangan ruang laboratorium rumah sakit
14. Pembangunan kamar jenazah
15. Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit
16. Rehabilitasi bangunan rumah sakit
17. Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
18. Pengadaan obat-obatan rumah sakit
19. Pengadaan ambulance/mobil jenazah
20. Pengadaan mebeuler rumah sakit
21. Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain).
22. Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit
23. Pengadaan pencetakan administrasi dan surat-menyurat rumah sakit
24. Pengembangan tipe rumah sakit
25. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
26. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan pencapaian sasaran program

5.1.11. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

1. Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit
2. Pemeliharaan rutin/berkala ruang poliklinik rumah sakit
3. Pemeliharaan rutin/berkala gudang obat/apotik
4. Pemeliharaan rutin/berkala ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II, dan III)
5. Pemeliharaan rutin/berkala ruang gawat darurat

6. Pemeliharaan rutin/berkala ruang ICU, ICCU, NICU
7. Pemeliharaan rutin/berkala ruang operasi
8. Pemeliharaan rutin/berkala ruang terapi
9. Pemeliharaan rutin/berkala ruang isolasi
10. Pemeliharaan rutin/berkala ruang bersalin
11. Pemeliharaan rutin/berkala ruang inkubator
12. Pemeliharaan rutin/berkala ruang bayi
13. Pemeliharaan rutin/berkala ruang rontgen
14. Pemeliharaan rutin/berkala ruang laboratorium rumah sakit
15. Pemeliharaan rutin/berkala kamar jenazah
16. Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit
17. Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit
18. Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah
19. Pemeliharaan rutin/berkala mebeuler rumah sakit
20. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit
21. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
22. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan pencapaian sasaran program

5.1.12. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

1. Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat
2. Kemitraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular
3. Kemitraan pengolahan limbah rumah sakit
4. Kemitraan alih teknologi kedokteran dan kesehatan
5. Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis
6. Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan
7. Kemitraan pengobatan bagi pasien yang kurang mampu
8. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
9. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan pencapaian sasaran program

5.1.13. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

1. Pembinaan Posyandu Lansia di Kabupaten/Kota
2. Lomba Posyandu Lansia Tingkat Provinsi Sumatera Selatan
3. Lomba Senam Lansia Tingkat Provinsi Sumatera Selatan
4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Program Pelayanan Kesehatan Lansia
5. Peningkatan Kapasitas Petugas Program Lansia
6. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan pencapaian sasaran program

5.1.14. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

1. Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri
2. Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga
3. Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant
4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
5. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan pencapaian sasaran program

5.1.15. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

1. Pemilihan Bidan Teladan Tingkat Provinsi
2. Pemantapan Sistem Jejaring Rujukan Maternal – Neonatal
3. Pemantapan Pelaksanaan ANC Terpadu
4. Lomba Balita Sehat Indonesia Tingkat Provinsi
5. Monitoring dan Evaluasi Program Kesehatan Ibu dan Anak
6. Monitoring dan Evaluasi Audit Maternal Perinatal (Audit Kematian Ibu dan Bayi)
7. Koordinasi District Team Problem Solving (DTPS) Kesehatan Ibu dan Anak

8. Kampanye Peduli Kesehatan Ibu
9. Studi Pembelajaran Upaya Penurunan Kematian Ibu
10. Peningkatan Kapasitas Nakes dalam Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja.
11. Koordinasi Forum Perguruan Tinggi Kesehatan dalam Rangka Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak.
12. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan pencapaian sasaran program

5.1.16. Program Penanganan Keluarga Berencana

1. Peningkatan Kapasitas Konseling KB dengan Menggunakan ABPK-KB.
2. Pemantapan Implementasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan KB
3. Evaluasi Pelaksanaan Program KB Pasca Persalinan
4. Fasilitasi dan Pembinaan Manajemen Pelayanan KB di Kabupaten/Kota.
5. Pengadaan Alat Kontrasepsi.
6. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan pencapaian sasaran program

5.1.17. Program Pendidikan Kesehatan

1. Akademi Kesehatan Lingkungan
2. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan pencapaian sasaran program

Ketujuh belas program wajib di bidang kesehatan tersebut sesuai dengan program pembangunan yang menjadi urusan wajib bidang kesehatan yang tercantum di dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan periode 2013-2018.

Dalam mengantisipasi perkembangan kebijakan pembangunan kesehatan ke depan, dipandang perlu untuk menambahkan program kegiatan sebagai *new inisiatif* di urusan wajib bidang kesehatan. Program kegiatan tersebut antara lain :

1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan

1. Pelatihan Akreditasi Versi 2012 bagi RSUD
2. Pelatihan Standarisasi Tenaga Kesehatan dalam Pelaksanaan Uji Kompetensi Sesuai Kepmenkes 46
3. Pelatihan Pengelolaan Pendidikan dalam Sertifikasi Tenaga untuk Persiapan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan
4. Assesment Akreditasi
5. Pelatihan Jabatan Fungsional Nutrisionis
6. Pelatihan Jabatan Fungsional Puskesmas
7. Pelatihan Jabatan Fungsional Administrasi Kesehatan
8. Pelatihan Jabatan Fungsional Dokter
9. Pelatihan Sistem Pemberian Pelayanan Keperawatan Profesional (SP2KP)
10. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Teknis Tenaga Tim PONED Tingkat Provinsi
11. Pelatihan Resusitasi Neonatus
12. Pelatihan Program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit
13. Pelatihan Stimulasi Nutrisi Pengungkit Otak pada Janin
14. Tugas Belajar Dalam Negeri bagi Tenaga Kesehatan
15. Kursus Pamong Saka Bakti Husada
16. Kursus Mahir Dasar Saka Bakti Husada
17. Tugas Belajar Luar Negeri bagi Tenaga Kesehatan

2. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar.

1. Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Provinsi
2. Penilaian dan Pemilihan Puskesmas Berprestasi
3. Pemantapan Penyiapan Akreditasi Puskesmas
4. Pembinaan Akreditasi Puskesmas
5. Monitoring dan Evaluasi Program Pelayanan Kesehatan Dasar

3. Program Pelayanan Kesehatan Rujukan

1. Peningkatan Kapasitas Petugas dalam penanganan kegawat daruratan Maternal.
2. Pembinaan dan Pengawasan Rumah Sakit Rujukan Regional
3. Pembinaan Pencatatan dan Pelaporan Rumah Sakit
4. Monitoring dan evaluasi Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan

4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan BLUD

1. Penyediaan Pelayanan Kesehatan BLUD

5.2. KELOMPOK SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat

- 1) Persentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang kompeten.
- 2) Persentase desa yang mencapai UCI.
- 3) Cakupan penemuan kasus "Discarded" campak pada tiap 100.000 penduduk.
- 4) Persentase Desa yang melaksanakan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) Penyakit Tidak Menular.
- 5) Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki Peraturan

Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

- 6) Jumlah orang umur > 15 tahun yang melakukan KTS (Konseling Testing Sukarela).
- 7) Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan olah raga.
- 8) Persentase kabupaten/kota yang telah melaksanakan upaya kesehatan kerja.
- 9) Cakupan kabupaten/kota yang melaksanakan program bina yankestradkom, alternatif dan komplementer
- 10) Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan program bebas pasung bagi pasien yang mengalami gangguan jiwa.
- 11) Jumlah kasus pasung.
- 12) Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan upaya kesehatan pengembangan.
- 13) Persentase Puskesmas yang melaksanakan penjangkaran kesehatan untuk peserta didik kelas VII dan X.
- 14) Jumlah kabupaten/kota yang mengembangkan program kesehatan usia lanjut (Usila).
- 15) Persentase PUS yang menjadi Peserta KB Aktif
- 16) Rasio antara kebutuhan KB dan KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need KB)
- 17) Total Fertility Rate (TFR)

Sasaran 2 : Menjamin ketersediaan obat dan fasilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat sumatera selatan

- 1) Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas sesuai kebutuhan.
- 2) Persentase Puskesmas yang memiliki sarana, prasarana

dan alat kesehatan sesuai standar.

- 3) Persentase Rumah Sakit yang memiliki sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar.
- 4) Industri rumah tangga pangan (IRTP) yang memenuhi persyaratan kesehatan.
- 5) Persentase Rumah Sakit Mampu PONEK.
- 6) Persentase Rumah Sakit terakreditasi versi 2012.
- 7) Jumlah Puskesmas yang terakreditasi.

Sasaran 3 : Memberikan jaminan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan bermutu

- 1) Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan penduduk Miskin.
- 2) Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar penduduk Miskin.
- 3) Persentase masyarakat yang mendapat Jaminan Sosial Kesehatan Sumsel Semesta.

Sasaran 4 : Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat

- 1) Persentase rumah sehat.
- 2) Persentase tempat-tempat Umum Sehat.
- 3) Persentase keluarga yang memiliki akses terhadap air bersih.
- 4) Persentase Desa yang melaksanakan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat).
- 5) Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan KKS (kabupaten/kota sehat).
- 6) Persentase Desa Siaga Aktif Purnama dan Mandiri.

Sasaran 5 : Meningkatkan kecukupan SDM kesehatan di setiap jenjang pelayanan

- 1) Persentase kecukupan SDM di Puskesmas sesuai standar.
- 2) Persentase kecukupan SDM di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sesuai standar.

Sasaran 6 : Meningkatkan kualitas SDM Kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan kesehatan dan uji kompetensi, akreditasi dan sertifikasi

- 1) Persentase tenaga kesehatan yang mempunyai STR

Sasaran 7 : Menurunnya jumlah kematian ibu maternal

- 1) Jumlah kematian ibu maternal

Sasaran 8 : Menurunnya jumlah kematian neonatal, bayi dan balita

- 1) Jumlah kematian bayi
- 2) Jumlah kematian anak balita
- 3) Angka Harapan Hidup

Sasaran 9 : Mengatasi masalah gizi utama di masyarakat terutama kelompok rentan

- 1) Persentase balita gizi buruk.
- 2) Persentase balita gizi kurang.
- 3) Persentase stunting pada anak Balita.
- 4) Persentase bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif.

Sasaran 10 : Menurunnya angka kesakitan dan kematian penyakit menular dan tidak menular

- 1) *Annual Parasit Incidence* (API) (<2 / 1.000 penduduk).

- 2) Angka Keberhasilan Pengobatan Penyakit TB Paru BTA (+).
- 3) Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk.
- 4) *Case Notification Rate* Kasus TB per 100.000 penduduk.
- 5) Persentase perempuan usia 30 - 50 tahun di deteksi dini Ca. Cervik dan Payudara.
- 6) Angka Kematian Jema'ah Haji (< 2/1.000 jema'ah).

Tahapan pencapaian target masing-masing indikator dari tahun 2014 – 2018 dapat dilihat pada lampiran.

Penetapan sasaran strategis dan indikator kinerjanya masih mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota. Dalam Permenkes tersebut, Dinas Kesehatan akan memantau pencapaian indikator kinerja Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota dan target tahun 2013 – 2018 dengan indikator dan target sebagai berikut :

1) Pelayanan Kesehatan Dasar

No.	Indikator Kinerja	Target
1.	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	95 %
2.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	80 %
3.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	90 %
4.	Cakupan pelayanan nifas	90 %
5.	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	80 %
6.	Cakupan kunjungan bayi	90 %
7.	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100 %
8.	Cakupan pelayanan anak balita	90 %

9.	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 -24 bulan keluarga miskin	100 %
10.	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100 %
11.	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	100 %
12.	Cakupan peserta KB aktif	70 %
13.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit	100 %
14.	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100 %

2) Pelayanan Kesehatan Rujukan

No.	Indikator Kinerja	Target
1.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100 %
2.	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di kabupaten/kota	100 %

3) Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa/KLB

No.	Indikator Kinerja	Target
1.	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100 %

4) Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

No.	Indikator Kinerja	Target
1.	Cakupan Desa Siaga	80 %

Pada saat Rencana Strategis ini disusun, Kementerian Kesehatan sedang menyusun SPM Bidang Kesehatan terbaru dengan mengacu kepada Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh

karena itu dimungkinkan akan ada perubahan (revisi) terhadap indicator-indikator yang ada.

5.2. PENDANAAN INDIKATIF

Pendana indikatif dalam rangka pembiayaan program-program kesehatan dapat di lihat pada lampiran.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD PROVINSI SUMATERA SELATAN

Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013-2018 dapat dilihat pada matrik berikut ini :

Tujuan		Sasaran		Indikator Kinerja Utama	
13.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	13.1	Meningkatnya status kesehatan masyarakat	13.1.1	Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup
				13.1.2	Angka harapan hidup
		13.2	Meningkatnya status gizi masyarakat	13.3.1	Prevalensi Balita dengan berat badan rendah (angka Gizi Buruk)
				13.4	Berkembangnya layanan kesehatan reproduksi
		13.4.2	Persentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang kompeten		
		13.5	Berkurangnya kasus penyakit menular dan penyakit endemic	13.5.1	Jumlah orang umur > 15 tahun yang melakukan KTS (Konseling Testing Sukarela)
				13.5.2	Angka kesembuhan Penderita TB Paru (BTA+)
				13.5.3	Angka kesakitan Penyakit DBD per 100.000 Penduduk
				13.5.4	<i>Annual Parasite Incidence (API)</i>
		13.6	Meningkatnya mutu kesehatan lingkungan	13.6.1	Persentase Rumah Sehat
13.6.2	Persentase keluarga yang memiliki akses air bersih				
15.	Mengembangkan Keluarga Berencana dan Sejahtera	15.1	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	15.1.1	Pemakaian Kontrasepsi bagi Pasangan Usia Subur (Persentase KB Aktif)
				15.1.2	Rasio antara kebutuhan KB dan KB yang tidak terpenuhi
				15.1.3	Total Fertility Rate (TFR)

Dari matrik tersebut di atas ada 11 (sebelas) indikator untuk mencapai tujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan 1 (satu) indikator bidang kesehatan untuk mendukung tujuan mengembangkan Keluarga Berencana dan Sejahtera yang tercantum dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan periode 2013-2018.

BAB VII

P E N U T U P

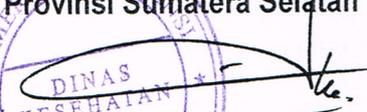
Dengan ridho dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2013-2018 dapat disusun. Renstra dimaksud disusun dan ditetapkan untuk menjawab dan memfokuskan upaya Dinas Kesehatan menghadapi tantangan pembangunan kesehatan yang makin kompleks, berlangsung pesat, dan tidak menentu.

Renstra Dinas Kesehatan ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya Dinas Kesehatan dalam kurun waktu lima tahun (2013-2018). Penyusunan Renstra ini dilakukan sedemikian rupa sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja tahunan Dinas Kesehatan. Semoga upaya Dinas Kesehatan sampai dengan tahun 2018 dapat lebih terarah dan terukur.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renstra ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Tentunya Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2013-2018 ini dapat dilaksanakan dan mencapai tujuannya, bila dilakukan dengan dedikasi yang tinggi dan kerja keras dari segenap aparatur kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan. Penerapan nilai-nilai yang dianut dan dijunjung tinggi oleh Dinas Kesehatan, diharapkan dapat memacu semangat aparat Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan Renstra ini.

Palembang, 2014

**Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Sumatera Selatan**


Dra. Lesty Nurainy, Apt, M.Kes
NIP. 196207031989032002



LAMPIRAN I
Perumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 – 2018
Tanggal : 26 Nopember 2014
Tempat : Palembang

ISU STRATEGI	VISI	MISI	TUJUAN DAN SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN						
				TA Ke-1	TA Ke-2	TA Ke-3	TA Ke-4	TA Ke-5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
POTENSI										
	Sumatera Selatan Sehat, Mandiri, Berkeadilan dan Berdaya Saing Internasional	1	Menjamin Pelayanan Kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Sumatera Selatan	Mewujudkan Pelayanan Kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Sumatera Selatan	Membangun Sistem Infomasi Kesehatan Terpadu sampai tingkat Provinsi, menjamin ketersediaan Obat bufferstock untuk program kesehatan dan penanggulangan bencana	Membangun Sistem Infomasi Kesehatan Terpadu sampai tingkat Provinsi, menjamin ketersediaan Obat bufferstock untuk program kesehatan dan penanggulangan bencana	Penyediaan fasilitas kesehatan yang memenuhi standar, menjamin ketersediaan obat buffer stock untuk program kesehatan dan penanggulangan bencana	Penyediaan fasilitas kesehatan yang memenuhi standar, menjamin ketersediaan obat buffer stock untuk program kesehatan dan penanggulangan bencana	Penyediaan fasilitas kesehatan yang memenuhi standar, menjamin ketersediaan obat buffer stock untuk program kesehatan dan penanggulangan bencana	
		2	Meningkatkan Kemandirian dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Hidup Bersih dan Sehat	Mewujudkan Masyarakat yang Mandiri untuk Hidup Bersih dan Sehat	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan dan meningkatkan kerjasama dengan Lintas Sektor dan swasta	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan dan meningkatkan kerjasama dengan Lintas Sektor dan swasta	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan dan meningkatkan kerjasama dengan Lintas Sektor dan swasta	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan dan meningkatkan kerjasama dengan Lintas Sektor dan swasta	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan dan meningkatkan kerjasama dengan Lintas Sektor dan swasta	
		3	Meningkatkan Profesionalisme SDM Kesehatan yang berdaya saing global	Mewujudkan SDM Kesehatan yang berkualitas dan tersebar secara merata	Memenuhi ketersediaan SDM di Fasilitas Kesehatan	Memenuhi ketersediaan SDM di Fasilitas Kesehatan dan meningkatkan mutu SDM Kesehatan di fasilitas kesehatan	Memenuhi ketersediaan SDM di Fasilitas Kesehatan dan meningkatkan mutu SDM Kesehatan di fasilitas kesehatan	Memenuhi ketersediaan SDM di Fasilitas Kesehatan dan meningkatkan mutu SDM Kesehatan di fasilitas kesehatan	Memenuhi ketersediaan SDM di Fasilitas Kesehatan dan meningkatkan mutu SDM Kesehatan di fasilitas kesehatan	Memenuhi ketersediaan SDM di Fasilitas Kesehatan dan meningkatkan mutu SDM Kesehatan di fasilitas kesehatan
		4	Mengutamakan Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit dengan Tidak Mengabaikan Upaya Pengobatan dan Pemulihan	Mewujudkan Derajat Kesehatan Masyarakat yang setinggi-tingginya	semua Ibu hamil mendapatkan pelayan ANC Terpadu, berkualitas dan mendapatkan pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan, Meningkatkan pelayanan KB, semua bayi dan balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	semua Ibu hamil mendapatkan pelayan ANC Terpadu, berkualitas dan mendapatkan pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan, Meningkatkan pelayanan KB, semua bayi dan balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	semua Ibu hamil mendapatkan pelayan ANC Terpadu, berkualitas dan mendapatkan pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan, Meningkatkan pelayanan KB, semua bayi dan balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	semua Ibu hamil mendapatkan pelayan ANC Terpadu, berkualitas dan mendapatkan pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan, Meningkatkan pelayanan KB, semua bayi dan balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	semua Ibu hamil mendapatkan pelayan ANC Terpadu, berkualitas dan mendapatkan pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan, Meningkatkan pelayanan KB, semua bayi dan balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	semua Ibu hamil mendapatkan pelayan ANC Terpadu, berkualitas dan mendapatkan pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan, Meningkatkan pelayanan KB, semua bayi dan balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Palembang, Nopember 2014
Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Sumatera Selatan

(Signature)
Dra. Lesty Nurainy, Apt, M.Kes
NIP. 19620703 198903 2 002



LAMPIRAN II

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
 Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 – 2018
 Tanggal : 26 Nopember 2014
 Tempat : Palembang

VISI : Sumatera Selatan Sehat, Mandiri, Berkeadilan dan Berdaya Saing Internasional

MISI 1 : Menjamin Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas dan Terjangkau bagi Seluruh Masyarakat Sumatera Selatan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan Pelayanan Kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh Masyarakat Sumatera Selatan	1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat	1. Meningkatkan ketersediaan Tenaga Kesehatan yang bermutu di seluruh jenjang pelayanan kesehatan.	1. Pengangkatan Tenaga Dokter dan Bidan PTT Daerah melalui seleksi sesuai dengan kompetensi dan standar mutu.
		2. Meningkatkan sistem pendataan riil untuk menjamin ketersediaan data sasaran.	2. Penggunaan data sasaran riil terutama untuk pelayanan kesehatan Ibu dan Anak serta pelayanan program gizi
		3. Memperbaiki sistem manajemen kesehatan yang meliputi Informasi Kesehatan, keuangan, SDM dan Perpu serta administrasi Kesehatan	3. Membangun Sistem Informasi Kesehatan Terpadu sampai Tingkat Provinsi.
	2. Menjamin ketersediaan pelayanan kefarmasian dan fasilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat Sumatera Selatan	1. Meningkatkan sistem pencatatan dan pelaporan ketersediaan dan pemakaian obat secara berjenjang.	1. Membangun Sistem Informasi Kesehatan Terpadu sampai Tingkat Provinsi.
		2. Menjamin ketersediaan obat buffer stock untuk program kesehatan dan penanggulangan bencana	2. Penyediaan Obat Buffer stock setiap tahunnya sesuai dengan kebutuhan program pelayanan kesehatan
		3. Meningkatkan fasilitas kesehatan yang memenuhi standar dari tingkat puskesmas sampai rumah sakit	3. Penyediaan fasilitas kesehatan yang memenuhi standar
	3. Memberikan Jaminan kepada Masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan bermutu	1. Meningkatkan pelayanan Jaminan Sosial Kesehatan bagi Masyarakat Sumatera Selatan	1. Penyediaan <i>Sharing Anggaran</i> Jamsoskes Sumsel Semesta.

VISI : Sumatera Selatan Sehat, Mandiri, Berkeadilan dan Berdaya Saing Internasional

MISI 2 : Meningkatkan Kemandirian & Pemberdayaan Masyarakat untuk Hidup Sehat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan Masyarakat yang Mandiri untuk Hidup Bersih dan Sehat	1. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat untuk Hidup Bersih dan Sehat	1. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan kesehatan	1. Seluruh Desa menjadi Desa Siaga Aktif dan berkesinambungan
		2. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang PHBS	2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Promosi Kesehatan
		3. Meningkatkan Kerjasama LS dan Swasta	3. Peran Serta Aktif Sektor Swasta (CSR) dalam bidang kesehatan
		4. Meningkatkan pemanfaatan pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer	4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer

VISI : Sumatera Selatan Sehat, Mandiri, Berkeadilan dan Berdaya Saing Internasional

MISI 3 : Meningkatkan Profesionalisme SDM Kesehatan yang Berdaya Saing Global.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan SDM Kesehatan yang berkualitas dan tersebar secara merata	1. Meningkatnya kecukupan SDM Kesehatan di setiap jenjang pelayanan 2. Meningkatnya Kualitas SDM Kesehatan melalui Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan dan Uji Kompetensi, Akreditasi sertifikasi	1. Memenuhi ketersediaan SDM Kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan.	1. Pendistribusian Tenaga Kesehatan secara merata di setiap Fasyankes.
		1. Meningkatkan Mutu SDM Melalui Uji Kompetensi	1. Pelaksanaan Uji Kompetensi kepada Lulusan Diknakes dan Uji Kompetensi secara berkala (6 bulan) kepada setiap tenaga kesehatan
		2. Meningkatkan Pendidikan Pelatihan bagi nakes potensial	2. Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional bagi tenaga kesehatan secara berkala.
		3. Meningkatkan mutu fasyankes melalui Registrasi dan Akreditasi Fasyankes serta Bindal terhadap Institusi diknakes	3. Seluruh fasyankes di Registrasi dan di akreditasi serta Pembinaan dan Pengendalian terhadap Institusi Dinkes.

VISI : Sumatera Selatan Sehat, Mandiri, Berkeadilan dan Berdaya Saing Internasional

MISI 4 : Mengutamakan Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit dengan tidak Mengabaikan Upaya Pengobatan dan Pemulihan Kesehatan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan Derajat Kesehatan Masyarakat yang setinggi-tingginya.	1. Menurunkan Jumlah Kematian Ibu Maternal	1. Meningkatkan Akses dan kualitas Pelayanan Kesehatan dengan pendataan seluruh ibu hamil, bersalin dan nifas dengan melibatkan kader, PKK dan LS	1. Semua ibu hamil harus mendapatkan pelayanan ANC Terpadu
		2. Penguatan Sistem Rujukan Maternal Neonatal	2. Semua ibu harus melakukan persalinan dengan tenaga kesehatan dan di fasilitas kesehatan
		3. Peningkatan Cakupan Program KB	3. Peningkatan Pelayanan KB sesuai standar
	2. Menurunnya Jumlah Kematian Neonatal, bayi dan balita	1. Penjaringan Neonatal, Bayi dan Balita melibatkan Kader, PKK dan Lintas Sektor.	1. Semua Neonatus, bayi dan balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
		2. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Balita Sesuai Standar.	
	3. Mengatasi Masalah Gizi Utama di masyarakat terutama kelompok rentan	1. Meningkatkan pelayanan pada kelompok sasaran 1000 hari pertama kehidupan	1. Intervensi pelayanan Gizi fokus pada 1000 hari pertama kehidupan
		2. Meningkatkan Pendidikan Gizi dan Pemberdayaan Masyarakat	2. Seluruh Bayi dan Balita harus ditimbang setiap bulan
		3. Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan gizi	
	4. Menurunnya Angka Kesakitan dan Kematian Penyakit Menular dan Tidak Menular	1. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Program Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Program Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
		2. Meningkatkan Kualitas Program Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	2. Pembinaan dan Pengendalian terhadap pelaksanaan Program sesuai dengan Protap.

Palembang, Nopember 2014
Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Sumatera Selatan



Dra. Lesty Nurainy, Apt, M.Kes
NIP. 19620703 198903 2 002

LAMPIRAN III

Program dan Kegiatan Prioritas

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 – 2018

Tanggal : 26 Nopember 2014

Tempat : Palembang

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan
Wewujudkan Pelayanan Kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh Masyarakat Sumatera Selatan	1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat	1. Persentase Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Kompeten	1. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 1.1 Pemilihan Bidan Teladan Tingkat Provinsi 1.2 Pemantapan Sistem Jejaring Rujukan Maternal-Neonatal 1.3 Pemantapan Pelaksanaan ANC Terpadu 1.4 Lomba Balita Sehat Indonesia Tingkat Provinsi 1.5 Monev Program Kesehatan Ibu dan Anak 1.6 Monev Audit Maternal Perinatal (Audit Kematian Ibu dan Bayi) 1.7 Koordinasi District Team Problem Solving (DTPS) Kesehatan Ibu dan Anak 1.8 Kampanye Peduli Kesehatan Ibu 1.9 Studi Pembelajaran Upaya Penurunan Kematian Ibu 1.10 Peningkatan Kapasitas Nakes dalam Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja 1.11 Koordinasi Forum Perguruan Tinggi Kesehatan dalam Rangka Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
		2. Persentase desa yang mencapai UCI	2. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan
		3 Penemuan kasus "Discarded" campak pada tiap 100.000 penduduk 4 Persentase Desa yang melaksanakan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) Penyakit Tidak Menular 5 Persentase Kab/Kota yang memiliki peraturan kawasan tanpa rokok (KTR) 6 Jumlah orang umur > 15 tahun yang melakukan KTS (Konseling Testing Sukarela)	2.1 Peningkatan Imunisasi 2.2 Pengadaan vaksin penyakit menular 2.3 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit menular 2.4 Peningkatan surveilans epidemiologi dan Penanggulangan wabah 2.5 Peningkatan Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit 2.6 Pengadaan Posbindu Kit 2.7 Pembinaan Posbindu kabupaten/Kota
		7 Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan olah raga 8 Persentase kab/kota yang telah melaksanakan upaya kesehatan kerja 9 Cakupan kab/kota yang melaksanakan program bina yankestradkom, alternatif dan komplementer 10 Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan Program Bebas Pasung bagi pasien yang mengalami gangguan jiwa 11 Jumlah kasus pasung 12 Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan Upaya Kesehatan Pengembangan	3. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 3.1 Pembinaan pelayanan kesehatan olah raga di kabupaten/Kota 3.2 Pemeriksaan Kebugaran PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 3.3 Dukungan Pelaksanaan Even-Even Olah Raga tingkat Nasional maupun Internasional 3.4 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Jiwa 3.5 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan
		13 Persentase Puskesmas yang melaksanakan penjangkaran kesehatan untuk peserta didik kelas VII dan X	3.6 Peningkatan kapasitas petugas kesehatan di Puskesmas Pemeriksaan Kesehatan Haji 3.7 Monev pelayanan kesehatan haji di Kabupaten/Kota 3.6. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Petugas dalam program Kesehatan Indera. 3.8 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan Jaringannya 3.6. Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan 3.9 Peningkatan Kesehatan Masyarakat 3.6. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan. 3.10 Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana
		14 Jumlah Kab/Kota yang mengembangkan Program Usila	4. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 4.1 Pembinaan Posyandu Lansia di Kab/Kota 4.2 Peningkatan Kapasitas Petugas Program Usila 4.3. Lomba Posyandu Lansia 4.4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Program Usila
		15 Persentase PUS yang menjadi peserta KB Aktif 16 Rasio antara kebutuhan KB dan KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need KB) 17 Total Fertility Rate (TFR)	5. Program Penanganan Keluarga Berencana 5.1. Peningkatan Kapasitas Konseling KB dengan Menggunakan ABPK-KB 5.2. Pemantapan Implementasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan KB 5.3. Evaluasi Pelaksanaan KB Pasca Persalinan 5.4. Fasilitasi dan Pembinaan Manajemen Pelayanan KB di Kab/Kota 5.5. Pengadaan Alat Kontrasepsi

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan
	2. Menjamin ketersediaan pelayanan kefarmasian dan fasilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat Sumatera Selatan	1 Persentase Ketersediaan Obat dan vaksin di Puskesmas sesuai kebutuhan 2 Persentase Puskesmas yang memiliki Sarana, Prasarana dan Alkes sesuai standar 3 Persentase Rumah Sakit Umum Daerah yang memiliki Sarana, Prasarana dan Alkes sesuai standar	6. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 6.1 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan 6.2 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan 6.3 Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit 6.4 Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan 6.5 Pemeriksaan Kalibrasi Alat Kesehatan 6.6 Pembinaan dan Pengawasan Sarana, Prasarana dan Alkes Puskesmas 6.7 Pembinaan dan Pengawasan Sarana, Prasarana dan Alkes Rumah Sakit 6.8 Pemutakhiran data Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan 6.9 Pembinaan dan Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi Obat dan Kefarmasian 6.10 Monitoring dan Evaluasi Program Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan 6.11 Persiapan Pembentukan UPT Farmasi (Instalasi Farmasi Provinsi) 6.12 Pemutakhiran data Kefarmasian 6.13 Studi Pembelajaran dalam rangka pembentukan UPT Farmasi Provinsi

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan
		4 Persentase Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang memenuhi persyaratan kesehatan	7. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 7.1 Pembinaan dan pengawasan Makanan dan Minuman IRTP di Kabupaten/Kota 7.2 Pembinaan dan Pengawasan Makanan dan Minuman di Restoran/Hotel 7.3 Pembinaan dan Pengawasan Produk Pangan Industri Pabrikasi
		5 Persentase Rumah Sakit Mampu PONEK	8. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru-Paru/Rumah Sakit Mata. 8.1 Pembangunan Rumah Sakit 8.2 Pembangunan Gudang Obat/Apotik 8.3 Pengadaan Alat-Alat Rumah Sakit 8.4 Pengadaan Obat-obat Rumah Sakit 8.5 Pengadaan Meubeler Rumah Sakit 8.6 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga RS (Dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu, dll) 8.7 Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit 8.8 Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit 8.9 Pembangunan Rumah Sakit Pratama 8.10 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
		6 Persentase RS Terakreditasi versi 2012	9. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan 9.1 Pembinaan Pencatatan dan Pelaporan Rumah Sakit 10. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 10.1 Pelatihan Akreditasi Rumah Sakit Versi 2012 10.2 Pembinaan Akreditasi Rumah Sakit Versi 2012
		7 Persentase Puskesmas yang terakreditasi	11. Program Pelayanan Kesehatan Dasar 11.1 Pemilihan Nakes Teladan Tingkat Provinsi

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan
			11.2 Penilaian dan Pemilihan Puskesmas Berprestasi 11.3 Pemantapan Penyiapan Akreditasi Puskesmas 11.4 TOT Surveyor Akreditasi Puskesmas 11.5 TOT Pendampingan Akreditasi Puskesmas 11.6 Pembinaan Akreditasi Puskesmas
	3. Memberikan Jaminan kepada Masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan bermutu	1 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin 2 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin 3 Persentase masyarakat yang mendapatkan jaminan Sosial Kesehatan Sumsel Semesta	12. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 12.1 Survey Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan 12.2 Pertemuan Forum Komunikasi JPKM 12.3 Jaminan Sosial Kesehatan Masyarakat Sumsel Semesta 12.4 Pengawasan Rujukan Puskesmas untuk Program Jamsoskes Sumsel Semesta
Mewujudkan Masyarakat yang Mandiri untuk Hidup Bersih dan Sehat	1. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat untuk Hidup Bersih dan Sehat	1 Persentase Rumah Sehat 2 Persentase Tempat Tempat Umum Sehat 3 Persentase Keluarga yang memiliki Akses terhadap Air Bersih 4 Persentase Desa yang melaksanakan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) 5 Persentase kab/kota yang melaksanakan KKS (kabupaten/kota sehat)	13. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 13.1 Peningkatan Kualitas Lingkungan Sehat, Prilaku Sehat dan Pemberdayaan Masyarakat 13.2 Peningkatan akses sarana sanitasi 13.3 Peningkatan program pamsimas dan PPSP 13.4 Peningkatan pengelolaan kualitas sanitasi tempat-tempat umum 13.5 Peningkatan Hygine dan Sanitasi Pangan yang memenuhi syarat kesehatan 13.6 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan
			13.7 Pengadaan Sarana Food Security 13.8 Pemeriksaan Kualitas Air Minum dan Air Bersih di PDAM Kabupaten/Kota 13.9 Pemicuhan
		6 Persentase Desa Siaga Aktif Purnama dan Mandiri	14. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 14.1 Penyebar luasan informasi Pola Hidup Sehat 14.2 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 14.3 Lomba Desa PHBS Tingkat Provinsi 14.4 Penyediaan Media Informasi Kesehatan 14.5 Lomba Desa Siaga Tingkat Provinsi 14.6 Peningkatan Kapasitas Kader Desa Siaga 14.7 Pembinaan Program Desa Siaga 14.8 Lomba Posyandu Berprestasi Tingkat Provinsi 14.9 Pembinaan Posyandu 14.10 Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu 14.11 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Mewujudkan SDM Kesehatan yang berkualitas dan tersebar secara merata	1. Meningkatkan kecukupan SDM Kesehatan di setiap jenjang pelayanan	1 Persentase Kecukupan SDM Di Puskesmas sesuai standar 2 Persentase Kecukupan SDM Di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sesuai standar	16. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 16.1 Penyusunan Standar pelayanan kesehatan 16.2 Pencatatan dan Pelaporan Tenaga Kesehatan 16.3 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan 16.4 Penempatan Dokter/Drg/Bidan PTT
	2. Meningkatkan Kualitas SDM Kesehatan melalui Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan dan Uji Kompetensi, Akreditasi sertifikasi	1 Persentase tenaga kesehatanyang mempunyai STR	10. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan 10.2 Workshop pembuatan Soal Uji Kompetensi 10.3 Workshop review soal Uji Kompetensi 10.4 Pelatihan Instruktur Klinik bagi tenaga kesehatan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan
			10.5 Workshop pendidikan pengembangan kurikulum Diploma 3 Kebidanan 10.6 Workshop pendidikan pengembangan kurikulum Diploma 3 Keperawatan 16. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 16.4 Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor dengan Organisasi Profesi, Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan 16.5 Standarisasi Pelayanan Dinas Kesehatan dengan ISO 9001 16.6 Pengkajian Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan
Mewujudkan Derajat Kesehatan Masyarakat yang setinggi-tingginya.	1.	Menurunkan Jumlah Kematian Ibu Maternal	1. Jumlah Kematian Ibu Maternal 1. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 1.1 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi (new inisiatif) 9. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan 9.2 Peningkatan Kapasitas Petugas dalam penanganan kegawat darurat Maternal 9.3 Monitoring dan Evaluasi Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan
	2.	Menurunnya Jumlah Kematian Neonatal, bayi dan balita	1. Jumlah Kematian Bayi 2. Jumlah Kematian Balita 3. Angka Harapan Hidup 17. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 17.1 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak 17.2 Peningkatan Kapasitas Nakes dalam Penatalaksanaan Kasus Kekerasan Terhadap Anak 9. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan 9.4 Peningkatan Kapasitas Petugas dalam penanganan kegawat darurat Neonatal
	3.	Mengatasi Masalah Gizi Utama di masyarakat terutama kelompok rentan	1. Persentase Balita Gizi Buruk 2. Persentase Balita Gizi Kurang 18. Program Perbaiki Gizi Masyarakat 18.1 Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan
	rentan	3 Persentase Stunting pada Anak Balita 4 Persentase bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif	18.2 Penyediaan Bahan tambahan makanan dan vitamin untuk penanggulangan masalah gizi 18.3 Penanggulangan KEP, Anemia Gizi Besi, GAKY, Kurang Vit A, Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya 18.4 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi 18.5 Pemilihan Petugas Gizi Teladan Tingkat Provinsi 18.6 Monitoring dan Evaluasi
	4. Menurunnya Angka Kesakitan dan Kematian Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 <i>Annual Parasit Incidence</i> (API) 2 Angka Keberhasilan Pengobatan Penyakit TB Paru BTA (+) 3 Angka Kesakitan DBD 4 Case Notification Rate Kasus TB per 100.000 penduduk 5 Persentase Perempuan usia 30-50 tahun di deteksi dini Ca.Cervik dan Payudara. 6 Angka Kematian Jema'ah Haji < 2 / 1000 Jema'ah Haji	2. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 2.1 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit menular 2.2 Peningkatan surveilans epidemiologi dan Penanggulangan wabah 2.3 Peningkatan Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit 2.4 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging 2.5 Penyemprotan fogging dan sarang nyamuk 2.6 Penemuan dan Pelacakan Kasus Kusta 2.7 Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Petugas dalam program kusta Monev pelayanan kesehatan haji di Kabupaten/Kota 2.8 Screening IVA dan CBE 2.10 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Palembang, Nopember 2014
Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Sumatera Selatan



Dra. Lesty Nurainy, Apt, M.Kes
NIP. 19620703 198903 2 002

LAMPIRAN IV

Program dan Kegiatan Prioritas
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 – 2018

Tanggal : 26 Nopember 2014

Tempat : Palembang

No.	Indikator Sesuai dengan Tugas dan Fungsi SKPD	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Kompeten	93.10%	94%	95%	98%	99%	100%	100%
2	Persentase desa yang mencapai UCI	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
3	Angka Kasus "Discarded" Campak pada tiap 100.000 penduduk	33%	< 5 %	< 5 %	< 5 %	< 5 %	< 5 %	< 5 %
4	Persentase Desa yang melaksanakan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) Penyakit Tidak Menular	9%	10%	11%	12%	13%	14%	14%
5	Persentase Kab/Kota yang memiliki Peraturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	29%	30%	35%	40%	45%	50%	50%
6	Jumlah orang umur > 15 tahun yang melakukan KTS (Konseling Testing Sukarela)	20,044	23,385	27,126	31,466	36,500	42,340	42,340
7	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan Olah Raga	68	95	100	110	120	130	130
8	Persentase Kab/kota yang telah melaksanakan Upaya Kesehatan Kerja	60%	70%	75%	80%	85%	90%	90%
9	Cakupan Kab/kota yang melaksanakan program bina yankestradkom, alternatif dan komplementer	60%	66%	70%	86%	91%	96%	96%
10	Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan Program Bebas Pasung bagi pasien yang mengalami gangguan jiwa	70%	75%	80%	85%	90%	100%	100%

No.	Indikator Sesuai dengan Tugas dan Fungsi SKPD	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Jumlah kasus pasung	150	120	80	40	20	0	0
12	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan upaya kesehatan pengembangan	70%	70%	80%	85%	90%	95%	95%
13	Persentase Puskesmas yang melaksanakan penjangkaran kesehatan untuk peserta didik kelas VII dan X	70.2%	40%	45%	50%	55%	60%	60%
14	Jumlah Kabupaten/Kota yang mengembangkan Program Usila	15	17	17	17	17	17	17
15	Persentase PUS yang menjadi Peserta KB Aktif	56.6%	60%	62%	65%	67%	70%	70%
16	Rasio antara kebutuhan KB dan KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need KB)	8.1%	7.5%	7.0%	6.0%	5.5%	5.0%	5.0%
17	Total Fertility Rate (TFR)	2.7	2.6	2.4	2.2	2.1	2.0	2.0
18	Persentase Ketersediaan Obat dan vaksin di Puskesmas sesuai kebutuhan	87%	90%	93%	96%	98%	100%	100%
19	Persentase Puskesmas yang memiliki sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar	50%	55%	60%	70%	80%	90%	90%
20	Persentase Rumah Sakit Umum Daerah yang memiliki sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar	50%	55%	65%	75%	85%	95%	95%
21	Persentase Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang memiliki izin edar yang memenuhi Persyaratan Kesehatan	43%	55%	70%	80%	90%	100%	100%
22	Persentase Rumah Sakit Mampu PONEK	23%	45%	55%	70%	80%	100%	100%
23	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi versi 2012	0%	5%	10%	15%	20%	25%	25%
24	Persentase Puskesmas yang Terakreditasi	0%	1%	3%	10%	35%	65%	65%
25	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Indikator Sesuai dengan Tugas dan Fungsi SKPD	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
27	Persentase Penduduk yang mendapatkan Jaminan Sosial Kesehatan Sumsel Semesta	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
28	Persentase Rumah Sehat	64.7%	67.7%	70.8%	73.9%	76.4%	80%	80%
29	Persentase Tempat Tempat Umum Sehat	63%	67%	70%	73%	77%	80%	80%
30	Persentase Keluarga yang memiliki Akses terhadap Air Bersih	64%	67.2%	70.4%	73.6%	76.8%	80%	80%
31	Persentase Desa yang Melaksanakan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)	12%	26%	39%	53%	67%	80%	80%
32	Persentase kab/Kota Yang Melaksanakan KKS (Kabupaten/ Kota Sehat)	0%	0,06%	0,3%	30%	50%	80%	80%
33	Persentase Desa siaga aktif Purnama dan Mandiri	62.60%	70.0%	73%	76%	78%	80%	80%
34	Persentase kecukupan SDM di Puskesmas sesuai standar	50%	50%	60%	70%	80%	100%	100%
35	Persentase kecukupan SDM di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sesuai standar	50%	50%	60%	70%	80%	100%	100%
36	Persentase Tenaga Kesehatan yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR)	20%	30%	40%	50%	60%	70%	70%
37	Jumlah Kematian Ibu Maternal (102 / 100.000 KH)	144	142	140	138	136	134	134
38	Jumlah Kematian Bayi (34 / 1000 KH)	123	120	115	110	105	100	100
39	Jumlah Kematian Balita (23 / 1000 KH)	50	52	50	48	46	44	44
40	Angka Harapan Hidup	70.3	70.5	70.7	70.9	80.1	80.3	80.3
41	Persentase Balita Gizi Buruk	0.45	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
42	Persentase Balita Gizi Kurang	5.38	15	13	11	9	7	7
43	Persentase Stunting pada anak Balita	36%	35%	34%	32%	30%	28%	28%
44	Persentase bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif	61.3	70	72	75	77	80	80
45	Annual Parasit Incidence (API)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

No.	Indikator Sesuai dengan Tugas dan Fungsi SKPD	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	Angka Keberhasilan Pengobatan Penyakit TB BTA (+)	86	87	88	89	90	91	91
47	Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk	52	51	50	49	48	47	47
48	<i>Case Notification Rate</i> kasus TB per 100.000 penduduk	113	119	125	132	139	146	146
49	Persentase Perempuan Usia 30-50 tahun dideteksi dini Ca.Cervik dan Payudara	0.001%	0.001%	1%	2%	3%	4%	4%
50	Angka Kematian Jema'ah Haji < 2 / 1000 Jema'ah Haji	2.8	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2

Palembang, Nopember 2014
Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Sumatera Selatan



Dra. Lesty Nurainy, Apt, M.Kes
NIP. 19620703 198903 2 002

**PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA - SKPD
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Kode	Fungsi/Bidang/Urusan Pemerintahan/ Sub Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Sasaran dan Pagu Indikatif										
				Tahun 2013	Tahun-2014		Tahun-2015		Tahun-2016		Tahun-2017		Tahun-2018	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
TOTAL PAGU DINAS KESEHATAN (BELANJA LANGSUNG)						154,872,492,550		378,470,375,074		648,947,848,447		488,111,612,399		118,274,603,945
BELANJA TIDAK LANGSUNG						27,551,338,343		27,551,338,343		27,551,338,343		27,551,338,343		27,551,338,343
07	1 02 01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			100	100		100		100		100		100
						14,028,125,375		14,719,898,034		12,005,883,375		12,005,883,375		12,005,883,375
07	1 02 01 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran :	1	Jumlah materi yang tersedia	lembar	4575	40,300,000	4575	40,300,000	4575	40,300,000	4575	40,300,000
				2	Jumlah peranko yang tersedia	lembar	4060		4060		4060		4060	
				3	Jumlah surat yang di fax / dikirim	Surat	425		425		425		425	
			Hasil :		Persentase kelancaran pelayanan Surat Menyurat	%	100	100	100	100	100	100	100	100
07	1 02 01 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran :	1	Jumlah Rekening Telepon yang dibayar	Rek	10	3,247,304,000	10	3,247,304,000	10	3,247,304,000	10	3,247,304,000
				2	Jumlah Rekening Air yang dibayar	Rek	11		11		11		11	
				3	Jumlah Rekening Listrik yang dibayar	Rek	20		20		20		20	
				4	Jumlah Rekening Internet yang dibayar	Rek	6		6		6		6	
			Hasil :		Persentase ketersediaan air, listrik, telepon dan internet selama 1 tahun	Rek	100	100	100	100	100	100	100	100
07	1 02 01 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Keluaran :	1	Jumlah tenaga pengelola keuangan yang dibayar setiap bulan	orang	33	124,800,000	33	124,800,000	33	124,800,000	33	124,800,000
			Hasil :		Persentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan Dinkes	%	100	100	100	100	100	100	100	100
07	1 02 01 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Keluaran :	1	Jumlah penyedia jasa kebersihan kantor bagi Kantor Dinkes dan UPT	Perusahaan	1	2,930,377,529	1	2,930,378,000	1	2,930,377,529	1	2,930,377,529
			Hasil :		Persentase ruang kantor dan gedung Dinkes dan UPT yang bersih.	%	100	100	100	100	100	100	100	100
07	1 02 01 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran :	1	Jumlah kantor yang tersedia alat tulis kantor	Kantor	6	429,052,366	6	288,947,634	6	429,052,366	6	429,052,366
			Hasil :		Persentase terpenuhinya kebutuhan ATK selama 1 tahun	%	100	100	100	100	100	100	100	100
07	1 02 01 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Keluaran :	1	Jumlah kantor yang tersedia barang cetakan berupa formulir, blanko, buku, kartu dan penggandaan	Kantor	6	500,000,000	6	297,800,000	6	500,000,000	6	500,000,000
			Hasil :		Persentase ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
07	1 02 01 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran :	1	Jumlah kantor yang tersedia komponen instalasi listrik / penerangan	Kantor	6	290,435,680	6	265,500,000	6	290,435,680	6	290,435,680
			Hasil :		Persentase ruangan dan gedung kantor yang mendapatkan penerangan/cahaya	%	100	100	100	100	100	100	100	100
07	1 02 01 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Keluaran :	1	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	Paket	1	35,000,000	1	35,000,000	1	35,000,000	1	35,000,000
			Hasil :		Persentase ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	%	100	100	100	100	100	100	100	100

Kode	Fungsi/Bidang/Urusan Pemerintahan/ Sub Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Sasaran dan Pagu Indikatif										
				Tahun 2013	Tahun-2014		Tahun-2015		Tahun-2016		Tahun-2017		Tahun-2018	
					Target	Rp								
07 1 02 01 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : 1 Jumlah kantor yang tersedia makanan dan minuman untuk rapat/pertemuan	Kantor	6	6	551,573,800	6	225,170,000	6	551,573,800	6	551,573,800	6	551,573,800
		Hasil : Persentase rapat/pertemuan yang tersedia makanan dan minuman	%	100	100		100		100		100		100	
07 1 02 01 01 19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran	Keluaran : 1 Jumlah tenaga pendukung administrasi teknis/perkantoran di dinkes dan UPT	orang	116	116	4,136,600,000	116	5,631,766,400	116	2,458,040,000	116	2,458,040,000	116	2,458,040,000
		Hasil : Persentase kelancaraan kegiatan teknis/perkantoran di Dinkes dan UPT	%	100	100		100		100		100		100	
07 1 02 01 01 20	Penyediaan Jasa Tutor SKJ	Keluaran : 1 Jumlah tutor SKJ yang memimpin senam pagi setiap hari Jum'at	orang	12	12	35,750,000	12	66,000,000	12	39,000,000	12	39,000,000	12	39,000,000
		Hasil : Persentase terlaksananya kegiatan SKJ di Lingkungan Dinkes dan UPT	%	100	100		100		100		100		100	
07 1 02 01 01 75	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, Ke Luar Daerah dan Luar Negeri	Keluaran : 1 Jumlah rapat koordinasi dan supervisi ke dalam provinsi	Kali	361	361	1,706,932,000	361	1,566,932,000	361	1,360,000,000	361	1,360,000,000	361	1,360,000,000
		2 Jumlah rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Provinsi	Kali	45	45		45		45		45		45	
		Hasil : Persentase Rapat/Koordinasi dan Konsultasi yang diikuti	%	100	100		100		100		100		100	
07 1 02 01 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR					6,643,871,000		7,318,171,000		8,883,171,000		7,577,371,000		7,577,371,000
07 1 02 01 02 03	Pembangunan Gedung Kantor	Keluaran : 1 Jumlah gedung/Kantor yang dibangun	unit	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
		Hasil : Persentase Gedung/Kantor yang terbangun	%	0	0		0		0		0		0	
07 1 02 01 02 04	Pengadaan Mobil Jabatan	Keluaran : 1 Jumlah Mobil Jabatan untuk Kepala Dinas Kesehatan	unit	0	1	-	4	554,500,000	4	554,500,000	0	-	0	-
		Hasil : Jumlah ketersediannya Mobil Jabatan Kepala Dinkes yang layak	unit	0	1		1		1		1		1	
07 1 02 01 02 05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Keluaran : 1 Jumlah kendaraan dinas operasional bagi dinkes dan UPT	unit	0	7	607,700,000	7	1,000,000,000	4	1,000,000,000	7	1,441,200,000	7	1,441,200,000
		Hasil : Jumlah ketersediaan kendaraan dinas operasional	unit	0	7		7		7		7		7	
07 1 02 01 02 09	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Keluaran : 1 Jumlah kantor yang mendapatkan peralatan dan perlengkapan kantor	Kantor	6	6	2,519,150,000	6	1,519,150,000	6	2,519,150,000	6	2,519,150,000	6	2,519,150,000
		Hasil : Persentase ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	%	100	100		100		100		100		100	
07 1 02 01 02 10	Pengadaan Peratalan dan Perlengkapan Rumah Tangga (Meubeler)	Keluaran : 1 Jumlah kantor yang mendapatkan peralatan dan perlengkapan rumah tangga (meubeler)	Kantor	6	6	270,021,000	6	195,021,000	6	270,021,000	6	270,021,000	6	270,021,000
		Hasil : Persentase ketersediaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga (meubeler)	%	100	100		100		100		100		100	
07 1 02 01 02 20	Pemeliharaan rutin / berkala rumah jabatan	Keluaran : 1 Jumlah rumah jabatan yang mendapat pemeliharaan	unit	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
		Hasil : Persentase rumah jabatan yang terpelihara	%	0	0		0		0		0		0	

Kode	Fungsi/Bidang/Urusan Pemerintahan/ Sub Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Sasaran dan Pagu Indikatif										
				Tahun 2013	Tahun-2014		Tahun-2015		Tahun-2016		Tahun-2017		Tahun-2018	
					Target	Rp								
07 1 02 01 02 22	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Keluaran : 1 Jumlah Gedung/Kantor yang mendapatkan pemeliharaan			4	-	4	892,500,000	4	892,500,000	4	892,500,000	4	892,500,000
		Hasil : Persentase gedung/kantor yang terpelihara	%	100	100		100		100		100		100	
07 1 02 01 02 24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional	Keluaran : Jumlah kendaraan dinas operasional roda 2 yang mendapat pemeliharaan	unit	115	115	1,480,000,000	115	1,480,000,000	115	1,480,000,000	115	1,480,000,000	115	1,480,000,000
		Jumlah kendaraan dinas operasional roda 4 yang mendapat pemeliharaan	unit	52	52		52		52		52		52	
		Hasil : Persentase kendaraan dinas operasional yang berfungsi dengan baik	%	100	100		100		100		100		100	
07 1 02 01 02 28	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	Keluaran : 1 Jumlah kantor yang mendapat pemeliharaan peralatan gedung kantor	Kantor	6	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		Hasil : Persentase peralatan kantor berfungsi dengan baik	%	100	0		0		0		0		0	
07 1 02 01 02 29	Pemeliharaan rutin / berkala Meubeler (Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga)	Keluaran : 1 Jumlah kantor yang mendapatkan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga	Kantor	6	6	120,000,000	6	120,000,000	6	120,000,000	6	120,000,000	6	120,000,000
		Hasil : Persentase peralatan dan perlengkapan rumah tangga yang berfungsi dengan baik	%	100	100		100		100		100		100	
07 1 02 01 02 30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Keluaran : 1 Jumlah kantor yang mendapatkan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kantor	6	6	500,000,000	6	410,000,000	6	600,000,000	6	600,000,000	6	600,000,000
		Hasil : Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang berfungsi dengan baik	%	100	100		100		100		100		100	
07 1 02 01 02 40	Rehabilitasi sedang/berat rumah Jabatan	Keluaran : 1 Jumlah rumah jabatan yang direhab	unit	0	0	-	0	-	2	150,000,000	0	-	0	
		Hasil : Persentase rumah jabatan yang berfungsi dengan baik	%	0	0		0		0		0		0	
07 1 02 01 02 41	Rehabilitasi sedang/berat rumah Dinas	Keluaran : 1 Jumlah rumah dinas yang direhab	unit	0	0	-	0	-	2	150,000,000	0	-	0	
		Hasil : Persentase rumah dinas yang berfungsi dengan baik	%	0	0		0		0		0		0	
07 1 02 01 02 42	Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor	Keluaran : 1 Jumlah gedung kantor yang direhab	unit	0	1	892,500,000	1	892,500,000	1	892,500,000	0	-	0	
		Hasil : Persentase rumah jabatan yang berfungsi dengan baik	%	0	0		0		0		0		0	
07 1 02 01 02 103	Penambahan Daya Listrik Kantor	Keluaran : 1 Jumlah kantor yang mendapatkan penambahan daya listrik	Kantor		4	254,500,000	4	254,500,000	4	254,500,000	4	254,500,000	4	254,500,000
		Hasil : Persentase kantor yang tersedia daya listrik yang memadai	%	100	100		100		100		100		100	
07 1 02 01 02 103	Pengamanan Aset Daerah	Keluaran :				-	1	426,400,000	1	426,400,000	1	426,400,000	1	426,000,000
		Hasil :												
07 1 02 01 03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR							250,000,000		350,000,000		175,000,000		175,000,000
07 1 02 01 03 01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Keluaran : 1 unit mesin absensi	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Hasil :												
07 1 02 01 03 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Keluaran : 1 Jumlah pakaian dinas yang dijahit	Stel	-	500	-	500	175,000,000	500	175,000,000	500	175,000,000	500	175,000,000
		Hasil : Persentase pegawai dinkes dan upt yang menggunakan seragam dinas	%	-	100		100		100		100		100	

Kode	Fungsi/Bidang/Urusan Pemerintahan/ Sub Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Sasaran dan Pagu Indikatif										
				Tahun 2013	Tahun-2014		Tahun-2015		Tahun-2016		Tahun-2017		Tahun-2018	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
07 1 02 01 03 03	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu	Keluaran : 1 Jumlah pakaian dinas khusus hari-hari tertentu yang dijahit	Stel	-	-	-	-	-	1	175,000,000	-	-	-	-
		Hasil : Persentase pegawai dinkes dan upt yang menggunakan seragam dinas khusus hari-hari tertentu	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07 1 02 01 03 03	Pengadaan Pakaian KORPRI	Keluaran : 1 Jumlah pakaian dinas KORPRI hari-hari tertentu yang dijahit	Stel	-	250	-	250	75,000,000	250	-	-	-	-	-
		Hasil : Persentase pegawai dinkes dan upt yang menggunakan seragam dinas KORPRI	%	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-
07 1 02 01 04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR					625,928,000		2,402,560,000		2,402,560,000		2,402,560,000		2,402,560,000
07 1 02 01 04 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Keluaran : 1 Jumlah pelatihan yang dilaksanakan	Kegiatan	1	10	625,928,000	10	2,402,560,000	10	2,402,560,000	10	2,402,560,000	10	2,402,560,000
		Hasil : Persentase Peserta yang mendapatkan Nilai Post Test >=75	%		85		85		85		85		85	
07 1 02 01 04	1 Pelatihan Implementasi Mutu	Keluaran : 1 Jumlah peserta pelatihan Implementasi Mutu	orang	0	30		30		30		30		30	
		Hasil : Persentase Peserta yang mendapatkan Nilai Post Test >=75	%		85		85		85		85		85	
07 1 02 01 04	2 Pelatihan Audit Eksternal Annual Surveilans	Keluaran : 1 Jumlah peserta pelatihan Audit Eksternal	orang	0	53		53		49	56,000,000	53		53	
		Hasil : Persentase Peserta yang mendapatkan Nilai Post Test >=75	%		85		85		85		85		85	
07 1 02 01 04	3 Pelatihan TOC Bapelkes	Keluaran : 1 Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan TOC Bapelkes	orang	0	30		30		30		30		30	
		Hasil : Persentase Peserta yang mendapatkan Nilai Post Test >=75	%		85		85		85		85		85	
07 1 02 01 04	4 Pelatihan Jabatan Fungsional Epidemiologi	Keluaran : 1 Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan Jabatan Fungsional Epidemiologi	orang	0	30		30		0	-	30		30	
		Hasil : Persentase Peserta yang mendapatkan Nilai Post Test >=75	%	0	85		85		0	-	85		85	
07 1 02 01 04	5 Pelatihan Jabatan Fungsional Puskesmas	Keluaran : 1 Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan Fungsional Puskesmas	orang	0	30		30		0	-	30		30	
		Hasil : Persentase Peserta yang mendapatkan Nilai Post Test >=75	%	0	85		85		0	-	85		85	
07 1 02 01 04	6 Pelatihan Jabatan Fungsional Adminkes	Keluaran : 1 Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Jabatan Fungsional Adminkes	orang	0	30		30		0	-	30		30	
		Hasil : Persentase Peserta yang mendapatkan Nilai Post Test >=75	%	0	85		85		0	-	85		85	
07 1 02 01 04	7 Pelatihan Assesment Akreditasi	Keluaran : 1 Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Assesment Akreditasi	orang	0	30		30		0	-	30		30	
		Hasil : Persentase Peserta yang mendapatkan Nilai Post Test >=75	%	0	85		85		0	-	85		85	
07 1 02 01 04	8 Pelatihan Jabatan Fungsional Sanitarian	Keluaran : 1 Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Jabatan Fungsional Sanitarian	orang	0	30		30		0	-	30		30	
		Hasil : Persentase Peserta yang mendapatkan Nilai Post Test >=75	%	0	85		85		0	-	85		85	

Kode	Fungsi/Bidang/Urusan Pemerintahan/ Sub Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Sasaran dan Pagu Indikatif										
				Tahun 2013	Tahun-2014		Tahun-2015		Tahun-2016		Tahun-2017		Tahun-2018	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
07 1 02 01 04	9 Pelatihan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional	Keluaran : 1 Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional	orang	0	40	40	40	0	-	40	40			
		Hasil : Persentase Peserta yang mendapatkan Nilai Post Test >=75	%	0	85	85	85	0		85	85			
07 1 02 01 04	11 Pertemuan Kemitraan Bapelkes Tingkat Nasional	Keluaran : 1 Jumlah Struktural dan WI yang mengikuti Pertemuan Kemitraan Bapelkes Tingkat Nasional	orang	0	5	5	5	9	100,263,000	5	5			
		Hasil : Jumlah pegawai yang meningkat pengetahuan tentang manajemen mutu bapelkes	orang	0	5	5	5	9		5	5			
07 1 02 01 04	12 Pembayaran Jasa Tenaga Dokter/Dokter PTT Daerah	Keluaran : 1 Jumlah tenaga dokter/dokter gigi PTT yang mendapat honor PTT Daerah	orang	0	30	30	30	30		30	30			
		Hasil : Persentase ketersediaan tenaga dokter dan dokter gigi	%	0	100	100	100	100		100	100			
07 1 02 01 04	13 Pembayaran Jasa tenaga Bidan PTT	Keluaran : 1 Jumlah tenaga bidan PTT yang mendapatkan honor PTT Daerah	orang	0	24	24	24	24		24	24			
		Hasil : 1		0										
07 1 02 01 04	14 Pembelajaran Peningkatan Manajemen Mutu Bapelkes	Keluaran : 1 Jumlah pegawai yang mengikuti kursus/pelatihan singkat	orang	0	20	20	20	25	125,000,000	20	20			
		Hasil : 1 Persentase pegawai yang meningkat pengetahuannya tentang Manajemen Mutu Bapelkes	%	0	100	100	100	100		100	100			
07 1 02 01 04	15 Pembinaan Laboratorium Lapangan	Keluaran : 1 Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan lab.lapangan	Kab/kota	0	0	0	0	2	78,000,000					
		Hasil : 1												
07 1 02 01 04	16 Analisis Kebutuhan Diklat (TNA) ke Kab/Kota	Keluaran : 1 Jumlah kab/kota yang dilakukan analisis Kebutuhan Diklat	Kab/kota	0	0	0	0	4	48,000,000					
		Hasil : 1												
07 1 02 01 04	17 Evaluasi Pasca Pelatihan ke Kab/Kota	Keluaran : 1 Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Evaluasi Pasca Pelatihan	Kab/kota	0	0	0	0	14	84,000,000					
		Hasil : 1												
07 1 02 01 04	18 Sensitivity Training	Keluaran : 1 Jumlah Petugas Bapelkes yang dilatih	orang	0	0	0	0	30	90,000,000					
		Hasil : 1												
07 1 02 01 04	20 Serivikasi ISO, Initial Assesment	Keluaran : Jumlah petugas bapelkes yang dilatih tentang ISO							60,000,000					
		Hasil : 1												
07 1 02 01 04	21 Pembinaan Akreditasi Pelatihan	Keluaran : Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan akreditasi pelatihan	kab/kota	0	0	0	0	17	85,000,000					
		Hasil : 1												
07 1 02 01 04	22 Pelatihan ESQ	Keluaran : Jumlah petugas bapelkes yang mendapatkan pelatihan ESQ	Orang					44	132,000,000					
		Hasil : 1												
07 1 02 01 04	23 Pelatihan House Keeping	Keluaran : Jumlah petugas bapelkes yang mendapatkan pelatihan house keeping						4	56,000,000					
		Hasil : 1												
07 1 02 01 04	24 Pelatihan Public Speaking	Keluaran : Jumlah petugas bapelkes yang mendapatkan pelatihan public speaking						10	30,000,000					
		Hasil : 1												
07 1 02 01 04	25 Pelatihan Presentasi Interaktif	Keluaran : Jumlah Petugas yang dilatih tentang presentase aktif						30	94,640,000					
		Hasil : 1												

Kode	Fungsi/Bidang/Urusan Pemerintahan/ Sub Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Sasaran dan Pagu Indikatif											
				Tahun 2013	Tahun-2014		Tahun-2015		Tahun-2016		Tahun-2017		Tahun-2018		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
07 1 02 01 04	26 Pelatihan Penyusunan Kurikulum dan Modul	Hasil : Keluaran : Jumlah WI yang mendapatkan pelatihan penyusunan kurikulum dan modul						10	70,000,000						
07 1 02 01 04	27 Pelatihan Pranata Laboratorium	Hasil : Keluaran : Jumlah petugas yang dilatih pranata laboratorium						30	94,640,000						
07 1 02 01 04	28 Pelatihan Fungsional Perawat	Hasil : Keluaran : Jumlah perawat yang mendapatkan pelatihan jafung perawat				30	96,140,000	30	96,140,000						
07 1 02 01 04	29 Pelatihan Fungsional Nutrisi	Hasil : Keluaran : Jumlah petugas yang mendapatkan pelatihan fungsional nutrisi				30	94,640,000	30	104,104,000						
07 1 02 01 04	30 Pelatihan Fungsional Bidan	Hasil : Keluaran : Jumlah bidan yang mendapatkan pelatihan fungsional bidan				30	96,140,000								
07 1 02 01 04	31 Pelatihan Fungsional Dokter	Hasil : Keluaran : Jumlah dokter yang mendapatkan pelatihan fungsional dokter				30	94,640,000								
		Hasil :													
07 1 02 01 05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		1 (satu) Laporan Kinerja dan Keuangan tahun 2009	Paket		3	44,580,000	3	158,730,000	3	158,730,000	3	158,730,000	3	158,730,000
07 1 02 01 05 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Keluaran :	1 Jumlah Dokumen Laporan dan Ikhtisar Kinerja Dinkes	Dokumen		3	44,580,000	3	158,730,000	3	158,730,000	3	158,730,000	3	158,730,000
			2 Jumlah Kab/Kota yang mendapat sosialisasi Renstra Dinkes	Kab/Kota		16		16		16		16		16	
			3 Jumlah Kab/Kota yang mendapat pembinaan, monev dan sinkronisasi pembangunan kesehatan	Kab/Kota		16		16		16		16		16	
		Hasil :	Meningkatnya nilai Evaluasi LAKIP Dinkes	Nilai	76.22	80		80		80		80		80	
07 1 02 01 15	PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	Hasil :	1 Persentase ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan	%	87	90	9,000,000,000	93	10,127,230,000	96	11,095,455,000	98	11,259,761,750	100	11,259,761,750
			2 Persentase pengadaan obat esensial	%	63.1	70		80		90		95		100	
			3 Persentase pengadaan obat generik	%	72.4	80		85		90		95		100	
			4 Persentase penulisan resep obat generik	%	95.7	96		97		98		99		100	
			5 Persentase Puskesmas yang memiliki Sarpras dan Aikes Sesuai Standar	%	-	-		-		70		80		90	
			6 Persentase RSUD yang memiliki Sarpras dan Aikes Sesuai Standar	%	-	-		-		75		85		95	
07 1 02 01 15 01	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Keluaran :	Jumlah obat buffer Stok yang tersedia	item	1		9,000,000,000	77	10,000,000,000	77	10,000,000,000	77	10,000,000,000	77	10,000,000,000
07 1 02 01 15 02	Permutakhiran Data Sarana dan Prasarana dan Peralatan Kesehatan	Keluaran :	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sarpras dan Aikes Kab/Kota	Dokumen	-	-	-	17	127,230,000	17	154,430,000	17	177,594,500	17	177,594,500
07 1 02 01 15 03	Pembinaan dan Pengawasan Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan di Puskesmas	Keluaran :	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan Pengawasan Sarpras dan Aikes Puskesmas	kab/kota	0	0	-	0	-	17	196,490,000	17	225,963,500	17	225,963,500

Kode	Fungsi/Bidang/Urusan Pemerintahan/ Sub Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Sasaran dan Pagu Indikatif											
				Tahun 2013	Tahun-2014		Tahun-2015		Tahun-2016		Tahun-2017		Tahun-2018		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
07 1 02 01 15 04	Pembinaan dan Pengawasan Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan di Rumah Sakit	Keluaran :	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan Pengawasan Sarpras dan Alkes Rumah Sakit	kab/kota	0	0	-	0	-	17	197,195,000	17	226,762,750	17	226,762,750
07 1 02 01 15 05	Monitoring, evaluasi Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan	Keluaran	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan movev Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	kab/kota	0	0	-	0	-	17	297,980,000	17	342,677,000	17	342,677,000
07 1 02 01 15 06	Pemeliharaan & Pemeriksaan Kalibrasi Alat Kesehatan	Keluaran	Jumlah buku panduan yang dicetak	inststitusi	0	0	-	0	-	75	249,360,000	85	286,764,000	95	286,764,000
07 1 02 01 16	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Hasil :	1 Persentase penduduk yang memanfaatkan puskesmas	%	15	15	207,566,000		114,664,000		1,923,661,000		114,664,000		114,664,000
			2 Persentase sarana kesehatan dengan kemampuan laboratorium kesehatan	%	90,8	92									
			3 Persentase penduduk yang memanfaatkan RS	%	24	15			15			15			15
			4 Persentase RS Menyelenggarakan 4 Yankes Spesialis Dasar	%	57	67			77			97			100
			5 Persentase Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota	%	58	65									
			6 Persentase Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	%	30	40									
07 1 02 01 16 02	Pelayanan Kesehatan Bagi Pengungsi Bencana	Keluaran :	1 Persentase Kejadian Bencana yang dilakukan pelayanan Kesehatan	Kali		100	207,566,000	100	114,664,000	100	114,664,000	100	114,664,000	100	114,664,000
07 1 02 01 16	Pelayanan Kesehatan Olah Raga B2T3 di Luar Gedung dan Institusi di Kota Palembang	Keluaran :	2 Jumlah pelayanan Kesehatan Olahraga B2T3 di Luar Gedung dan Institusi di Kota Palembang	Kali						80	75,100,000				
07 1 02 01 16	Pemilihan Sekolah Sehat Tingkat Provinsi Sumatera Selatan	Keluaran :	3 Jumlah sekolah yang mengikuti pemilihan Sekolah Sehat Tingkat Provinsi	Sekolah						51	182,386,000				
07 1 02 01 16	Fasilitasi Tim Kesehatan Dalam Rangka Hari Pangan Sedunia	Keluaran :	4 Jumlah Tim Kesehatan yang mendukung Pelaksanaan Hari Pangan Sedunia	Tim						5	775,730,000				
07 1 02 01 16 09	Fasilitasi Tim Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Keluaran :	5 Jumlah petugas yang difasilitasi pelaksanaan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Orang						8	151,800,000				
07 1 02 01 16 11	Pelayanan Kesehatan Lapangan pada Event-Event Nasional	Keluaran :	6 Jumlah Even Nasional/Internasional yang mendapatkan pelayanan Kesehatan Lapangan	event						5	67,500,000				
07 1 02 01 16 12	Pelayanan Penjangkaran donor darah	Keluaran :	7 Jumlah orang yang dilakukan penjangkaran Donor Darah	Orang						1500	149,681,000				
07 1 02 01 16 15	Lombah Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi (RSSIB)	Keluaran :	8 Jumlah rumah sakit yang mengikuti lomba RSSIB	RS						23	261,200,000				
07 1 02 01 16 16	Monitoring Evaluasi Program RSSIB dan SP2RS Rumah Sakit	Keluaran :	9 Jumlah Dokumen Movev Program RSSIB dan SP2RS Rumah Sakit	Dokumen						2	145,600,000				
	Penarikan dan Penugasan Dokter/Dokter Gigi PTT	Keluaran :	10 Jumlah Dokter PTT yang mendapatkan penarikan dan penugasan	Orang						60	94,000,000				
07 1 02 01 17	PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Hasil :					168,100,000		168,100,000		168,100,000		168,100,000		168,100,000

Kode	Fungsi/Bidang/Urusan Pemerintahan/ Sub Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Sasaran dan Pagu Indikatif										
				Tahun 2013	Tahun-2014		Tahun-2015		Tahun-2016		Tahun-2017		Tahun-2018	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
07 1 02 01 17 01	Peningk pemberdayaan konsumen/masy di bidang obat makanan	Keluaran :				94,800,000		94,800,000		94,800,000		94,800,000		94,800,000
07 1 02 01 17 02	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	Keluaran :			-		-		-		-		-	
07 1 02 01 17 05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Keluaran :			-		-		-		-		-	
07 1 02 01 17 06	Peningkatan Pengawasan Obat Asli Indonesia	Keluaran :				73,300,000		73,300,000		73,300,000		73,300,000		73,300,000
07 1 02 01 16	Pengadaan Banner dan Roll Up	Keluaran :	Jumlah Banner Roll Up	Buah			159	94,800,000						
07 1 02 01 16	Pemetaan Obat Asli / Tradisional Indonesia	Keluaran :	Jumlah Dokumen Pemetaan Obat Asli/Tradisional Indonesia	Dokumen			1	73,300,000						
07 1 02 01 19	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Hasil :	1 80% Cakupan Desa Siaga Aktif	%	60	65		9,566,824,000		250,000,000		10,850,000,000		10,850,000,000
			2 65% Rumah Tangga PHBS	%	46%	50								
			3 40% Posyandu Purnama Mandiri	%	20%	30								
07 1 02 01 19 01	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Keluaran :						150,500,000		250,000,000		250,000,000		250,000,000
07 1 02 01 19 02	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Keluaran :	1 Jumlah kabupaten/ 1 paket publikasi tentang pola hidup sehat kepada masyarakat melalui media elektronik, cetak, poster, balho, billboard, dll	Paket	1	1		233,824,000		-		247,824,000		247,824,000
07 1 02 01 19 03	Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan	Keluaran :						-		-		126,300,000		126,300,000
07 1 02 01 19 04	Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan	Keluaran :						-		-		225,876,000		225,876,000
07 1 02 01 19 05	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kesehatan	Keluaran :						9,182,500,000		-		10,000,000,000		10,000,000,000
07 1 02 01 19 06	Lomba Desa PHBS Tingkat Provinsi	Keluaran :	1 Jumlah desa yang mengikuti Lomba Desa PHBS Tingkat Provinsi	Desa			34	195,650,000						
07 1 02 01 19 07	Penyebarluasan Informasi Pola Hidup Sehat	Keluaran :	1 Jumlah media yang digunakan untuk penyebarluasan informasi Pola Hidup Sehat	Media			3	294,824,000						
07 1 02 01 19 08	Penyediaan Media Promosi Kesehatan	Keluaran :	1 Jumlah Media Promosi Kesehatan yang diadakan	Buah			120	158,400,000						
07 1 02 01 19 09	Lomba Desa Siaga Tingkat Provinsi	Keluaran :	1 Jumlah desa yang mengikuti Lomba Desa Siaga Tingkat Provinsi	Desa			34	195,650,000						
07 1 02 01 19 10	Lomba Posyandu Berprestasi Tingkat Provinsi	Keluaran :	1 Jumlah Posyandu yang mengikuti lomba Posyandu	Posyandu			34	195,650,000						
07 1 02 01 20	PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	Hasil :	1 Persentase Balita Gizi Buruk	%	0.14	< 1		5,728,238,100		< 1	6,599,285,500		< 1	6,123,365,500
			2 Persentase Balita Gizi Kurang	%	5.38	15				13			11	9
			3 Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan Tablet Fe	%	87.5	95				96			98	99
			4 Persentase bayi 0-6 yang mendapatkan ASI Eksklusif	%	61.3	70				72			75	77
			5 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	%	100	100				100			100	100
			6 Persentase Balita yang ditimbang (D/S)	%	71	80				85			90	95
			7 Persentase Balita 6-59 bulan mendapat kapsul vitamin A	%	86.1	85				87			90	92
07 1 02 01 20 01	Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi	Keluaran :						109,976,300		149,210,000		141,210,000		123,250,000
			1 Jumlah Buku Peta Gizi dalam Angka	buku			550	49,500,000		550		52,250,000		550

Kode	Fungsi/Bidang/Urusan Pemerintahan/ Sub Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Sasaran dan Pagu Indikatif											
				Tahun 2013	Tahun-2014		Tahun-2015		Tahun-2016		Tahun-2017		Tahun-2018		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		2 Jumlah Leaflet Standar Gizi Balita WHO yang tersedia	lembar	6800	25,160,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
		3 Jumlah Leaflet diet penyakit yang tersedia	lembar	10987	27,467,500	0	-	0	-	0	-	10987	30,000,000		
		4 Jumlah Pertemuan Kerja LP & LS Penyusunan Peta Gizi	Kali	0	-	2	8,000,000		-		-		-		-
		5 Jumlah Laporan Kegiatan Pemutakhiran Data Penyusunan Peta Gizi	Dokumen	0	-	1	82,960,000	1	82,960,000		-	1	82,960,000		-
		6 Jumlah Form Balok SKDN	lembar	0	-	0	-	0	-	26000	65,000,000	0	-		-
		7 Tersedianya bahan administrasi dalam 1 tahun	Paket	1	7,848,800	1	6,000,000	1	6,000,000	1	6,000,000	1	6,000,000	1	6,000,000
07 1 02 01 20 02	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Keluaran :			2,300,000,000		2,281,410,000		2,309,310,000		2,368,060,000		2,376,335,000		
		1 Jumlah Susu Balita Kurang Gizi	Kotak	26279	1,056,415,800	26279	1,085,400,000	26279	1,093,500,000	26279	1,113,750,000	26279	1,113,750,000		
		2 Jumlah makan padat gizi (biscuit) bagi bumil KEK	Bks	80194	368,892,400	80194	370,300,000	80194	378,350,000	80194	378,350,000	80194	382,375,000		
		3 Jumlah makanan padat gizi (biscuit) bagi Balita gizi kurang	Bks	78986	600,293,600	78986	608,000,000	78986	616,000,000	78986	654,500,000	78986	654,500,000		
		4 Jumlah Taburia	Sachet	146625	120,965,625	146625	123,750,000	146625	127,500,000	146625	127,500,000	146625	131,750,000		
		5 Jumlah Dokumen Data Sasaran PMT & Vitamin	Dokumen	1	71,460,000	1	-	1	-	1	82,960,000	1	-		-
		6 Jumlah Dokumen Laporan Checking Pendistribusian barang Gizi	Dokumen	1	71,460,000	1	82,960,000	1	82,960,000	0	-	1	82,960,000		
		7 Tersedianya bahan administrasi dalam 1 tahun	Paket	1	10,512,575	1	11,000,000	1	11,000,000	1	11,000,000	1	11,000,000	1	11,000,000
07 1 02 01 20 03	Penanggulangan Kurang Gizi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	Keluaran :			383,111,000		672,960,000		537,611,000		320,571,000		399,611,000		
		1 Jumlah Lengthboard/alat ukur panjang badan bayi yang tersedia	unit	622	155,500,000		-		-		-		-		-
		2 Jumlah SD/MI yang dipantau garam beryodium	SD/MI	900	227,611,000		-		237,611,000		-		237,611,000		-
		3 Jumlah Microtise yang tersedia	unit		-	5000	250,000,000		-		-		-		-
		4 Jumlah dacin yang tersedia	unit		-		-	1000	300,000,000		-		-		-
		5 Jumlah Dokumen Bimtek Penanggulangan Anemia di Kab/Kota	Dokumen		-	1	82,960,000		-	1	82,960,000		-		-
		6 Jumlah SD/MI yang dipantau tinggi badan anak yang baru masuk sekolah	SD/MI		-		-		-	900	237,611,000		-		-
		7 Jumlah Media KIE (rotary Light box)			-	340	340,000,000		-		-		-		-
		8 Jumlah buku saku yang tersedia			-		-		-		-	6000	60,000,000		
		9 Jumlah X Banner yang tersedia			-		-		-		-	340	102,000,000		
07 1 02 01 20 04	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	Keluaran :			142,063,500		392,125,500		147,103,500		222,103,500		177,103,500		
		1 Jumlah petugas gizi teladan terpilih	orang	6	100,175,500		100,175,500		100,175,500		100,175,500		100,175,500		
		2 Jumlah baju kaos kadarzi	stel	312	24,960,000		-		-		-		-		-
		3 Jumlah peserta yang mengikuti seminar sehari Pekan ASI Sedunia	orang	100	16,928,000		-		16,928,000		16,928,000		16,928,000		
		4 Jumlah KMS Balita	lembar	0	-		90,000,000		-		105,000,000		-		-
		5 Jumlah Radio Spot yang diputar	Spot	0	-		-		30,000,000		-		60,000,000		

Kode	Fungsi/Bidang/Urusan Pemerintahan/ Sub Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Sasaran dan Pagu Indikatif											
				Tahun 2013	Tahun-2014		Tahun-2015		Tahun-2016		Tahun-2017		Tahun-2018		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		6 Jumlah peserta Studi Pembelajaran Pembuatan Perda ASI ke Prov. Sulawesi Selatan	orang	20	20			201,950,000							
07 1 02 01 21	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	Hasil :	1 Persentase Rumah Sehat	%	64.7	67.7	1,060,416,200	70.8	2,083,972,949	73.9	3,077,863,000	76.4	3,559,350,000	80	4,513,446,000
			2 Persentase TTU Sehat	%	63.3	66.6		69.9		73.3		76.7		80	
			3 Persentase Keluarga yang memiliki Akses Air Bersih	%	64	67.2		70.4		73.6		76.8		80	
			4 Persentase TPM Sehat	%	63.3	66.7		70.0		73.3		76.7		80	
			5 Persentase Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	%	12.4	25.9		39.4		53.0		66.5		80	
07 1 02 01 21 01	Peningkatan Kualitas Lingkungan Sehat, Perilaku Sehat dan Pemberdayaan Masyarakat	Keluaran :	1 Dokumen Rencana Kerja Program Kesehatan tahun 2015	Dokumen		1	244,411,700	1	476,596,932	1	703,896,000	1	818,896,000	1	1,048,896,000
			2 Jumlah Kaporit	Galon		60									
			3 Jumlah Penjernih Air Cepat (PAC)	Sak		30									
			4 Jumlah masker	Box		400									
			5 Jumlah kab/kota yang mendapat bimtek, monev program Penyehatan TP2 Pesisida	Kab/Kota		16		17		17		17		17	
			6 Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan sanitasi pondok pesantren	orang		32									
07 1 02 01 21 02	Peningkatan Akses Sarana Sanitasi	Keluaran :	1 Jumlah Puskesmas/Pustu tersedia Sarana Air Bersih	unit		10	396,940,000		787,421,017		1,162,959,000		1,331,596,000		1,705,596,000
			2 Jumlah Pondok Pesantren yang tersedia sarana sanitasi	paket		1									
			3 Jumlah Soap Dispencer untuk CTPS	buah		1700									
07 1 02 01 21 03	Peningkatan Program Pamsimas dan PPSP	Keluaran :	1 Jumlah kab/kota yang mendapatkan bimtek Program Pamsimas	Kab/kota		10	341,184,500		666,615,000		984,536,000		1,145,386,000		1,467,086,000
			2 Jumlah konsultasi ke Pusat Program Pamsimas	Kali		5									
			3 Jumlah Kab/kota yang mendapatkan bimtek dan supervisi program PPSP	Kab/kota		9									
			4 Jumlah pertemuan koordinasi PPSP tingkat nasional yang diikuti	Kali		5									
			5 Jumlah Peserta Pelatihan Study EHRA	Orang		27									
07 1 02 01 21	Peningkatan Pengelolaan Kualitas Sanitasi Tempat-Tempat Umum	Keluaran :	1 Jumlah kab/kota yang mendapatkan bimtek, monev Program Penyehatan TTU	Kab		17	38,940,000	17	76,670,000	17	113,236,000	17	131,736,000	17	145,934,000
			2 Jumlah kab/kota yang mendapatkan Technical Guidance Healthy Market	Kab		17		17		17		17		17	
07 1 02 01 21 04	Peningkatan Hygiene dan Sanitasi Pangan yang memenuhi Syarat Kesehatan	Keluaran :	1 Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Bimtek, Supervisi dan Monev Pemetaan HS Pangan yang sehat	Kab/Kota		16	38,940,000		76,670,000		113,236,000		131,736,000		145,934,000
			2 Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Bimtek, Supervisi dan Monev Kantin Sehat	Kab/Kota		16									
07 1 02 01 22	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	Hasil :	1 Persentase Desa Mencapai UCI (Universal Child Immunisation)	%	95	95	5,936,422,500	95	4,723,412,000	95	7,955,242,000	95	7,129,445,000	95	8,652,693,500

Kode	Fungsi/Bidang/Urusan Pemerintahan/ Sub Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Sasaran dan Pagu Indikatif											
				Tahun 2013	Tahun-2014		Tahun-2015		Tahun-2016		Tahun-2017		Tahun-2018		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		2 Persentase Penemuan dan Penanganan Penderita HIV/AIDS	%	100	100		100		100		100		100		100
		3 Persentase Penemuan Penderita Pneumonia Balita	%	27	100		100		100		100		100		100
		4 Case Notification Rate (CNR)	per 100.000 pddk	113	119		125		132		139		146		146
		5 Persentase Pelayanan Penderita Diare di Sarana Kesehatan	87.3	100	100		100		100		100		100		100
		6 Annual Parasit Incidence (API)	per 100.000 pddk	0.5	0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5
		7 Angka Kesembuhan Penyakit TB Paru BTA (+)	%	86	87		88		89		90		91		91
		8 Angka Kesakitan DBD	per 100.000 pddk	52	51		50		49		48		47		47
		10 Persentase Desa yang terkena KLB yang ditangani < 24 jam	%	100	100		100		100		100		100		100
		11 Angka Acute Flaccid Paralysis (AFP) Non Polio Rate Anak Usia < 15 tahun	per 100.000 anak	>= 2	>= 2		>= 2		>= 2		>= 2		>= 2		>= 2
		12 Angka Kematian Jema'ah Haji	per 1000 jema'ah	2.8	< 2		< 2		< 2		< 2		< 2		< 2
		13 Persentase Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular	%		100		100		100		100		100		100
07 1 02 01 22 01	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	Keluaran :	1 Jumlah Lokasi yang dilakukan fogging (Penyemprotan)	focus	50	97	385,967,500	170	385,968,000	135	33,450,000	150	385,968,000	165	385,170,000
07 1 02 01 22 02	Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging	Keluaran :	1 Jumlah alat fogging	Unit	2	7	196,950,000	0	-	8	229,000,000	10	285,000,000	10	285,000,000
07 1 02 01 22 03	Pengadaan vaksin penyakit menular	Keluaran :	1 Jumlah Vaksin Anti Rabies (VAR)	vial		100	151,750,000	800	151,750,000	1500	270,000,000	2000	360,000,000	2000	360,000,000
07 1 02 01 22 05	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Keluaran :	1 Jumlah Reagen HIV	Box		208	899,100,000	10000	50,000,000	5000	250,000,000	5000	250,000,000	5000	250,000,000
07 1 02 01 22 06	Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik	Keluaran :	1 Jumlah Kelambu bersektisida yang tersedia	kelambu		3293	553,100,000	272	501,800,000	4100	1,110,000,000	4400	430,000,000	4400	1,242,500,000
07 1 02 01 22 08	Peningkatan Imunisasi	Keluaran :	1 Jumlah Lemari ES	unit	15		1,401,681,500		1,343,626,000		1,702,851,000		1,702,851,000		1,702,851,000
07 1 02 01 22	Pemilihan Juru Imunisasi Teladan Tingkat Provinsi	Keluaran :	Jumlah Juri yang terpilih sebagai Juri Teladan	orang	0	17		17	144,628,000	17	144,628,000	17	144,628,000	17	144,628,000
07 1 02 01 22	Validasi data program Imunisasi	Keluaran :	Jumlah Dokumen hasil Validasi data program imunisasi	dokumen	17	17	120,459,500	17	61,600,000	17	97,223,000	17	97,223,000	17	97,223,000
07 1 02 01 22	Pengadaan Lemari Penyimpanan Vaksin, vaksin Carrier dan ADS	Keluaran :	Jumlah Lemari Penyimpanan Vaksin dan Vaksin Carrier	buah	10/139.855		1,188,222,000	10/50/200.000	1,040,175,000	10/50/200.000	1,400,000,000	10/50/200.000	1,400,000,000	10/50/200.000	1,400,000,000
07 1 02 01 22	Monitoring EVM (Effective Vaccine Management)	Keluaran :	Jumlah Dokumen hasil Monev Program Imunisasi	dokumen			-	17	61,600,000	17	61,600,000	17	61,600,000	17	61,600,000
07 1 02 01 22	Peningkatan Surveilans Campak Menuju Eliminasi Campak 2018	Keluaran :	1 Frekuensi pengiriman spesimen ke laboratorium nasional	kali	60	60	6,000,000	80	9,600,000	20	2,400,000	20	2,400,000	20	2,400,000
			1 Pembelian Alat Pengambilan Spesimen Campak	paket	0	15	25,995,000	2	3,669,000	17	32,630,000	0	-		-
			Pembelian spesimen Carier	buah	0	0	-	11	38,500,000	10	35,000,000	0	-		0
07 1 02 01 22	Penanganan KLB Penyakit/Keracunan dan Wabah	Keluaran :	Kejadian KLB yang ditanggulangi kurang dari 24 jam sejak KLB terjadi	%	100	100	84,652,000	100	66,500,000	100	73,150,000	100	80,465,000	100	88,511,500

Kode	Fungsi/Bidang/Urusan Pemerintahan/ Sub Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Sasaran dan Pagu Indikatif											
				Tahun 2013	Tahun-2014		Tahun-2015		Tahun-2016		Tahun-2017		Tahun-2018		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
07 1 02 01 22	Provinsi yang melakukan penguatan Kewaspadaan Dini KLB Penyakit	Keluaran :	Peningkatan kapasitas TGC di Provinsi dan Kab/Kota	Dokumen	0	0	-	0	-	17 Kab/Kota	100,000,000	0	-	0	-
07 1 02 01 22	Koordinasi teknis penanggulangan KLB penyakit Menular dan Keracunan Makanan.		Jumlah Kab/Kota dan UPT yang mengikuti koordinasi teknis	17 Kab/Kota dan 4 UPT	0	0	-	0	-	17 Kab/Kota, dan 4 UPT	80,000,000	17 Kab/Kota, dan 4 UPT	100,000,000	17 Kab/Kota, dan 4 UPT	120,000,000
07 1 02 01 22	Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Surveilans Epidemiologi Penyakit	Keluaran :	1 Jumlah Dokumen hasil Monev	Kab/Kota	9	17	166,164,000	17	166,164,000	17	166,164,000	17	166,164,000	17	166,164,000
07 1 02 01 22	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Posbindu Penyakit Tidak Menular	Keluaran :	Jumlah Dokumen hasil monev	dokumen				1	35,000,000	1	40,000,000	1	45,000,000	1	50,000,000
07 1 02 01 22	Pendampingan Program Vaksinasi Jema'ah Haji ke Kabupaten/Kota serta monev Peningkatan kapasitas petugas haji di puskesmas	Keluaran :	Jumlah kab/kota yang dilakukan pendampingan vaksinasi jema'ah haji	kab/kota				17	128,176,000						
07 1 02 01 22 09	Sosialisasi Surveilans Congenital Rubella Syndrome (CRS) di RS	Keluaran :	1 Jumlah RS yang disosialisasi tentang pelaksanaan surveilans CRS	RS	0	-	-	0	-	3	10,440,000	3	10,440,000	3	10,440,000
07 1 02 01 22 10	Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit	Keluaran :	1 Jumlah 6 jenis formulir KIE yang dicetak	Lembar		900	418,675,000	7	196,950,000	900	824,000,000	900	375,000,000	900	898,500,000
07 1 02 01 22 12	Pelayanan Pencegahan dan Pemberantasan Kesehatan Matra	Keluaran :	1 Jumlah peserta yang mengikuti seminar sehari menuju Jama'ah Haji Sehat	orang		140	190,000,000		190,000,000		190,000,000		190,000,000		190,000,000
07 1 02 01 22 14	Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Keluaran :	1 Jumlah masyarakat yang dilakukan pemeriksaan IVA dan CBE untuk deteksi dini Ca Cervx dan Ca Payudara	orang		200	147,706,000	200	147,706,000	200	147,706,000	200	147,706,000	200	147,706,000
			2 Jumlah Kab/ Kota yang memiliki peraturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	kab/kota		30	-	35	-	40	75,000,000	45	100,000,000	50	125,000,000
			3 Jumlah fasyankes primer yang melaksanakan paya deteksi dini tindak lanjut dini dan rehabilitasi atau pallatif PTM	pkm		10	-	15	-	20	50,000,000	25	75,000,000	30	100,000,000
07 1 02 01 22	Penemuan dan Pelacakan Dini Kasus Kusta	Keluaran :	Jumlah Dokumen Hasil Penemuan dan Pelacakan Dini Kasus Kusta	dokumen						17	80,000,000	17	80,000,000	17	80,000,000
07 1 02 01 22	Evaluasi data dan pelaporan Program DBD	Keluaran :	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi data dan Pelaporan DBD	dokumen						17	75,000,000	17	75,000,000	17	75,000,000
07 1 02 01 22	Pemantauan Pengendalian Diare dan Monitoring SKD Diare	Keluaran :	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Pengendalian Diare dan Monitoring SKD Diare	dokumen						17	75,000,000	17	75,000,000	17	75,000,000
07 1 02 01 22	Penemuan dan Pelacakan Dini Kasus HIV-AIDS dan IMS	Keluaran :	Jumlah Dokumen Hasil Penemuan dan Pelacakan Dini kasus HIV-AIDS dan IMS	dokumen						17	75,000,000	17	75,000,000	17	75,000,000
07 1 02 01 22	Bimbingan Teknis Pemeriksaan Mikroskopis dan tatalaksana kasus Malaria (OJT)	Keluaran :	Jumlah dokumen hasil bimtek	dokumen						17	75,000,000	17	75,000,000	17	75,000,000
07 1 02 01 22	Pertemuan Peningkatan Pengetahuan Pengelola Program dalam Pengendalian DBD	Keluaran :	Jumlah petugas yang dilakukan bimtek	orang						25	30,000,000	0	-	25	30,000,000
07 1 02 01 22	Bimbingan Teknis Sistem Informasi Tuberkulosis	Keluaran :	Jumlah dokumen hasil bimtek	dokumen						17	75,000,000	17	75,000,000	17	75,000,000
07 1 02 01 22	Pemberian makanan tambahan (PMT) pasien TB MDR	Keluaran :	Jumlah pasien TB yang diberikan makanan tambahan	orang						93	55,000,000	93	55,000,000	93	55,000,000
07 1 02 01 22	Peningkatan Kapasitas Petugas dalam pengendalian Hepatitis	Keluaran :	Jumlah petugas yang mengikuti peningkatan kapasitas dalam pengendalian hepatitis	orang						25	30,000,000	0	-	17	25,000,000
07 1 02 01 22	Pertemuan penguatan Program Filaria	Keluaran :	Jumlah petugas yang mengikuti pertemuan Penguatan Program Filaria	orang						25	30,000,000	25	30,000,000	25	30,000,000
07 1 02 01 22	Penemuan dan pelacakan kasus filaria	Keluaran :	Jumlah dokumen hasil penemuan dan pelacakan kasus filaria	dokumen						17	75,000,000	17	75,000,000	17	75,000,000
07 1 02 01 22	Bimbingan Teknis Program ISPA	Keluaran :	Jumlah dokumen hasil bimtek	dokumen						17	75,000,000	17	75,000,000	17	75,000,000

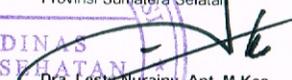
Kode	Fungsi/Bidang/Urusan Pemerintahan/ Sub Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Sasaran dan Pagu Indikatif											
				Tahun 2013	Tahun-2014		Tahun-2015		Tahun-2016		Tahun-2017		Tahun-2018		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
07 1 02 01 22	Workshop Petugas Pengelola Program DBD	Keluaran :	Jumlah petugas yang mengikuti workshop DBD	orang						40	50,000,000	0	-	40	50,000,000
07 1 02 01 22	Pertemuan Monitoring dan Evaluasi TB	Keluaran :	Jumlah petugas yang mengikuti pertemuan monev TB	orang						25	30,000,000	25	30,000,000	25	30,000,000
07 1 02 01 23	PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN	Hasil :	1 Persentase tenaga kesehatan yang mempunyai STR	%	70.3	75	372,764,125	80	372,764,125	85	372,764,125	90	372,764,125	95	372,764,125
			2 Persentase Tenaga Kesehatan yang Lulus Uji Kompetensi	%	54.4	55		60		65		70		75	
			3 Persentase Bidan yang telah Uji Kompetensi	%											
07 1 02 01 23 02	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Keluaran :		Buku	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07 1 02 01 23 04	Penyusunan naskah akademis standar pelayanan kesehatan	Keluaran :	1 buku Rentra 2009 - 2013 dan Renja 2010				372,764,125		372,764,125		372,764,125		372,764,125		372,764,125
07 1 02 01 23 06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Keluaran :	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan program	Paket			-		-		-		-		-
07 1 02 01 24	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN	Hasil :					333,330,000		333,330,000		333,330,000		333,330,000		333,330,000
07 1 02 01 24 01	Pelayanan operasi katarak	Keluaran :	8500 orang penduduk miskin mendapat pelayanan operasi katarak	orang		1000	333,330,000		333,330,000		333,330,000		333,330,000		333,330,000
07 1 02 01 24 10	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Keluaran :	14 kab/kota terpantau hasil operasi katarak dan teridentifikasi kebutuhan operasi katarak	Kab/kota		14	-		-		-		-		-
07 1 02 01 25	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARA PUSKESMAS, PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA	Hasil :	1 Persentase Penduduk yang memanfaatkan Puskesmas	%		20	-	20	2,000,000,000	20	2,000,000,000	20	2,000,000,000	20	2,000,000,000
			2 Persentase Puskesmas PONED	%	42	50		60		70		85		100	
			3 Persentase Puskesmas yang memiliki sarana prasarana sesuai standar	%		50		65		75		85		100	
07 1 02 01 25 04	Pengadaan puskesmas keliling	Keluaran :	1 Jumlah puskesmas keliling yang diserahkan ke Kab/Kota	paket		-	4	1,000,000,000	4	1,000,000,000	4	1,000,000,000	4	1,000,000,000	
07 1 02 01 25 10	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas keliling	Keluaran :	1 Jumlah Alat Kesehatan yang diserahkan ke kabupaten/kota	paket		-	4	1,000,000,000	4	1,000,000,000	4	1,000,000,000	4	1,000,000,000	
07 1 02 01 26	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARA RS, RS JIWA, RS PARU DAN RS MATA	Hasil :	1 Persentase Penduduk yang memanfaatkan Rumah Sakit	%	24	15	92,947,823,750	15	317,401,940,366	15	569,374,958,662	15	412,529,667,970	15	39,500,000,000
			2 Persentase RS menyelenggarakan 4 Pelayanan Kesehatan Spesialis Dasar	%	57	67		77		87		97		100	
			3 Persentase RSUD PONEK	%	23	45		55		70		80		100	
			4 Jumlah RS Pemerintah yang memiliki Bank Darah RS	RS	2	5		6		7		8		9	
07 1 02 01 26 01	Pembangunan rumah sakit	Keluaran :	1 Persentase Fisik pembangunan RS Provinsi Sumatera Selatan yang terbangun	%	15	25	38,568,338,950	50	198,285,620,000	75	451,924,958,662	100	296,479,667,970		-
07 1 02 01 26 17	Rehabilitasi bangunan rumah sakit	Keluaran :	1 Jumlah Bangunan Rumah Sakit yang dilakukan Rehab	Paket		1	262,250,000	1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000
07 1 02 01 26 18	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Keluaran :	1 Jumlah alat-alat kesehatan rumah sakit yang tersedia	Paket		1	34,900,000,000	1	20,456,320,366	1	35,000,000,000	1	35,000,000,000	1	35,000,000,000

Kode	Fungsi/Bidang/Urusan Pemerintahan/ Sub Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Sasaran dan Pagu Indikatif											
				Tahun 2013	Tahun-2014		Tahun-2015		Tahun-2016		Tahun-2017		Tahun-2018		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
07 1 02 01 26 20	Pengadaan ambulance/mobil jenazah	Keluaran :	1 Jumlah ambulance/mobil jenazah	Unit		7	1,418,750,000	4,00	1,000,000,000	3	750,000,000	3	750,000,000	0	-
07 1 02 01 26 22	Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)	Keluaran :	1 Jumlah perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu, dll)	Paket		1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	0	-	-	-
07 1 02 01 26 23	Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit	Keluaran :	1 Jumlah bahan-bahan logistik rumah sakit	Paket		1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	0	-	0	-
07 1 02 01 26 27	Pengadaan Alat Kesehatan Medis dan Non Medis	Keluaran :	1 Jumlah Alat Kesehatan Medis dan Non Medis yang tersedia	Paket		0	-	4	4,000,000,000	3	3,000,000,000	2	2,000,000,000	1	1,000,000,000
07 1 02 01 26 41	Pembangunan Rumah Sakit Pratama	Keluaran :	1 Jumlah RS Pratama yang dibangun	unit	0	1	14,960,000,000	6	89,760,000,000	5	74,800,000,000	5	74,800,000,000	0	-
07 1 02 01 26 42	Pengadaan Alat-Alat Rumah Sakit Program DAK Bidang Kesehatan	Keluaran :	1 Jumlah Alat Kesehatan Medis yang tersedia	Paket		1	2,438,484,800	1	3,000,000,000	1	3,000,000,000	1	3,000,000,000	1	3,000,000,000
07 1 02 01 27	PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RS/RS JIWA/RS PARU/RS MATA	Hasil :	1 paket pemeliharaan sarana dan prasarana di Rumah Sakit UPT Dinas Kesehatan	Paket			1,194,350,000		1,194,350,000		1,194,350,000		1,194,350,000		1,194,350,000
07 1 02 01 27 17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	Keluaran :					102,500,000		102,500,000		102,500,000		102,500,000		102,500,000
07 1 02 01 27 18	Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah	Keluaran :	1 paket pemeliharaan mobil ambulans	Paket			-		-		-		-		-
07 1 02 01 27 19	Pemeliharaan rutin/berkala meubeler rumah sakit	Keluaran :	1 paket pemeliharaan meubeler rumah sakit	Paket			30,000,000		30,000,000		30,000,000		30,000,000		30,000,000
07 1 02 01 27 32	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Keluaran :					1,061,850,000		1,061,850,000		1,061,850,000		1,061,850,000		1,061,850,000
07 1 02 01 28	PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN	Hasil :	1 100% masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu	%	100	100	2,863,640,000		2,863,640,000		2,863,640,000		2,863,640,000		2,863,640,000
			2 100% Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	%	50	60									
			3 100% Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	%	60	80									
07 1 02 01 28 08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Keluaran :	1 set Laporan pelaksanaan jamsoskes Sumsel Semesta	Jenis Laporan	0	16	-		-		-		-		-
07 1 02 01 28 09	Pertemuan Forum Komunikasi JPKM	Keluaran :	100% Terkoordinasinya badan-badan pelaksana jaminan kesehatan di Sumsel	%	0	25	55,000,000		55,000,000		55,000,000		55,000,000		55,000,000
07 1 02 01 28 11	Jaminan Sosial Kesehatan Masyarakat Sumsel Semesta	Keluaran :	100% Terjaminnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat sumsel yang belum memiliki jaminan kesehatan	%	0	100	2,408,640,000		2,408,640,000		2,408,640,000		2,408,640,000		2,408,640,000
07 1 02 01 28 12	Pengawasan Rujukan Puskesmas untuk Program Jamsoskes Sumsel Semesta	Keluaran :					400,000,000		400,000,000		400,000,000		400,000,000		400,000,000
07 1 02 01 29	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA	Hasil :	1 Persentase Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani	%	53.3	55	812,500,000	60	639,780,300	65	531,742,500	70	402,044,000	75	442,248,500
			2 Cakupan Kunjungan Bayi	%	90.4	92		94		96		98		100	
			3 Cakupan Pelayanan Anak Balita	%	78.7	80		81		82		83		84	
			4 Jumlah Kematian Neonatal	kasus	661	656		651		646		641		636	
			5 Jumlah Kematian Bayi	kasus	108	103		98		93		88		83	
			6 Jumlah Kematian Balita	kasus	50	52		50		48		46		44	
07 1 02 01 29 01	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak	Keluaran :	1 Jumlah balita sehat terpilih tingkat Sumatera Selatan	orang		6	137,061,000	6	150,767,100	6	165,844,000	6	182,429,000	6	200,672,000
			2 Jumlah peserta yang mengikuti Seminar Hari Anak Nasional	orang		150	32,527,000		-		-		-		-
			3 Jumlah peserta yang mengikuti Rakor dengan Perguruan Tinggi	orang		20	6,162,000	20	6,778,200		-		-		-

Kode	Fungsi/Bidang/Urusan Pemerintahan/ Sub Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Sasaran dan Pagu Indikatif											
				Tahun 2013	Tahun-2014		Tahun-2015		Tahun-2016		Tahun-2017		Tahun-2018		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		4 Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Movev	kab/kota		5	136,000,000	4	149,600,000							
		5 Jumlah Kohor bayi, balita, format MTBS, MTBM, Instrumen DDTK, Form DDTK yang dicetak	lembar		7725	335,750,000		-							
		6 Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan teknis	kab/kota		14	165,000,000	17	181,500,000	17	199,650,000	17	219,615,000	17	241,576,500	
		7 Jumlah Kab/kota yang dilakukan bimtek AMP	kab/kota		0	-	5	151,135,000	4	166,248,500					
07 1 02 01 30	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA	Hasil :				276,594,000		276,594,000		276,594,000		276,594,000		276,594,000	
07 1 02 01 30 01	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Keluaran :				276,594,000		276,594,000		276,594,000		276,594,000		276,594,000	
07 1 02 01 31	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN MAKANAN	Hasil :													
		1. Persentase Industri Rumah Tangga Pangan yang memenuhi persyaratan kesehatan	%	42.3%	45.0%	-	50%	884,800,000	55%	1,423,513,000	60%	1,423,513,000	65%	1,423,513,000	
07 1 02 01 31 01	Pengadaan Poster dan Leaflet Keamanan Makanan dan Minuman	Keluaran :	Jumlah poster dan leaflet keamanan makanan dan minuman	eksemplar	0.0	0.0	-	33809	220,867,000	33809	220,867,000	33809	220,867,000	33809	220,867,000
07 1 02 01 31 02	Pengawasan Keamanan Makanan di Restoran	Keluaran :	Jumlah restoran yang dilakukan pengawasan keamanan makanan di restoran	Restoran	0.0	0.0	-	68	103,187,000	70	150,000,000	70	150,000,000	70	150,000,000
07 1 02 01 31 03	Pengawasan Produk dan Industri Rumah Tangga Pangan	Keluaran :	Jumlah produk yang dilakukan pengawasan produk dan industri rumah tangga pangan	Produk	0.0	0.0	-	170	103,141,000	170	103,141,000	170	103,141,000	170	103,141,000
07 1 02 01 31 04	Pengadaan Test Kit Makanan	Keluaran :	Jumlah Test Kit Makanan	Box	0.0	0.0	-	143	200,200,000	143	200,200,000	143	200,200,000	143	200,200,000
07 1 02 01 31 05	Pengawasan Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya pada Makanan IRTP Hari Besar Keagamaan	Keluaran :	Jumlah produk yang dilakukan pengawasan penggunaan bahan kimia berbahaya pada makanan IRT Hari Besar Keagamaan	produk	0.0	0.0	-	340	144,505,000	340	144,505,000	340	144,505,000	340	144,505,000
07 1 02 01 31 06	Pembinaan dan Evaluasi Industri Rumah Tangga	Keluaran :	Jumlah IRTP yang dilakukan pembinaan dan evaluasi industri rumah tangga	IRTTP	0.0	0.0	-	51	112,900,000	51	120,000,000	51	120,000,000	51	120,000,000
07 1 02 01 31 07	Pembinaan dan Pengawasan Produk Pangan Industri Pabrik	Keluaran :	Jumlah kab/kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan Produk Pangan Industri Pabrik	Kab/kota	0	0	-	17	-	17	404,800,000	17	404,800,000	17	404,800,000
07 1 02 01 31 08	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Keluaran :	Jumlah kab/kota yang dilakukan monitoring dan evaluasi	Kab/kota	0	0	-	0	-	17	80,000,000	17	80,000,000	17	80,000,000
07 1 02 01 32	PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK	Hasil :													
		1 Persentase Kunjungan Ibu Hamil K4	%	93.5	95	1,214,009,500	96	1,034,366,500	98	1,017,717,385	99	822,931,124	100	771,329,081	
		2 Persentase Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Kompeten	%	93.1	94		95		98		99		100		
		3 Persentase Komplikasi Kebidanan yang ditangani	%	68.9	75		80		80		80		80		
		4 Persentase Pelayanan Nifas	%	91.9	95		96		98		99		100		
		5 Persentase Peserta KB Aktif	%	56.54	60		62		65		67		70		
		6 Persentase Kab/Kota yang memiliki minimal 4 Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan Reproduksi Terpadu (PKRT)	%	56.54	60		62		65		67		70		
		7 Jumlah Kematian Ibu	Kasus	144	142		140		138		136		134		

Kode	Fungsi/Bidang/Urusan Pemerintahan/ Sub Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Sasaran dan Pagu Indikatif											
				Tahun 2013	Tahun-2014		Tahun-2015		Tahun-2016		Tahun-2017		Tahun-2018		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
07 1 02 01 32 1	Pemantapan Pembinaan Pelaksanaan ANC Terpadu	Keluaran :	1 Jumlah kab/kota yang mengikuti pemantapan pelaksanaan ANC Terpadu	kab/kota	0	5	151,135,000	4	137,352,000	3	131,424,000	3	144,566,400	2	159,023,040
07 1 02 01 32 2	Pemilihan Bidan Teladan Tingkat Provinsi	Keluaran :	2 Jumlah Bidan Teladan yang terpilih	orang	3	3	148,050,000	3	116,382,000	3	131,483,400	3	144,631,740	3	159,094,914
07 1 02 01 32 3	Studi Pembelajaran program kesehatan ibu dan anak	Keluaran :	3 Jumlah peserta yang mengikuti aktualisasi sistem rujukan	orang	0	38	395,815,000	0	-	25	275,200,000	0	-	0	-
07 1 02 01 32 4	Pengadaan Formulir Kohor Ibu, KB, Form Laporan ANC Terpadu, Kartu Ibu.	Keluaran :	4 Jumlah kohort ibu, KB, form Laporan ANC Terpadu, Kartu Ibu yang dicetak	lembar	0	9600	240,000,000	0	-	0	-	-	-	-	-
07 1 02 01 32 5	Pembinaan Pemantapan Sistem Jejaring Rujukan Maternal dan Neonatal	Keluaran :	5 Jumlah kab/kota yang dibina dalam pemantapan sistem rujukan maternal dan neonatal	kab/kota	0	0	-	4	140,108,000	2	86,768,000	2	95,444,800	0	-
	Lomba Balita Sehat Indonesia Tingkat Provinsi	Keluaran :	Terpilainya balita sehat tingkat provinsi	orang		6	112,761,000	6	164,514,000	6	183,504,800	6	201,855,280	6	222,040,808
07 1 02 01 32 6	Rapat Koordinasi Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Keluaran :	6 Jumlah peserta yang mengikuti rakor	orang	0	0	-	20	6,162,000	0	-	20	6,162,000	0	-
07 1 02 01 32 7	Monitoring dan Evaluasi Program Kesehatan Anak		7 Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan teknis	kab/kota	0	2	166,248,500	2	242,100,000	2	201,160,685	2	221,276,754	3	221,276,754
07 1 02 01 32 8	Monitoring dan Evaluasi Audit Maternal Perinatal (Audit Kematian Ibu dan Bayi)	Keluaran :	1 Tersedianya laporan Audit Kematian Ibu dan Bayi	Dokumen				1	61,500,000						
07 1 02 01 32 9	Koordinasi DTPS KIA	Keluaran :	Jumlah peserta yang mengikuti koordinasi DTPS KIA	orang		0	-	20	166,248,500						
07 1 02 01 32 10	Pertemuan Forum Perguruan Tinggi Kesehatan dalam Pelayanan KIA	Keluaran :	Jumlah Peserta yang mengikuti pertemuan Forum PT Kesehatan dalam pelayanan KIA	orang	0	0	-	0	-	20	8,176,500	20	8,994,150	20	9,893,565
07 1 02 01 33	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Hasil :	1 Persentase Penduduk yang memanfaatkan puskesmas	%	<20%	<20%	536,000,000	<20%	507,916,700	<20%	2,436,587,250	<20%	2,585,905,175	<20%	2,505,068,959
			2 Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	Unit	0	0	-	0	-	2	-	10	-	10	-
07 1 02 01 33 01	Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Provinsi	Keluaran :	Jumlah tenaga kesehatan yang terpilih	orang	6	6	536,000,000	6	359,567,700	6	386,119,470	6	424,731,417	6	513,925,015
07 1 02 01 33 02	Pembinaan Pengelola Program Perkesmas	Keluaran :	Jumlah Kab/kota yang mendapatkan pembinaan program perkesmas	kab/kota	0	0	-	0	-	17	143,604,000	17	157,964,400	17	173,760,840
07 1 02 01 33 03	Pemantapan Akreditasi Puskesmas	Keluaran :	Jumlah kab/kota yang siap akreditasi puskesmas	kab/kota	0	0	-	17	91,439,700	17	285,324,000	17	313,856,400	17	345,242,040
07 1 02 01 33 04	Pelatihan TOT Pendamping Akreditasi Puskesmas	Keluaran :	Jumlah pengajar dan pendamping Akreditasi Puskesmas Provinsi	orang	0	0	-	0	-	6	241,163,000	6	265,279,300	0	-
07 1 02 01 33 05	Pelatihan Pendamping Akreditasi Puskesmas Kabupaten/Kota	Keluaran :	Jumlah pendamping akreditasi Puskesmas Kab/Kota	orang	0	0	-	0	-	36	89,048,000	34	97,952,800	34	107,748,080
07 1 02 01 33 06	Pembinaan Akreditasi Puskesmas	Keluaran :	Jumlah puskesmas yang dipersiapkan untuk akreditasi puskesmas	unit	0	0	-	0	-	17	285,324,000	17	313,856,000	17	345,242,040
07 1 02 01 33 07	Pemilihan Puskesmas Berprestasi Tingkat Provinsi	Keluaran :	Jumlah puskesmas yang memiliki kriteria kinerja puskesmas yang memenuhi persyaratan	unit	0	0	-	3	56,909,300	3	62,600,780	3	68,860,858	3	75,746,944
07 1 02 01 33 08	Monitoring dan Evaluasi Terpadu Program Pelayanan Kesehatan Dasar	Keluaran :	Jumlah kab/kota yang dilakukan Monev terpadu program pelayanan kesehatan dasar	kab/kota	0	0	-	0	-	17	943,404,000	17	943,404,000	17	943,404,000
07 1 02 01 34	PROGRAM PENANGANAN KELUARGA BERENCANA	Hasil :	Persentase PUS yang menjadi peserta KB Aktif	%	57%	60%	-	62%	733,459,600	65%	817,210,650	67%	748,732,380	70%	1,330,731,155
07 1 02 01 34 01	Peningkatan Konseling KB dengan menggunakan ABPK KB Bagi Pengelola Program KB	Keluaran :	Jumlah nakes yang ditingkatkan kapasitasnya	orang	0	0	-	45	180,652,100	0	-	0	-	0	-

Kode	Fungsi/Bidang/Urusan Pemerintahan/ Sub Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Capaian Sasaran dan Pagu Indikatif									
					Tahun-2014		Tahun-2015		Tahun-2016		Tahun-2017		Tahun-2018	
					Tahun 2013	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target		
07 1 02 01 34 02	Pemantapan Implementasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan KB	Keluaran	Jumlah peserta pemantapan implementasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan KB	orang	0	0	45	179,431,000	0	0	0	0	0	0
07 1 02 01 34 03	Evaluasi Pelaksanaan Program KB Pasca Persalinan	Keluaran	Jumlah Kab/Kota yang dilaksanakan evaluasi Program KB Pasca Persalinan	kab/kota	0	0	4	160,641,000	5	337,346,100	5	220,881,375	17	750,096,000
07 1 02 01 34 04	Fasilitasi dan Pembinaan Manajemen Pelayanan KB di Kabupaten/Kota	Keluaran	Jumlah kab/kota yang mendapatkan fasilitas dan pembinaan manajemen pelayanan KB	kab/kota	0	0	17	212,735,500	17	234,009,050	17	257,409,955	17	283,150,000
07 1 02 01 34 05	Monitoring Evaluasi Program KB Terpadu	Keluaran	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan moniev Program KB Terpadu	kab/kota	0	0	0	-	17	245,855,500	17	270,441,050	17	297,485,155
07 1 02 01 35	PROGRAM PENDIDIKAN KESEHATAN							1,311,410,000		1,311,410,000		1,311,410,000		1,311,410,000
07 1 02 01 35 01	Pendidikan Akademi Kesehatan Lingkungan							1,311,410,000		1,311,410,000		1,311,410,000		1,311,410,000

Palembang, Nopember 2014
 Kepala Dinas Kesehatan
 Provinsi Sumatera Selatan

 Dra. Lesty Nurainy, Apt, M.Kes
 NIP. 19620703 198903 2 002





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KESEHATAN

Jln. Dr. M. Ali Komp. RSUP Dr. Moch Hoesin Palembang 30126
Telp. (0711) 354915 Fax. (0711) 351749 - 321707

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 07 /KEP/KES/X/2014

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2014 - 2018

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

- MENIMBANG :
- bahwa setiap program dan upaya kesehatan yang dilaksanakan harus dapat diukur dan mempunyai indikator kinerja yang jelas dan mendapatkan informasi kinerja yang penting dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan di tingkat Provinsi;
 - bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu disusun Indikator Kinerja Utama kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan;
 - bahwa untuk pengukuran dan indikator kinerja utama tersebut, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan mengenai Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
- MENINGGAT :
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terlampir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- g. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
 - j. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - k. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan RI Tahun 2014 – 2018;
 - l. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
 - m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - o. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Peneetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - p. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Sistem Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 2 Seri E);
 - q. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
 - r. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 – 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E);
 - s. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);
 - t. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
 - u. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 29/KEP/KES/III/2010 tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 – 2013.
-

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN
Pertama : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan tentang **Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kesehatan** Di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
- Kedua : Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan terkait dengan program dan upaya kesehatan yang dilaksanakan dan sesuai dengan lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama adalah sebagai acuan ukuran kinerja bagi setiap bidang, UPT, Seksi dan unit lainnya dalam menyusun rencana kinerja tahunan dan anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, penyusunan laporan akuntabilitas kinerja serta dalam melakukan evaluasi pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan serta untuk memperoleh informasi kinerja yang penting.
- Keempat : Indikator Kinerja Utama yang disingkat dengan IKU adalah ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, dengan tetap mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 - 2018.
- Kelima : Berbagai program dan upaya kesehatan lainnya yang perlu dilaksanakan untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama tersebut menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 28 Nopember 2014

Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Sumatera Selatan,



Dra. Lesty Nurainy, Apt, M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19620703 198903 2 002

Lampiran

Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

Nomor : 7 /KEP/KES/X/2014 tanggal 28 November 2014.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
2. Tugas : Melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang kesehatan
3. Fungsi :
 - a. Penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang bina pelayanan kesehatan, bidang bina pengendalian masalah kesehatan, bidang bina program dan pengembangan SDM, bidang bina jaminan dan sarana kesehatan;
 - b. Penyelenggaraan pengkoordinasian dan fasilitasi pengendalian pengawasan bidang bina pelayanan kesehatan, bidang bina pengendalian masalah kesehatan, bidang bina program dan pengembangan SDM, bidang bina jaminan dan sarana kesehatan;
 - c. Penyelenggaraan pengkoordinasian pengawasan bidang bina pelayanan kesehatan, bidang bina pengendalian masalah kesehatan, bidang bina program dan pengembangan SDM, bidang bina jaminan dan sarana kesehatan;
 - d. Penyelenggaraan pengkoordinasian penegakan hukum bidang bina pelayanan kesehatan, bidang bina pengendalian masalah kesehatan, bidang bina program dan pengembangan SDM, bidang bina jaminan dan sarana kesehatan;
 - e. Penyelenggaraan penataan pembinaan dan pengkoordinasian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - f. Pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga non pemerintah dan swasta dalam pengelolaan kesehatan, sesuai ketentuan yang berlaku;
 - g. Pemberian masukan yang perlu kepada Gubernur sesuai bidang tugas dan fungsinya;
 - h. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Gubernur sesuai standar yang ditetapkan;
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target					Rumus Penghitungan	Sumber Data	
						2014	2015	2016	2017	2018			
1.	Mewujudkan Pelayanan Kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Sumatera Selatan	1.1 Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan 85 persen	1.1.1 Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat	1.1.1.1	Persentase Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang kompeten	Persen	94%	95%	98%	99%	100%	= Jumlah persalinan oleh tenaga kesehatan dalam satu wilayah pada waktu tertentu / Jumlah seluruh sasaran persalinan dalam 1 tahun X 100%	Bidang Bina Pelayanan Kesehatan
				1.1.1.2	Persentase desa yang mencapai UCI	Persen	95%	95%	95%	95%	95%	= Jumlah desa / kelurahan UCI / Seluruh desa / kelurahan x 100%	Bidang Bina Pengendalian Masalah Kesehatan
				1.1.1.3	Penemuan kasus "Discarded" campak pada tiap 100.000 penduduk	Persen	< 5 %	< 5 %	< 5 %	< 5 %	< 5 %	Jumlah kasus "Discarded" campak di satu wilayah kerja selama 1 tahun / jumlah seluruh penduduk di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama x	Bidang Bina Pengendalian Masalah Kesehatan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target					Rumus Penghitungan	Sumber Data
							2014	2015	2016	2017	2018		
				1.1.1.4	Persentase desa yang melaksanakan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) penyakit tidak menular	Persen	10%	11%	12%	13%	14%	Jumlah desa yang melaksanakan Posbindu penyakit tidak menular di satu wilayah kerja/jumlah seluruh desa di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama x 100%	Bidang Bina Pengendalian Masalah Kesehatan
				1.1.1.5	Persentase kabupaten/kota yang memiliki peraturan kawasan tanpa rokok (KTR)	Persen	30%	35%	40%	45%	50%	Jumlah kab/kota yang memiliki peraturan kawasan tanpa rokok (KTR)/jumlah seluruh kab/kota di Prov. Sumsel x 100%	Bidang Bina Pengendalian Masalah Kesehatan
				1.1.1.6	Jumlah orang umur > 15 tahun yang melakukan KTS (Konseling Testing Sukarela)	Orang	23,385	27,126	31,466	36,500	42,340	Jumlah orang berusia lebih dari 15 tahun yang melakukan konseling dan tes HIV/AIDS secara sukarela di fasilitas pelayanan kesehatan dalam kurun waktu 1 tahun di satu wilayah kerja	Bidang Bina Pengendalian Masalah Kesehatan
				1.1.1.7	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan olahraga	Puskesmas	95	100	110	120	130	Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan olahraga di suatu wilayah kerja dalam waktu 1 tahun	Bidang Bina Pelayanan Kesehatan
				1.1.1.8	Persentase kabupaten/kota yang telah melaksanakan upaya kesehatan kerja	Persen	70%	75%	80%	85%	90%	Jumlah kab/kota yang menyelenggarakan upaya kesehatan kerja di suatu wilayah/Jumlah Seluruh kab/kota x 100%	Bidang Bina Pelayanan Kesehatan
				1.1.1.9	Persentase kab/kota yang melaksanakan program bina yankestradkom, alternatif dan komplementer	Persen	66%	70%	86%	91%	96%	Jumlah kab/kota yang menyelenggarakan upaya program bina yankestradkom, alternatif dan komplementer kerja di suatu wilayah/Jumlah Seluruh kab/kota x 100%	Bidang Bina Pelayanan Kesehatan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target					Rumus Penghitungan	Sumber Data	
						2014	2015	2016	2017	2018			
				1.1.1.10	Persentase Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Program Bebas Pasung bagi pasien yang mengalami gangguan jiwa	Persen	75%	80%	85%	90%	100%	Jumlah Kabupaten / Kota yang telah melakukan Program Bebas Pasung /Jumlah seluruh gangguan jiwa dalam suatu Kabupaten / Kota x 100%	Bidang Bina Pelayanan Kesehatan
				1.1.1.11	Jumlah kasus pasung	Orang	120	80	40	20	0	Jumlah kasus pasung akibat gangguan jiwa di suatu wilayah kerja pada tahun yang sama	Bidang Bina Pelayanan Kesehatan
				1.1.1.12	Persentase Kabupaten/ Kota yang melaksanakan upaya kesehatan pengembangan	Persen	70%	80%	85%	90%	95%	Jumlah Kabupaten / Kota yang telah melaksanakan upaya kesehatan pengembangan /Jumlah seluruh kab/Kota x 100%	Bidang Bina Pelayanan Kesehatan
				1.1.1.13	Persentase Puskesmas yang melakukan penjangkaran kesehatan untuk peserta didik kelas VII dan X	Persen	40%	45%	50%	55%	60%	Jumlah Puskesmas yang melakukan penjangkaran kesehatan siswa kelas VII dan X di satu wilayah kerja dalam waktu 1 tahun/jumlah seluruh Puskesmas di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama x 100%	Bidang Bina Pelayanan Kesehatan
				1.1.1.14	Jumlah Kabupaten / Kota yang mengembangkan Program Usila	Kab/Kota	17	17	17	17	17	Jumlah Kabupaten / Kota yang melakukan program Usila/Jumlah Seluruh Kabupaten / Kota x 100%	Bidang Bina Pelayanan Kesehatan
				1.1.1.15	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB Aktif	Persen	60%	62%	65%	67%	70%	Jumlah PUS yang menggunakan kontrasepsi disuatu Kabupaten dlm kurun wkt tertentu/Jumlah PUS dalam suatu Kabupaten dlm kurun waktu tertentu x 100%	Bidang Bina Pelayanan Kesehatan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target					Rumus Penghitungan	Sumber Data
							2014	2015	2016	2017	2018		
				1.1.1.16	Rasio antara kebutuhan KB dan KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	Persen	7.5%	7.0%	6.0%	5.5%	5.0%	Jumlah wainata yang sudah tidak ingin mempunyai anak atau ingin menjarangkan kehamilannya sampai dengan 24 bulan dan tidak menggunakan alat kontrasepsi/jumlah pasangan usia subur	Bidang Bina Pelayanan Kesehatan
				1.1.1.17	Total Fertility Rate (TFR)	per 1.000 wanita	2.6	2.4	2.2	2.1	2.0	Jumlah anak yang akan dimiliki seorang wanita selama masa reproduksinya per 1.000 wanita dalam suatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu	Bidang Bina Pelayanan Kesehatan
			1.1.2 Menjamin ketersediaan pelayanan kefarmasian dan fasilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat Sumsel	1.1.2.1	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas sesuai kebutuhan	Persen	90%	93%	96%	98%	100%	Jumlah ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas sesuai kebutuhan masyarakat/Jumlah seluruh obat yang tersedia x 100%	Bidang Bina Jaminan dan Sarana Kesehatan
				1.1.2.2	Persentase Puskesmas yang memiliki sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar	Persen	55%	60%	70%	80%	90%	Jumlah Puskesmas yang memiliki sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar pada satu wilayah kerja dalam waktu 1 tahun/jumlah seluruh Puskesmas pada satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama x 100%	Bidang Bina Jaminan dan Sarana Kesehatan
				1.1.2.3	Persentase Rumah Sakit Umum Daerah yang memiliki sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar	Persen	55%	65%	75%	85%	95%	Jumlah rumah sakit umum daerah yang memiliki sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar pada satu wilayah kerja dalam waktu 1 tahun/jumlah seluruh rumah sakit pada satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama x 100%	Bidang Bina Jaminan dan Sarana Kesehatan
				1.1.2.4	Persentase Industri Rumah Tangga (IRTP) yang memenuhi persyaratan kesehatan	Persen	55%	70%	80%	90%	100%	Jumlah Industri Rumah Tangga (IRTP) yang mempunyai izin edar/Jumlah Industri Rumah Tangga (IRTP) yang mengikuti penyuluhan keamanan pangan x 100%	Bidang Bina Jaminan dan Sarana Kesehatan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target					Rumus Penghitungan	Sumber Data
							2014	2015	2016	2017	2018		
				1.1.2.5	Persentase rumah sakit mampu PONEK	Persen	45%	55%	70%	80%	100%	Jumlah Rumah Sakit Kabupaten / Kota yang melaksanakan PONEK(yg memiliki Sp. OG, Sp.A & bidan terlatih)/Jumlah Rumah Sakit di Kabupaten/ Kota x 100%	Bidang Bina Pelayanan Kesehatan
				1.1.2.6	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi versi 2012	Persen	5%	10%	15%	20%	25%	Jumlah Rumah Sakit yang sudah terakreditasi di suatu Kabupaten / Kota /Jumlah Rumah Sakit di seluruh Kabupaten / Kota x 100%	Bidang Bina Program dan Pengembangan SDM
				1.1.2.7	Persentase Puskesmas yang terakreditasi	Persen	1%	3%	10%	35%	65%	Jumlah Puskesmas yang sudah terakreditasi di suatu Kabupaten / Kota /Jumlah Puskesmas di seluruh Kabupaten / Kota x 100%	Bidang Bina Program dan Pengembangan SDM
			1.1.3 Memberikan jaminan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan bermutu	1.1.3.1	Cakupan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah pasien masyarakat miskin di pelayanan kesehatan di strata 2 & strata 3 (pelayanan kesehatan milik pemerintah & swasta)/Jumlah masyarakat miskin x 100%	Bidang Bina Jaminan dan Sarana Kesehatan
				1.1.3.2	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar masyarakat miskin	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah Kunjungan pasien masyarakat miskin di sarana kesehatan strata 1 (pelayanan kesehatan milik pemerintah)/Jumlah seluruh masyarakat miskin diKabupaten / Kota x 100%	Bidang Bina Jaminan dan Sarana Kesehatan
				1.1.3.3	Persentase penduduk yang mendapat Jaminan Sosial Kesehatan Sumsel Semesta	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah penduduk Sumsel yang mendapat Jaminan Sosial Kesehatan Sumsel Semesta/jumlah seluruh penduduk Sumsel x 100%	Bidang Bina Jaminan dan Sarana Kesehatan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target					Rumus Penghitungan	Sumber Data
							2014	2015	2016	2017	2018		
2.	Mewujudkan Masyarakat yang mandiri untuk Hidup Bersih dan Sehat	2.1 Persentase RumahTangga ber Perilaku Hidup Bersih & Sehat 80 persen	2.1.1 Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk Hidup Bersih & Sehat	2.1.1.1	Persentase Rumah Sehat	Persen	67.7%	70.8%	73.9%	76.4%	80%	Jumlah rumah yang memenuhi syarat kesehatan di suatu Kabupaten / Kota/Jumlah seluruh rumah yang diperiksa di Kabupaten / Kota x 100%	Bidang Bina Pengendalian Masalah Kesehatan
				2.1.1.2	Persentase tempat tempat umum sehat	Persen	67%	70%	73%	77%	80%	Jumlah Tempat-Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan di suatu Kabupaten/ Kota/Jumlah Seluruh Tempat-Tempat Umum yang diperiksa di Kabupaten / Kota x 100%	Bidang Bina Pengendalian Masalah Kesehatan
				2.1.1.3	Persentase keluarga yang memiliki akses air bersih	Persen	67.2%	70.4%	73.6%	76.8%	80%	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses air bersih yang memenuhi syarat kesehatan di Kabupaten/Kota/Jumlah rumah tangga yang memiliki akses air bersih yang diperiksa di Kabupaten /Kota x 100%	Bidang Bina Pengendalian Masalah Kesehatan
				2.1.1.4	Persentase Desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Persen	26%	39%	53%	67%	80%	Jumlah Desa yang melaksanakan STBM diKabupaten/Kota/Jumlah seluruh desa di Kabupaten / Kota x 100%	Bidang Bina Pengendalian Masalah Kesehatan
				2.1.1.5	Persentase kab/kota yang melaksanakan Kabupaten/Kota Sehat (KKS)	Persen	0,06%	0,3%	30%	50%	80%	Jumlah kab/kota yang mclaksanakan program kab/kota sehat/jumlah seluruh kab/kota x 100%	Bidang Bina Pengendalian Masalah Kesehatan
				2.1.1.6	Cakupan Desa Siaga Aktif Purnama dan Mandiri	Persen	70.0%	73%	76%	78%	80%	Jumlah Desa Siaga yang aktif purnama dan mandiri di suatu Kabupaten / Kota/ Jumlah Desa siaga yang dibentuk dalam suatu Kabupaten / Kota x 100%	Bidang Bina Program dan Pengembangan SDM

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target					Rumus Penghitungan	Sumber Data
							2014	2015	2016	2017	2018		
3.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan tersebar merata	3.1 Persentase Puskesmas yang memiliki SDM kesehatan yang sesuai standar 100 persen	3.1.1 Meningkatkan kecukupan SDM kesehatan disetiap jenjang pelayanan	3.1.1.1	Persentase kecukupan SDM di Puskesmas sesuai standar	Persen	50%	60%	70%	80%	100%	Jumlah Puskesmas yang memiliki SDM sesuai standar di satu wilayah/jumlah seluruh Puskesmas x 100%	Bidang Bina Program dan Pengembangan SDM
		3.2 Persentase RSUD yang memiliki SDM kesehatan yang sesuai standar 100 persen		3.1.1.2	Persentase kecukupan SDM di RSUD sesuai standar	Persen	50%	60%	70%	80%	100%	Jumlah RSUD yang memiliki SDM sesuai standar di satu wilayah/jumlah seluruh RSUD x 100%	Bidang Bina Program dan Pengembangan SDM
			3.1.2 Meningkatnya kualitas SDM kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan kesehatan dan uji kompetensi, akreditasi sertifikasi	3.1.2.1	Persentase Tenaga Kesehatan yang mempunyai STR (Surat Tanda Registrasi)	Persen	30%	40%	50%	60%	70%	Jumlah tenaga kesehatan yang sudah memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) di Kabupaten / Kota/Jumlah seluruh tenaga kesehatan di suatu Kabupaten / Kota x 100%	Bidang Bina Program dan Pengembangan SDM
4.	Mewujudkan Derajat Kesehatan Masyarakat yang setinggi - tingginya	4.1 Angka Kematian Ibu (AKI) 134 orang	4.1.1 Menurunkan Jumlah Kematian Ibu Maternal	4.1.1.1	Jumlah Kematian Ibu Maternal	Orang	142	140	138	136	134	Jumlah Kematian ibu maternal disuatu Kabupaten / Kota/Jumlah Kelahiran Hidup di suatu Kabupaten / Kota x 100.000 kelahiran hidup	Bidang Bina Pelayanan Kesehatan
		4.2 Angka Kematian Bayi (AKB) 100 orang	4.2.1 Menurunnya jumlah kematian neonatal, bayi & balita	4.2.1.1	Jumlah Kematian bayi	Orang	120	115	110	105	100	Jumlah Kematian Bayi di suatu Kabupaten / Kota/Jumlah Kelahiran Hidup di suatu Kabupaten / Kota x 1000 kelahiran hidup	Bidang Bina Pelayanan Kesehatan
				4.2.1.2	Jumlah Kematian balita	Orang	52	50	48	46	44	Jumlah balita di suatu Kabupaten / Kota/Jumlah Kelahiran Hidup di suatu Kabupaten / Kota x 1000 kelahiran hidup	Bidang Bina Pelayanan Kesehatan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target					Rumus Penghitungan	Sumber Data
							2014	2015	2016	2017	2018		
				4.2.1.3	Angka harapan hidup	Tahun	70.5	70.7	70.9	80.1	80.3	Perkiraan jumlah tahun hidup dari individu yang berdiam di suatu wilayah dari sekelompok makhluk hidup tertentu.	Bidang Bina Pelayanan Kesehatan
		4.3 Persentase balita gizi buruk < 1persen	4.3.1 Mengatasi masalah gizi utama di masyarakat terutama kelompok rentan	4.3.1.1	Persentase balita gizi buruk	Persen	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	jumlah balita gizi buruk yang ditemukan di suatu wilayah kerja/Jumlah seluruh Balita diwilayah kerja yang sama dalam kurun waktu 1 tahun x 100%	Bidang Bina Pelayanan Kesehatan
				4.3.1.2	Persentase balita gizi kurang	Persen	15%	13%	11%	9%	7%	Jumlah balita gizi kurang yang ditemukan di suatu wilayah kerja/Jumlah seluruh Balita diwilayah kerja yang sama dalam kurun waktu 1 tahun x 100%	Bidang Bina Pelayanan Kesehatan
				4.3.1.3	Persentase Stunting pada anak Balita	Persen	35%	34%	32%	30%	28%	Jumlah anak Balita yang stunting (pendek) di suatu wilayah kerja/Jumlah seluruh Balita diwilayah kerja yang sama dalam kurun waktu 1 tahun x 100%	Bidang Bina Pelayanan Kesehatan
				4.3.1.4	Persentase bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif	Persen	70%	72%	75%	77%	80%	Jumlah bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif di suatu Kabupaten / Kota/Jumlah seluruh bayi di suatu Kabupaten / Kota x 100%	Bidang Bina Pelayanan Kesehatan
		4.4 Umur Harapan Hidup 80,3 tahun	4.4.1 Menurunnya Angka Kesakitan dan Kematian Penyakit Menular dan Tidak Menular	4.4.1.1	Annual Parasit Incidence (API)	per 1.000 penduduk	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	Jumlah penderita/ kasus malaria positif di suatu Kabupaten/ Kota/Jumlah seluruh penduduk di suatu Kabupaten / Kota x 1.000 penduduk	Bidang Bina Pengendalian Masalah Kesehatan
				4.4.1.2	Angka keberhasilan pengobatan Penyakit TB BTA (+)	Persen	87%	88%	89%	90%	91%	Jumlah penderita TB BTA(+) yang diobati dan sembuh dalam suatu wilayah / Kota/Jumlah penderita TB BTA(+) yang diobati di wilayah kerja yang sama dalam kurun waktu 1 tahun x 100%	Bidang Bina Pengendalian Masalah Kesehatan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target					Rumus Penghitungan	Sumber Data
							2014	2015	2016	2017	2018		
				4.4.1.3	Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk	per 100.000 penduduk	51	50	49	48	47	Jumlah penderita DBD di suatu Kabupaten / Kota / Jumlah penduduk disuatu Kabupaten / Kota x Jumlah penduduk disuatu Kabupaten / Kota x 100.000 penduduk	Bidang Bina Pengendalian Masalah Kesehatan
				4.4.1.4	Case Notification Rate kasus TB per 100.000 penduduk	per 100.000 penduduk	119	125	132	139	146	Jumlah kasus baru & Lama penderita TB / Jumlah seluruh penduduk di suatu Kabupaten / Kota x 100.000	Bidang Bina Pengendalian Masalah Kesehatan
				4.4.1.5	Persentase perempuan usia 30-50 tahun di deteksi dini ca. cervik dan payudara	Persen	0.001%	1%	2%	3%	4%	Jumlah perempuan usia 30-50 tahun di satu wilayah kerja selama 1 tahun yang diperiksa secara dini ca. cervik dan payudara / jumlah seluruh perempuan usia 30-50 tahun di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama x 100%	Bidang Bina Pengendalian Masalah Kesehatan
				4.4.1.6	Angka Kematian Jema'ah Haji < 2 / 1000 jemaah haji	per 1.000 jemaah haji	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	Jumlah jema'ah haji yang wafat di Arab Saudi selama masa operasional / 1000 jema'ah	Bidang Bina Pelayanan Kesehatan

Palembang, 13 Nopember 2014
Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Sumatera Selatan



Dra. Lesty Nurainy, Apt, M.Kes
NIP. 19620703 198903 2 002